

# PERSAHABATAN UTARA DAN SELATAN

Cerita dari Mereka  
yang Berjuang  
Menyelamatkan  
Lingkungan  
Indonesia Bersama  
Siemenpuu  
2002 - 2021





## PERSAHABATAN UTARA DAN SELATAN

*Cerita dari Mereka yang Berjuang  
Menyelamatkan Lingkungan Indonesia  
Bersama Siemnpuu  
2002 - 2021*

Oleh Tim Penulis  
Copyright @ 2022  
Cetakan pertama Oktober 2022

Tim Penulis  
Okto Yugo Setiyo  
Nurain Lapolo  
Herbet  
Nurul Fitria  
Suryadi  
Rina Syahputri  
Arpiyan Sargita  
Renal Husa  
Defri Sofyan  
Very Syardianta

Editor  
Zainuri Hasyim  
Made Ali  
Okto Yugo Setiyo  
Nurul Fitria

Cover dan Layouter  
Nurul Fitria

---

Yayasan Siemnpuu didirikan pada 1998 oleh 15 LSM dan yayasan Finlandia yang bekerja pada isu-isu lingkungan dan pembangunan. Antara 2002 hingga 2018, Siemnpuu telah mendanai lebih dari 600 proyek lingkungan di lebih dari 50 negara berkembang. Lembaga ini menerima dana dari kerjasama pembangunan publik yang dikelola Kementerian Luar Negeri Finlandia. Siemnpuu memberikan dukungan terhadap inisiatif lingkungan dan demokrasi yang dilakukan oleh aktor masyarakat sipil. Proyek-proyek yang didukung berfokus untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan serta mengurangi hilangnya keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

Di Indonesia, Siemnpuu mulai banyak memberikan bantuan pendanaan sejak 2002 hingga kini. Terhitung selama dua dekade ini, ada 38 lembaga yang dibiayai Siemnpuu dengan jumlah proyek yang dikerjakan mencapai 74 judul. Semua kegiatan di Indonesia ini berkaitan dengan beberapa isu seperti air bersih, coastal, penyelamatan hutan, gambut, masyarakat adat, penggunaan lahan pertanian dan lainnya. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan pun bermacam-macam. Mulai dari advokasi kebijakan, peningkatan kapasitas lembaga dan masyarakat, konservasi, penelitian, resolusi konflik hingga kampanye media.

# PERSAHABATAN UTARA DAN SELATAN

*Cerita dari Mereka yang Berjuang Menyelamatkan  
Lingkungan Indonesia Bersama Siemnpuu  
2002 - 2021*



2022



# KATA PENGANTAR

*Kirsi Chavda,  
Programme Coordinator  
Yayasan Siemempuu*

Yayasan Siemempuu mulai mendanai inisiatif penyelamatan lingkungan dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di *Global South* pada tahun 2002. Masyarakat sipil Indonesia telah menjadi mitra kami sejak awal, jadi tahun ini perjalanan kami bersama-sama menginjak usia 20 tahun. Selama tahun-tahun ini kami telah mendukung 75 proyek yang dirancang dan dilaksanakan oleh OMS lokal Indonesia.

Secara keseluruhan kami telah memberikan sekitar 2,42 juta Euro untuk proyek-proyek ini, dan CSO pelaksana telah memberikan kontribusi sekitar 240.000 Euro dalam pekerjaan sukarela, barang atau dana yang disumbangkan sebagai pembiayaan sendiri untuk melaksanakannya.

Tema proyek ini bervariasi dari pertanian (agrikultur) dan advokasi kebijakan lingkungan hingga kampanye hutan, penguatan konservasi hutan berbasis masyarakat, reboisasi, penghidupan berkelanjutan di kawasan hutan, kerja-kerja

komunikasi dan jaringan hingga pemantauan persidangan. Elemen kunci dari semua inisiatif adalah penguatan masyarakat sipil dan komunitas lokal itu sendiri.

Merupakan suatu kehormatan bagi Siemempuu untuk menyaksikan inspirasi yang lahir dari mitra kami di Indonesia untuk menghasilkan publikasi berjudul *Persahabatan Utara dan Selatan: Cerita dari Mereka yang Berjuang Menyelamatkan Lingkungan Indonesia bersama Siemempuu 2002 – 2021*.

Cara mereka melakukan *brainstorming* konsep publikasi ini pada pertemuan mitra yang diadakan pada tahun 2019, dan kemudian bersama-sama menganalisis 20 tahun kerja CSO, serta mengubahnya menjadi publikasi, adalah gambaran sebenarnya dari sifat mitra kami dan kemitraan kami dengan mereka.

Ini terdiri dari diskusi yang jelas, kemauan untuk berkolaborasi, mencari tujuan bersama dan

### Kata Pengantar

berbagi pelajaran yang dipelajari bersama. Mitra kami tidak menganggap kami sebagai pemberi dana yang jauh, tetapi sebagai rekan yang membentuk bagian dari gerakan lingkungan dan sosial global.

Selain pelaporan proyek, selama bertahun-tahun banyak anggota staf dan aktivis Siemenpuu memiliki kesempatan untuk mengunjungi mitra kami dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang konteks hutan dan masyarakat sipil di Indonesia.



Kami pada gilirannya membagikan realitas Indonesia kepada *audiens* Finlandia melalui pekerjaan komunikasi kami.

Di Siemenpuu, kami berharap kisah-kisah yang disampaikan dalam publikasi ini menginspirasi baik masyarakat Indonesia, maupun khalayak global untuk terus bekerja bagi dunia di mana nilai besar dari keanekaragaman hayati hutan tidak dapat diabaikan.

Kisah-kisah ini menunjukkan bagaimana anggota masyarakat lokal dan OMS lingkungan bergabung untuk menuntut pengambil keputusan dan otoritas sebagai pengemban tugas untuk menerbitkan regulasi yang efektif dari penggunaan sumber daya alam

dan implementasi yang cepat. Bagaimana mereka melakukan komunikasi berkelanjutan dan pekerjaan untuk meningkatkan kesadaran. Bagaimana mereka menanam pohon dan membuat sekat kanal di lahan gambut. Bagaimana mereka berinovasi dan memikirkan cara bagi masyarakat lokal untuk mendapatkan mata pencaharian yang berkelanjutan di kawasan hutan. Bagaimana mereka menuntut penggunaan lahan kolektif dan hak sumber daya alam bagi masyarakat, serta ruang bebas dan aman bagi masyarakat sipil.

Mereka menghadapi konflik kepentingan dan pelecehan oleh industri yang mengeksploitasi sumber daya alam atau otoritas. Cerita-cerita tersebut, semua dirangkum dalam publikasi ini.

Sering kali, sebagai pembela lingkungan, mitra kita mempertaruhkan keselamatan mereka sendiri dan mungkin meragukan apakah pekerjaan mereka bermanfaat. Tak perlu dipertanyakan lagi, jawabannya jelas sangat bermanfaat.

Siemenpuu berterima kasih kepada semua orang yang berbagi cerita mereka melalui publikasi ini dan berharap mereka tetap bertahan untuk melanjutkan pekerjaan mereka. #

# MENYELAMATKAN HUTAN DAN LINGKUNGAN DENGAN SEBUAH GAGASAN DAN KEBERANIAN

Okto Yugo  
Wakil Koordinator Jikalahari

Kehadiran Siemenpuu di Indonesia bagaikan restu dari reformasi di Indonesia. Di saat itu pula izin kehutanan dilepas *jor-joran* di tengah deforestasi besar-besaran yang terjadi. Siemenpuu dengan senang hati bersedia masuk mendukung organisasi masyarakat sipil yang berhadapan dengan situasi berisiko tersebut. Siemenpuu memahami betul bahwa perjuangan menyelamatkan hutan membutuhkan keberanian dan upaya yang militan.

Misalnya saat Jikalahari intens menyuarakan pemberantasan *illegal logging* yang saat itu mendapat sambutan baik oleh Polda Riau. Polda Riau menggelar operasi besar-besaran. Namun aksi berani Polda Riau ini juga memicu kemarahan oknum-oknum perusak hutan. Bahkan para perambah hutan sampai mendatangi kantor Jikalahari dengan membawa pekerja *sawmill* diangkut dengan satu truk.

Siemenpuu juga bersedia mendukung gagasan-gagasan yang mungkin saja baru dan belum populer. Mereka secara leluasa memberikan kesempatan bagi mitra-mitranya di Indonesia berkembang dan tak terkunci pada *output* proyek. Selain

itu Siemenpuu juga berhasil mendorong inisiatif peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal yang terdampak atas desakan bisnis.

Siemenpuu juga dengan tangan terbuka menyambut gagasan ataupun inisiatif baru dari mitra-mitranya. Tak jarang inisiatif tersebut dikemudian hari menjadi inspirasi dalam isu penyelamatan lingkungan di Indonesia.

Contohnya, isu penyelamatan gambut di Semenanjung Kampar, Riau. Saat belum banyak yang membicarakan persoalan gambut, Siemenpuu hadir di garda terdepan mendukung mitra di Riau. Hingga kini Semenanjung Kampar berhasil menjadi salah satu hamparan gambut dengan hutan alam yang terluas di Indonesia, bahkan dunia. Begitu juga cerita dari YMI, di mana Siemenpuu mendukung terbitnya inisiasi izin Perhutanan Sosial pertama di Indonesia.

Cerita lain misalnya yang disampaikan oleh Forest Watch Indonesia, Siemenpuu mendukung isu restorasi mangrove yang diinisiasi organisasi masyarakat sipil. Hasilnya, pada 2016 dilahirkan gerakan pemulihan mangrove melalui 'Jangkar

**Kata Pengantar**

Mangrove'. Tentu ini menarik, sebab Pemerintah baru pada 2020 benar-benar fokus merehabilitasi mangrove dengan menjadikan mangrove sebagai prioritas pemerintah melalui pembentukan Badan Restorasi gambut dan Mangrove (BRGM).

Isu lainnya seperti riset soal potensi kerusakan dan peluang ekonomi pada ekosistem padang lamun yang dikerjakan Kaoem Telapak, di mana masih sedikit sekali yang membicarakan potensi padang lamun dan bahaya yang dapat dihadapi dimasa mendatang.

Siemenpuu memiliki keunikan dalam memberikan dukungan kepada mitra-mitranya. Dengan jumlah yang tak begitu besar, Siemenpuu justru mengajak setiap mitranya berkontribusi pada program yang didanai (*self financing*). Dampak baiknya, ini adalah kerja-kerja aktivis dan ada nilai gotong-royong di sana.

Sekarang, meskipun Siemenpuu tak lagi mendukung secara *finacial*, kami sangat percaya bahwa Siemenpuu dan mitra-mitranya di Indonesia tidak akan putus dalam kerja-kerja bersama untuk menyelamatkan hutan dan lingkungan hidup. Apalagi personal-personal di Siemenpuu memiliki hubungan begitu erat. Siemenpuu bagi kami adalah sahabat dalam perjuangan menyelamatkan hutan dan gambut khususnya di Riau dan Indonesia.

Dukungan Siemenpuu selama 20 tahun di Indonesia telah meninggalkan modalitas yang besar bagi kemampuan organisasi masyarakat sipil di Indonesia dalam mengadvokasi isu-isu lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Termasuk buku ini, sebuah bukti dan menjadi monumen sederhana yang dibuat sebagai tanda persahabatan Siemenpuu dengan mitra-mitra di Indonesia dan para senior advisory board Siemenpuu Indonesia.

Lebih jauh harapannya buku ini juga dapat menjadi pembelajaran bagi perjuangan-perjuangan penyelamatan hutan dan lingkungan yang bukan hanya dari utara ke selatan, namun untuk seluruh penjuru dunia.

Namun tentunya kami meminta maaf atas keterbatasan buku ini yang tidak mampu menuliskan seluruh pengalaman para mitra-mitra Siemenpuu di Indonesia.

Sekali lagi saya dan para penulis berterimakasih kepada Siemenpuu, khususnya Kirsi Chavda, Otto Miettinen dan teman-teman di Siemenpuu lainnya. Saya juga berterimakasih kepada para mitra yang berkenan memberikan cerita dan pengalamannya. Terimakasih kepada para Senior Advisory board, Noer Fauzi Rachman, Don Marut, Roem Tupatimasang, Rivani Noer dan khususnya Zainuri Hasyim yang membantu dan mendampingi para penulis sampai buku ini selesai.

Sekali lagi kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu hingga buku ini dapat selesai. Mari terus berjuang untuk menyelamatkan hutan dan lingkungan, untuk generasi yang akan datang.

**Salam,  
Wakil Koordinator Jikalahari**



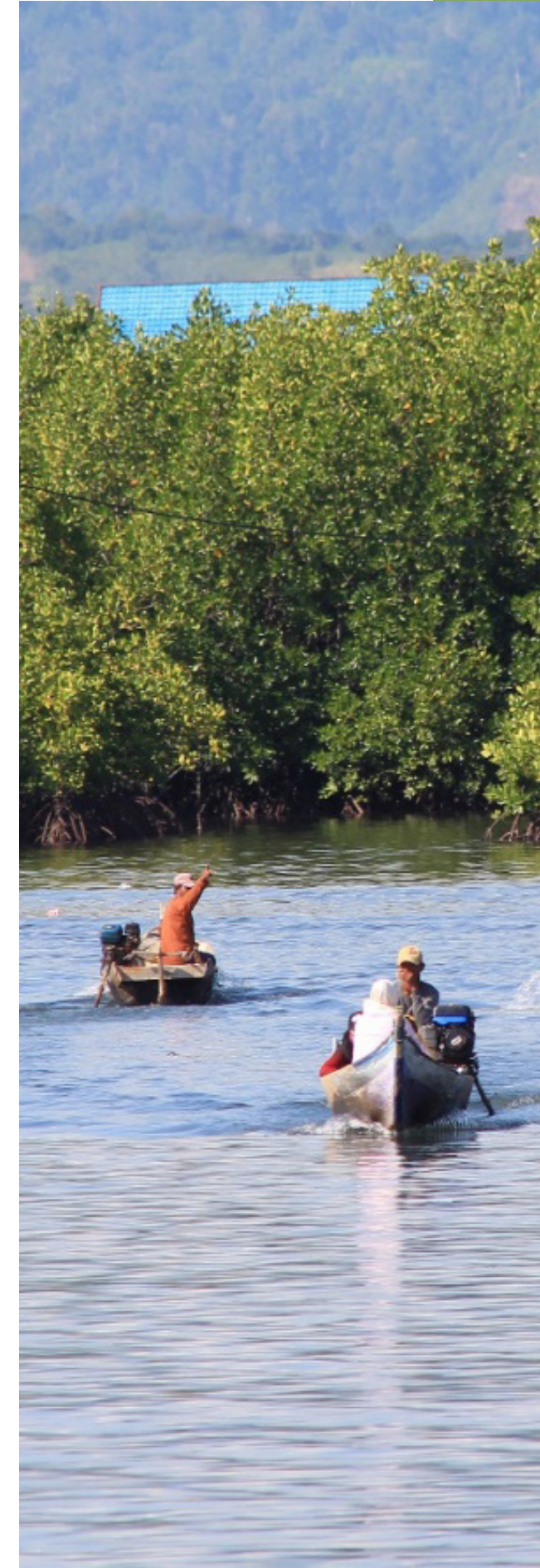
# DAFTAR ISI

---

|           |   |
|-----------|---|
| <b>i</b>  | <b><i>Kata Pengantar</i></b>                          |
| <b>vi</b> | <b><i>Daftar Isi</i></b>                              |
| <b>1</b>  | <b><i>Prolog</i></b>                                  |
| <b>9</b>  | <b><i>Cerita dari Mereka yang Berjuang</i></b>        |
| <b>10</b> | Jaring Advokasi Pengelolaan Sumberdaya Alam (Japesda) |
| <b>20</b> | Sahabat Masyarakat Pantai Kalimantan (SAMPAN)         |
| <b>28</b> | Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari)     |
| <b>44</b> | WALHI Riau  |
| <b>52</b> | Hutan Kita Institut (HaKI)                            |
| <b>58</b> | Perkumpulan Elang                                     |
| <b>66</b> | Yayasan Mitra Insani (YMI)                            |

---

|   |            |
|---|------------|
| Riau Corruption Trial/ Senarai                        | <b>76</b>  |
| Forest Watch Indonesia                                | <b>86</b>  |
| Kaoem Telapak   | <b>92</b>  |
| Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR)                | <b>98</b>  |
| Riau Women Working Group (RWWG)                       | <b>104</b> |
| <b><i>Mereka yang Terdampak</i></b>                   | <b>111</b> |
| Menjaga Mangrove Menjaga Penghidupan                  | <b>112</b> |
| Perempuan Torosiaje dan Kemiskinan Pesisir            | <b>120</b> |
| Menyelamatkan Cagar Alam untuk Bentang Hutan Mangrove | <b>128</b> |
| Mengadu Nasib di Kawasan Terlarang                    | <b>140</b> |
| Menjaga Hutan Berarti Melibatkan Masyarakat           | <b>150</b> |
| <b><i>Epilog</i></b>                                  | <b>158</b> |
| <b><i>Para Penulis</i></b>                            | <b>168</b> |
| <b><i>Catatan Kaki</i></b>                            | <b>173</b> |





## PROLOG

Yayasan Siemempuu didirikan oleh LSM Finlandia yang aktif di bidang perlindungan lingkungan dan kerjasama pembangunan. Pendanaannya bergantung pada pendanaan kerjasama pembangunan Kementerian Luar Negeri Finlandia, yang diterima Siemempuu dalam jangka waktu 2-4 tahun. Kedua fakta latar belakang ini penting untuk memahami bagaimana Siemempuu bekerja di Indonesia dan menemukan mitranya di Indonesia.

Di antara organisasi pendiri Siemempuu ada beberapa yang aktif di Indonesia sebelum Siemempuu didirikan. Pusat Layanan Kerjasama Pembangunan Finlandia Kepa (sekarang bagian dari Fingo) memiliki kerjasama yang erat dan satu anggota staf ditempatkan di INSIST Yogyakarta.

Kegiatan perusahaan industri kertas Finlandia telah dipantau dan

dikritik oleh Koalisi untuk Lingkungan & Pembangunan dan Friends of the Earth Finland. Secara khusus, pabrik pulp dan kertas di Riau memiliki hubungan yang kuat dengan Finlandia.

Pada akhir tahun 1990-an APRIL menjalin kerjasama singkat dengan UPM yang berbasis di Finlandia, dan juga pabrik APP telah menerima banyak mesin dari Finlandia dan jaminan ekspor dari pemerintah. Koneksi ini digunakan ketika Siemempuu mulai memberikan dana kepada LSM di selatan. Indonesia adalah negara penerima yang penting sejak awal, kedua setelah India.





## Prolog

Kantor Siemenpuu Finlandia telah mendedikasikan satu petugas program untuk proyek-proyek di Indonesia. Saat ini, orang itu adalah Kirsi Chavda. Aktivistis Indonesia di Siemenpuu bertindak dalam Kelompok Kerja Indonesia, memberi nasihat kepada dewan tentang apa yang harus didanai, mencari mitra baru, membantu administrasi proyek dan mengembangkan strategi.

Di antara kelompok tematik Siemenpuu, seringkali memiliki alokasi anggaran terbesar. Seorang tokoh kunci di Indonesia bekerja pada tahun-tahun awal, Anu Lounela, juga bertindak sebagai ketua yayasan selama beberapa tahun. Singkatnya, karya Indonesia sangat dihargai dan penting bagi Siemenpuu.

Filosofi Siemenpuu adalah kelompok lokal selalu lebih tahu bagaimana cara terbaik beroperasi di wilayah mereka. Fokus kerja ditentukan dalam dialog dengan mitra di selatan. Fokus Siemenpuu di masing-masing negara juga diarahkan oleh kepentingan komunitas aktivis Finlandia, terutama oleh pilihan mitra pertama.

Hutan dan lahan hutan selalu menjadi fokus utama Siemenpuu di Indonesia. Sejak awal, Siemenpuu mendukung kerja sedekat mungkin dengan tingkat akar rumput, serta kerja kebijakan (advokasi).

Penerima awal pendanaan Siemenpuu pada tahun 2002 termasuk para pelaku tingkat nasional Serikat Petani Indonesia, Forest Watch Indonesia dan Telapak, segera diikuti oleh lebih banyak kegiatan tingkat lokal oleh

kantor-kantor WALHI provinsi di Sumatera.

Kemudian, pada tahun 2005, dua kemitraan penting didirikan, dengan Arupa, yang mendukung perjuangan hak atas tanah masyarakat lokal melawan Perhutani di Jawa Tengah, dan Jikalahari di Riau, adalah penerima utama. Hubungan dengan Jikalahari dan INSIST tetap ada, sementara sebaliknya terjadi pergantian di antara para mitra.



Setelah beberapa tahun pertama, Siemenpuu mengembangkan strukturnya di Indonesia dengan membentuk kelompok penasihat dengan beberapa aktivis senior seperti Roem Topatimasang, Don Marut, Sandra Moniaga dan Farah Sofa. Seorang koordinator paruh waktu Indonesia juga dipekerjakan, pertama Ade Fadli, kemudian Asep Firdaus.

Pada tahun 2010 HuMa ditunjuk sebagai administrator dan organisasi pendukung teknis, dengan koordinator paruh waktu Indonesia. Pendanaan lebih diarahkan untuk pekerjaan terkait hutan alam dan lahan gambut di Sumatera.

Faktanya, lebih dari setengah pendanaan Siemenpuu telah dihabiskan di Sumatera, 41% di Riau saja. Riau dipandang penting karena hubungan jangka panjang dengan LSM lokal, sejumlah besar

lahan gambut dan konsentrasi industri pulp yang memiliki hubungan dengan Finlandia. Namun, mitra penting dan lama juga ditemukan di Kalimantan dan Sulawesi, sementara upaya untuk memperluas ke Papua tidak berlangsung lama.

Pada 2015, Siemenpuu mengalami pemotongan anggaran dari

## PERSAHABATAN UTARA DAN SELATAN

Kementerian Luar Negeri setelah pemerintah sayap kanan baru memangkas pengeluaran pemerintah. Kemungkinan Siemenpuu untuk mendanai mitra baru berkurang, dan penurunan skala bantuan ini juga berarti bahwa posisi koordinator dan administrator Indonesia di HuMa harus dihentikan.

Setelah perkembangan politik yang positif di Indonesia, pendanaan menjadi lebih terfokus untuk mengamankan hak atas lahan hutan bagi masyarakat lokal.

Komunitas aktivis Finlandia juga ingin memprofilkan Siemenpuu dalam isu iklim, dengan menyalurkan dana untuk proyek konservasi mangrove di Indonesia yang saat itu merupakan tema yang terabaikan. Juga kegiatan yang berkaitan dengan konservasi lamun dieksplorasi, meskipun mereka belum mengarah ke proyek-proyek khusus yang didanai.

Sejak awal, pertemuan mitra Siemenpuu di Indonesia telah menjadi hal penting. Pertemuan-pertemuan ini adalah satu-satunya kesempatan bagi staf dan aktivis Finlandia untuk melihat mitra dan kelompok penasihat berinteraksi dan berbicara dengan mereka semua secara pribadi, serta mendapatkan pemahaman tentang isu-isu penting dan konteks kebijakan di Indonesia.

Mereka juga menjadi wadah untuk mendapatkan umpan balik dari mitra dan mengembangkan strategi berdasarkan masukan itu. Pertemuan-pertemuan ini sangat memotivasi dan menginspirasi para peserta Finlandia. Siemenpuu juga telah mampu mengundang

## Prolog

aktivis Indonesia ke Finlandia, dan kunjungan ini penting dalam membentuk debat politik di Finlandia dan mengarahkan pendanaan Siemenpuu.

Sementara itu, baik kantor dan aktivis Siemenpuu umumnya sangat mendukung dan puas tentang kemitraan Indonesia dan evaluasi sementara menemukan pekerjaan di Indonesia termasuk yang terkuat dalam program Siemenpuu.

Kementerian Luar Negeri tidak melihat Indonesia sebagai negara strategis untuk pendanaan kerjasama pembangunannya, yang tujuan utamanya adalah pengentasan kemiskinan. Secara formal negara berpenghasilan menengah (menurut standar OECD), Indonesia dipandang terlalu kaya untuk menjadi target utama pendanaan semacam itu. Akibatnya, pada tahun 2022 kementerian mengumumkan

tidak akan mendanai pekerjaan Indonesia lebih lanjut setidaknya sampai tahun 2025.

Sebelumnya program-program Siemenpuu di India telah dihentikan dengan cara yang sama. Saat ini, para aktivis Siemenpuu Indonesia adalah bagian dari kelompok tema Feminis Agroekologi dan Hutan Komunitas (singkatnya kelompok Agroforest), dengan proyek-proyek terkait hutan di Liberia dan Mozambik.

Ada motivasi kuat yang berkelanjutan di Siemenpuu untuk melanjutkan kemitraan yang bermanfaat di Indonesia. Pendanaan terkait iklim dan/atau keanekaragaman hayati internasional atau Finlandia diharapkan akan menawarkan kemungkinan seperti itu dalam waktu dekat.

Sampai jumpa di pertemuan mitra berikutnya!



## PERSAHABATAN UTARA DAN SELATAN



## DUA DEKADE BERSAMA SIEMENPUU

Pada 1990 hingga 2001, laju deforestasi hutan di Indonesia mencapai 2 juta hektar per tahunnya. Kegiatan penebangan hutan ilegal, pembukaan hutan untuk industri dan pertambangan hingga kerusakan alam menjadi kekhawatiran bersama para aktivis lingkungan di Indonesia.

Menginisiasi berbagai kegiatan yang tujuannya untuk menyelamatkan hutan menjadi prioritas bersama. Kekhawatiran ini nyatanya tak hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia, perhatian dari pihak lain, salah satunya Siemenpuu, menjadikan inisiasi ini semakin besar.

Siemenpuu merangkul organisasi-organisasi lingkungan di Indonesia untuk menyelamatkan hutan dan lingkungan di Indonesia. Sinergi antara masyarakat di belahan utara bumi dengan masyarakat di belahan selatan pun terjalin.

Berbagai gerakan dan kegiatan dilaksanakan sepanjang 2002 hingga 2022, selama 2 dekade ini Siemenpuu telah menjadi saudara seperjuangan bagi para aktivis

lingkungan di Indonesia. Bersama-sama untuk menyelamatkan hutan dan lingkungan bagi seluruh masyarakat.

Dalam catatan perjalanannya, selama 2 dekade ini ada lebih dari 74 proyek yang dikerjakan oleh para mitra dengan Siemenpuu. Kegiatan ini diampu oleh lebih dari 38 lembaga mitra yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.

Isu yang diadvokasi juga beragam, mulai dari hutan dan gambut, masyarakat adat, air bersih, mangrove, perencanaan penggunaan lahan, pertanian, menyelamatkan areal pesisir, pemberdayaan masyarakat pesisir, air bersih hingga pengelolaan sumber daya alam perikanan berbasis pengetahuan dan kesadaran lingkungan dari masyarakat lokal.

Isu-isu ini dielaborasi sesuai kondisi daerah masing-masing mitra yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. Berbagai kegiatan tercipta untuk merealisasikan penyelamatan dan perlindungan dari isu-isu yang ada.

## Prolog

Advokasi kebijakan dilakukan untuk mendorong lahirnya kebijakan yang *Pro Natura* sehingga perlindungan terhadap hutan dan lingkungan dapat terjamin. Tak hanya ditingkat organisasi masyarakat sipil, dorongan untuk penyadaran masyarakat di tingkat tapak juga dilakukan dengan melakukan peningkatan kapasitas berkaitan dengan advokasi kebijakan ini.

Masyarakat juga didampingi untuk mendorong perluasan ruang kelolanya dengan memanfaatkan skema Perhutanan Sosial ataupun Tanah Objek Reforma Agraria. Pengelolaan hutan dan tanah yang lestari dan berkelanjutan menjadi kunci dari kegiatan ini. Menjamin masyarakat tetap memperoleh haknya untuk mengelola lahan dan menjamin lingkungan tetap lestari dengan menerapkan praktik-praktik pertanian yang ramah lingkungan.

Tak hanya untuk menyelamatkan hutan dan mendorong ruang kelola bagi masyarakat, penyelamatan ekosistem gambut juga menjadi perhatian bersama. Melindungi kawasan ekosistem gambut menjadi perhatian demi mencegah terjadinya kerusakan masif dimasa mendatang. Masih teringat bagaimana kebakaran hutan dan lahan yang melalap lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan pada 2014 hingga 2015 silam memberikan dampak kerusakan ekologi bahkan sosial, ekonomi dan kesehatan bagi masyarakat.

Penyelamatan pesisir dengan melakukan kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan penanaman mangrove serta kampanye penyelamatan areal pesisir juga dilakukan bersama Siemenpuu.

Selain kegiatan pendampingan dan advokasi kebijakan, Siemenpuu bersama mitra juga melakukan kegiatan-kegiatan penelitian dan pelatihan bagi para aktivis untuk mengembangkan kapasitasnya dalam melakukan penyelamatan lingkungan. Pemahaman isu-isu lingkungan, kebijakan yang berlaku hingga pemanfaatan perangkat yang diperlukan berupa pelatihan pemetaan dan analisis spasial.

Training ini juga dilakukan untuk menjadi wadah pembelajaran tahap awal bagi para aktivis yang baru bergabung, sehingga dapat memperoleh bekal awal untuk diimplementasikan ke daerah masing-masing. Pertemuan para aktivis-aktivis muda dalam pelatihan ini juga menjadikan sinergi baru dan membawa keragaman aktivitas dalam melakukan advokasi yang bisa dijadikan landasan gerakan bersama.

Tak lupa, kampanye dan memanfaatkan berbagai media alternatif dan kreatif menjadi corong bagi para mitra dan Siemenpuu menyuarakan gerakan bersama penyelamatan lingkungan ini. Berbagai cara dilakukan untuk menarik banyak perhatian masyarakat terhadap gerakan penyelamatan lingkungan ini sehingga dapat menyadarkan masyarakat.

Gerakan bersama ini, menjadi pengikat erat hubungan seluruh mitra bersama Siemenpuu. Dua dekade bukanlah waktu yang singkat, namun juga bukan waktu yang cukup untuk menyelamatkan hutan dan lingkungan Indonesia. Semoga hubungan ini dapat kembali terjalin, demi lingkungan dan hutan Indonesia yang lebih baik lagi.

# MITRA SIEMENPUU

1. Jikalahari
2. Telapak Association
3. Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI)
4. INSIST Press
5. Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam (ARuPa)
6. Forest Watch Indonesia (FWI)
7. HuMa, Association for Community and Ecological Based Law Reform (Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan ekologis)
8. Wahana Bumi Hijau (WBH)
9. Akar Foundation
10. Centre for International Cooperation in Management of Tropical Peatland (CIMTROP)
11. Dana Mitra Maluku (DMM) Foundation
12. Jaring Advokasi Pengelolaan Sumberdaya Alam (JAPESDA)
13. Mitra Insani
14. Perkumpulan Bantaya
15. Perkumpulan Menapak Indonesia
16. Sahabat Masyarakat Pantai (SAMPAN)
17. Yayasan Keadilan Rakyat (YKR)
18. YPD, Yayasan Petak Danum (Petak Danum Foundation)
19. BIMA Lestari Sejahtera Institute
20. Community Alliance for Pulp Paper Advocacy (CAPPA)
21. Forum Kerjasama LSM Papua (Foker)
22. Hakiki Foundation
23. Hutan Kita Institute (HaKi)
24. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)
25. Justice, Equality and Freedom Foundation Kalimantan Timur (JEFF Kaltim)
26. Kabut Riau (Yayasan Khasanah Alam dan Budaya Tropis Riau)
27. Kaoem Telapak
28. Lembaga Pengkajian Dan Pemberdayaan Masyarakat LP2M
29. Link-AR Borneo
30. Perkumpulan Elang
31. Sajogyo Institute
32. Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke (SKP-KAM)
33. WALHI Kalimantan Selatan
34. WALHI Kalimantan Barat
35. WALHI Riau
36. WALHI Sumatera Selatan
37. Yayasan Lingkungan Hidup Humeibou Manokwari
38. Advocacy Network for North Sumatra Fisherfolk (JALA)

PERIODE  
2002 - 2018



# Cerita dari Mereka yang Berjuang

Siemenpuu bermitra dengan lembaga-lembaga lingkungan di Indonesia dan dengan bernas menggagas gerakan akar rumput yang fokus pada penyelamatan lingkungan, hutan, gambut, magrove serta peningkatan ekonomi masyarakat.

Gerakan ini menjadi cikal bakal dan bahkan menginspirasi ataupun mendorong pemerintah untuk 'ikut memperhatikan' kegiatan yang dikerjakan oleh para mitra Siemenpuu.

Dalam kerja-kerja mitra yang didukung Siemenpuu ini, tak hanya memperhatikan perlindungan lingkungan, mendorong keikutsertaan pemerintah didalam kegiatannya juga menjadi hal

penting. Karena tanpa adanya campur tangan pemerintah, gerakan yang 'berdampak besar' akan sulit untuk dicapai.

Cerita perjuangan dari para mitra ini coba disajikan dihadapan para pembaca. Harapannya, kisah yang dituturkan ini dapat menginspirasi dan 'membakar' semangat gerakan akar rumput untuk terus berusaha melindungi sumberdaya alam dan lingkungan Indonesia.

Cerita-cerita ini hanya sepenggal dari sekian banyak cerita perjuangan penyelamatan lingkungan di Indonesia. Walau hanya sepenggal, semoga ia bisa memantik semangat perjuangan kita bersama.



*Jaring Advokasi Pengelolaan  
Sumberdaya Alam (JAPESDA)*

# MENGIKAT HARAPAN DENGAN KONSISTENSI

Oleh: Nurain Lapolo  
dan Renal Husa



**YAYASAN KELOLA MANADO**, sebuah lembaga yang bergerak dalam isu pengelolaan sumberdaya alam khususnya pengelolaan pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Saat melakukan kerja-kerjanya, Kelola Manado ini menemukan catatan buruk terkait pengelolaan sumberdaya alam yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Khususnya, di wilayah Gorontalo terkait pengelolaan pesisir laut dan pengelolaan kawasan hutan yang tidak berkelanjutan.



Kawasan CATP tampak dari atas tahun 2019 - JAPESDA

Keberadaan tujuh konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang tersebar di wilayah Gorontalo dalam prakteknya tidak melakukan pengelolaan hutan secara lestari seperti diamanatkan undang-undang. Selain itu, masifnya perambahan kawasan hutan dan penebangan pohon yang dilakukan secara ilegal telah mendegradasi kawasan hutan yang menjadi wilayah tangkapan air. Hal ini secara tidak langsung berkontribusi pada bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Gorontalo.

Berangkat dari kondisi tersebut, Rahman Dako dan beberapa orang yang memiliki kekhawatiran sama menginisiasi sebuah kegiatan pelatihan. Aga, sapaan Rahman Dako—saat itu perwakilan Yayasan Kelola Manado di Gorontalo—memulai tujuannya dengan bertandang ke kantor-kantor dan sekretariat kelompok yang memiliki perhatian lebih pada isu-isu lingkungan, pesisir dan masyarakat marjinal.

Langkah pendekatan itu diambil Aga untuk mengajak beberapa lembaga dan kelompok mahasiswa yang memiliki pandangan sama, menjaga lingkungan di Gorontalo agar tetap lestari. Pesan dari pertemuan itu, lingkungan hidup di Gorontalo sedang tidak baik-baik saja. Aga selanjutnya mengajak kelompok-kelompok yang ditemuinya untuk mengikuti pelatihan pemetaan dan advokasi investigasi hutan yang akan dilaksanakan oleh Kelola Manado.

Beberapa kelompok bersedia ikut dalam pelatihan, diantaranya Kelompok Pecinta Alam (KPA) IGPAG, Kelompok Petualang Alam



Kawasan pemukiman dan mangrove di Torosiaje tahun 2019 tampak dari atas - JAPESDA

Bebas (KPAB) Gimbal, KPA Gopala, Yayasan Mutiara Hijau, Kelompok Studi Mahasiswa Biosfer (KSMB) – Fakultas MIPA Universitas Negeri Gorontalo, KPA Himpala Gorontalo Utara, Mapala Motolomoia UNG, Mapala STA - IAIN Sultan Amai Gorontalo, KPA Kompas, Serikat Nelayan Saronde Kwandang (SNSK) dan KPA Mutiara.

Setelah dibekali pengetahuan dari pelatihan, mereka mulai mempelajari kondisi lingkungan di Gorontalo dengan mempraktekan ilmu investigasi pada kawasan konsesi HPH milik PT. Centralindo yang luasannya membentang dari Kecamatan Atinggola hingga ke Kecamatan Kwandang—sekarang

masuk pada wilayah administrasi Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.

Dari hasil investigasi, ditemukan banyak masalah terkait pengelolaan hutan. Masalah ini perlu dikawal dan dituntaskan oleh pemerintah dan pengelola kawasan agar tidak meninggalkan dampak buruk bagi masyarakat berupa kerusakan lingkungan. Terlebih lagi pada saat itu Gorontalo akan membentuk wilayah administrasi baru, memisahkan diri dari Provinsi Sulawesi Utara. Rencana pemekaran wilayah ini akan berdampak terhadap pengelolaan kawasan hutan di Gorontalo. Merujuk Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor: 250/KPTS-II/1984 tanggal 20 Desember 1984, tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Sulawesi Utara, luas hutan yang ada di Gorontalo mencapai 1.877,220 hektar.

Sumber daya hutan jika dikelola dengan baik tentu akan mensejahterakan masyarakat yang berada di dalam dan luar kawasan hutan di Gorontalo. Namun sebaliknya, jika sumber daya hutan tidak dikelola dengan baik, akan mendatangkan petaka bagi masyarakat di sekitarnya. Contohnya bencana banjir dan longsor yang kerap terjadi di Gorontalo, karena potensi konflik

## JAPESDA

kepentingan oligarki dan bencana alam seperti ini bisa saja terjadi di Gorontalo.

Karena alasan ini, seluruh kelompok bermufakat membentuk organisasi yang fokus pada isu pengelolaan sumber daya alam khususnya hutan. Organisasi ini akan mengawal dan menjadi *watch dog*—anjing pengawas—terhadap kebijakan yang dirancang pemerintah Gorontalo nantinya.

Saat itu, pada 5 Juni 2000, lahirlah sebuah organisasi baru yang diberi nama Jaring Advokasi Pengelolaan Sumberdaya Alam, disingkat JAPESDA. Organisasi ini terbentuk dari jaringan kelompok dan komunitas yang kerjanya fokus pada isu sumberdaya alam. Saat

*Mangrove mati di Cagar Alam Tanjung Panjang (CATP) - JAPESDA*



itu juga disusun kode etik untuk mengikat anggota yang tergabung di JAPESDA Gorontalo.

Aga, disepakati menjadi Ketua JAPESDA, Alm. Arpan Polontalo dari KSM Biosfer UNG menjadi sekretaris dan bendaharanya, Muhlis Huntua dari KPA Kompas. JAPESDA menjadi organisasi lingkungan pertama di Gorontalo karena lahir 5 bulan setelah Provinsi Gorontalo terbentuk.

“Saat itu motivasi pendirian JAPESDA demi menjadi penyeimbang dan pengawal kebijakan yang dibuat pemerintah. Kita memberi masukan terhadap rencana dan program yang dibuat sebelum diimplementasikan agar mengutamakan masyarakat dan



lingkungan,” ujar Aga—saat itu ia merupakan Ketua Badan Pengawas Perkumpulan JAPESDA.

Kerja-kerja untuk menjaga lingkungan seperti yang disepakati saat pembentukan JAPESDA mulai dilakukan. Namun belum genap dua tahun JAPESDA berjalan, Aga harus berurusan dengan hukum dan ditetapkan sebagai tersangka atas delik pencemaran nama baik yang dilayangkan Bupati Gorontalo, Alm. Achmad Hoesa Pakaya.

Gugatan ini muncul usai siaran pers JAPESDA dimuat dalam koran Harian Gorontalo Post. Siaran pers berjudul “JAPESDA Tuding Bupati Pakaya Lakukan Kebohongan Publik”, memuat pernyataan Aga mempertanyakan komitmen Bupati Gorontalo terhadap penanganan pembalakan liar dan mereforestasi hutan di Gorontalo.

Ini merupakan kritik JAPESDA karena Bupati Pakaya menyampaikan komitmennya untuk melestarikan hutan, namun disaat bersamaan ia juga meresmikan pabrik pengolahan kayu milik PT Korean Shoi Choi. Pernyataan Aga membuat Bupati Pakaya geram dan melaporkannya ke kepolisian.

Ini menjadi ujian diawal gerakan perjuangan dan komitmen JAPESDA dalam menjaga pengelolaan SDA di Provinsi Gorontalo. Namun hal ini justru tak memadamkan api perjuangan. Anggota JAPESDA terus memberikan dukungan kepada Aga yang dikriminalisasi dengan melakukan aksi damai di depan Gedung Pengadilan Negeri Limboto.

## PERSAHABATAN UTARA DAN SELATAN

Aksi damai menuntut keadilan untuk Aga ini sayangnya direspon dengan tindakan respresif oleh polisi yang berjaga di lingkungan pengadilan. Delapan peserta aksi dipukuli hingga babak belur diseluruh tubuh, bahkan ada yang mengalami patah tulang hidung hingga kencing darah.

Persidangan terus berlanjut dan Aga harus menerima divonis 6 bulan penjara. Banding pun diajukan ke Pengadilan Tinggi Manado, namun ditolak<sup>1</sup>.

## Mempertahankan Konsistensi Pengelolaan Sumber Daya Alam

Kejadian yang menimpa Aga dan kawan-kawannya jadi pemantik semangat bagi anggota lainnya. Mulai banyak lembaga dan organisasi bahkan individu-individu yang peduli lingkungan bergabung dengan JAPESDA setelah insiden tersebut. JAPESDA Gorontalo pun melebarkan sayapnya. Pada 28 Februari 2007, JAPESDA mengubah bentuk organisasi dari jaringan menjadi perkumpulan JAPESDA. Di hari itu mereka bersepakat untuk menerbitkan akta pendirian baru dengan Nomor 181 tanggal 28 Februari 2007.

Fokus kerja JAPESDA juga bertambah untuk melakukan advokasi manajemen SDA—hutan, lahan, pesisir dan laut—, pendidikan lingkungan, mitigasi bencana, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender serta melakukan pengembangan ekonomi berkelanjutan untuk penghidupan masyarakat lokal. Selain itu,



Akibat pancaroba perahu nelayan dilabuhkan di tambatan perahu Desa Torosiaje - JAPESDA



JAPESDA juga fokus mendorong perbaikan lingkungan hidup dalam pengelolaan SDA.

Demi memaksimalkan kapasitas dan memperluas jaringan kerja, serta menaati peraturan perundang-undangan terbaru tentang kelembagaan organisasi masyarakat sipil (Ormas), JAPESDA mendaftarkan kelembagaan ke Kemenkumham dan mendapat akta lembaga Nomor 8 pada 8 Maret 2021 sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0003859. AH.01.07 Tahun 2021.

Sejak awal pendirian ditahun 2000 hingga 2021, JAPESDA telah berganti kepemimpinan sembilan

kali. “Menciptakan sistem organisasi yang baik dan mengikuti aturan yang telah disepakati bersama untuk kepentingan organisasi adalah yang paling penting,” ujar Aga.

Menurutnya konsistensi yang masih dipegang teguh inilah yang membuat JAPESDA Gorontalo bisa bertahan hingga saat ini.

Selama JAPESDA berdiri, berbagai kegiatan pemulihan hutan dan pesisir telah dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan bekerja sama dengan lembaga non pemerintah yang membantu pendanaan, sehingga kegiatan-kegiatan yang berdampak baik terhadap kelestarian lingkungan ini dapat terlaksana.

melaksanakan Program Swakelola Tipe III Rehabilitasi Mangrove di Pohuwato dan Boalemo, seluas 17,5 hektar.

Selain itu JAPESDA bersama Siemenpuu dalam Program *Sustainable Mangrove Management* di Pohuwato, Sulawesi Utara pada 2016 – 2017 berhasil merehabilitasi mangrove seluas 2 hektar. Pada 2018 – 2021 melalui program *Coastal Community, Mangrove Management and Livelihoods* masih di Pohuwato, seluas 2 hektar juga telah dipulihkan.

### Hutan Mangrove dan Siemenpuu

Bersama Siemenpuu, JAPESDA memilih dua lokasi *pilot project* yaitu Desa Siduwonge, Kecamatan Randangan dan Desa Torosiaje Jaya, Kecamatan Popayato, Pohuwato, Gorontalo. Dua daerah ini memiliki bentangan hutan mangrove dengan latar belakang yang berbeda dalam ekosistem dan pengelolaan sumber daya alam di dalamnya.

Desa Torosiaje Jaya misalnya, bentangan hutan mangrovenya relatif sedikit namun cenderung terjaga. Padahal banyak masyarakat yang bermukim dan mendiami tempat itu. JAPESDA bersama Siemenpuu, melakukan pendekatan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dengan mengajak masyarakat pesisir yang ada di desa tersebut melakukan pemanfaatan hutan mangrove semaksimal mungkin tanpa merusak ekosistem yang ada di dalamnya.

Misal kegiatan bersama *Sustainable Coastal Livelihood Management* (SUSCLAM) di area Teluk Tomini—CIDA-IUCN. Kegiatan rehabilitasi mangrove ini dilakukan sejak 2008 hingga 2011, berlokasi di empat kabupaten dari tiga provinsi di Teluk Tomini. Total areal rehabilitasi mencapai 100 hektar.

Selain itu, JAPESDA bersama DANIDA-Wetland pada 2013 – 2014 juga menaja kegiatan *Mangrove for the Future*, berupa pemulihan 4 hektar kawasan mangrove di Kabupaten Boalemo dan Pohuwato. Kegiatan pemulihan mangrove lainnya dilakukan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2013 seluas 10 hektar. Juga pada 2019 – 2021 bersama KLHK dan BPDASHL Bone Bolango, JAPESDA





Mangrove mati di tambak dalam kawasan CATP - JAPESDA

Misalnya dengan membuat ragam panganan olahan mangrove, seperti stik mangrove menggunakan bahan dari buah mangrove jenis *Avicennia sp* dan *Bruguiera sp* yang banyak ditemui di tempat itu. JAPESDA mendorong pembuatan kelompok beranggotakan perempuan nelayan, untuk mengolah panganan dari tanaman mangrove ini. Setelah kelompok terbentuk, olahan panganan mulai diproduksi kelompok perempuan yang ada di Torosiaje Jaya dan dipasarkan ke desa-desa sekitar bahkan hingga ke Kota Gorontalo.

Melalui pemanfaatan buah mangrove tersebut, JAPESDA berharap akan timbul rasa kepemilikan masyarakat terhadap kawasan mangrove yang ada di desanya. Mulai dari menjaga, melestarikan dan mempertahankan kawasan mangrove yang ada di desa

mereka. Karena olahan panganan yang sedang mereka kerjakan bahan utamanya adalah mangrove, jika mangrove disana mati dan hilang maka bahan baku panganan mereka juga akan hilang.

Bersama Siemenpuu, JAPESDA juga berhasil mendorong wilayah Desa Torosiaje Jaya dimasukkan kedalam Kawasan Ekosistem Esensial (KEE), yaitu sebuah kategori kawasan konservasi baru di luar kawasan lindung dan konservasi.

Berbeda dengan Desa Torosiaje Jaya, Desa Siduwonge, Kecamatan Randangan, memiliki bentangan hutan mangrove cukup luas dan pengelolaannya dilindungi undang-undang konservasi. Sebab kawasan seluas 3.174,10 hektar tersebut masuk kategori kawasan

konservasi Cagar Alam Tanjung Panjang (CATP). Sayangnya bentangan hutan mangrove telah hilang, berubah rupa menjadi kawasan tambak yang dikuasi sebagian besar warga pendatang dari Sulawesi Selatan dan sebagian menetap disana.

Di Siduwonge, JAPESDA melakukan penyadartahuan yang berbeda dengan Desa Torosiaje. JAPESDA lebih mendorong penguatan hukum dari pemangku kawasan seperti BKSDA, pemerintah daerah dari tingkat kecamatan hingga desa. Sebab, sekalipun CA adalah hutan konservasi tertinggi dan pengelolaannya dilindungi UU konservasi, tetapi hutan mangrove di sana masih saja dirambah.

Lemahnya pengawasan dan ketidaktahuan dari pemangku kawasan tentang CATP, ikut menyumbang kerusakan dalam kawasan konservasi tersebut. JAPESDA mendorong para pihak pemangku kawasan melalui diskusi-diskusi dan publikasi di media masa. Hingga protes dari JAPESDA telah sampai ke tingkat kementerian dan status kawasan cagar alam tetap dipertahankan setelah sebelumnya dimasukkan ke dalam rencana Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), sebuah program nawacita presiden tentang pelepasan kawasan hutan yang telah di garap oleh masyarakat dengan periode waktu tertentu.#



*Sahabat Masyarakat Pantai  
Kalimantan (SAMPAN)*



*Pak Saparudin petani sekaligus peternak lebah kelulut di  
Desa Nipah Panjang Kec Batu Ampar Kab Kubu Raya Kalbar -  
SAMPAN*

## MELAWAN PERHUTANAN INDUSTRI DENGAN SKEMA PS UNTUK RAKYAT KALIMANTAN DAN HUTAN

*Oleh: Renal Husa*



**PERTAMBANGAN DAN PERKEBUNAN INDUSTRI** seperti sawit, memiliki peran besar terhadap deforestasi dan konflik tenurial di Kalimantan Barat (Kalbar). Namun ekspansi lahan perkebunan sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat kecil yang berada di dalam dan sekitar wilayah konsesi yang mereka kuasai.

Ruang hidup mereka menyempit dan hilang tergeser produktivitas industri, beberapa diantara mereka dipaksa tunduk melepas tanah garapan yang tidak bersurat. Sementara sebagian lainnya yang pemberang harus menerima kursi pesakitan menanti dakwaan.

Kejadian memilukan ini terjadi pada tahun 2016 silam. PT Sintang Raya, perusahaan sawit berkonflik dengan masyarakat di Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar. Pihak perusahaan melakukan kriminalisasi terhadap 16 warga atas tuduhan penyerobotan lahan di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) yang mereka kuasai. Padahal warga yakin jika tanah yang diklaim itu berada diluar dari tanah HGU milik perusahaan.

Tanpa pemberitahuan dan sosialisasi, PT Sintang Raya secara sepihak merusak perkebunan warga, pohon karet dan tanaman lainnya yang telah mereka tanam dan rawat selama beberapa tahun ditebang habis tanpa sisa sebelum masa panen tiba<sup>2</sup>.

Kehadiran perusahaan industri layaknya sawit, cenderung menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan warga dan lingkungan. Peluang kesejahteraan bagi daerah yang ditempati oleh perusahaan industri dengan tawaran lapangan kerja, dalam penerapannya banyak yang tidak terpenuhi, bahkan terindikasi melanggar hak asasi manusia. Hak-hak buruh yang bekerja di sana bahkan bisa dikatakan jauh dari kata sejahtera seperti harapan yang dijanjikan.

Seperti yang dialami buruh sawit perempuan di Kabupaten Kubu Raya, mereka tidak mendapat cuti

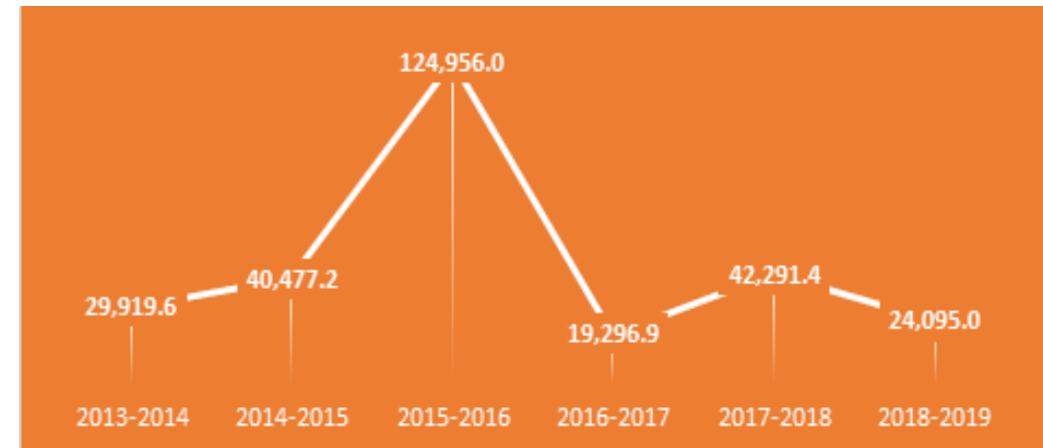
haid dan cuti hamil saat bekerja. Perusahaan tidak melengkapi mereka dengan alat pelindung diri saat menyemprot insektisida di lahan perkebunan sawit hingga membahayakan kesehatan. Ketika sakit, mereka harus mengurus sendiri pembiayaannya, sebab BPJS mereka tidak diaktifkan oleh perusahaan. Bahkan saat ingin membayar biaya pengobatan, mereka tidak memiliki uang yang cukup, karena perusahaan membayar mereka dibawah upah layak<sup>3</sup>.

Mirisnya, pada 2019 Provinsi Kalbar berada di urutan ketiga dengan lahan perkebunan sawit terluas di Indonesia dan di tahun yang sama, angka kemiskinan di Kalbar tertinggi dari provinsi lain yang ada di Pulau Kalimantan<sup>4</sup>.

### Kalimantan dan Hutannya yang 'Menghilang'

Pulau Kalimantan terkenal dengan bentangan hutannya, sebab sebagian besar dari pulau itu ditutupi kawasan hutan dengan luas 40,8 juta hektar. Sementara Indonesia memiliki luasan hutan seluas 129,43 juta hektar<sup>5</sup>. Dengan luasan itu, Pulau Kalimantan memiliki hampir separuh dari luasan hutan yang ada di Indonesia.

Sayangnya, hutan di Kalimantan mulai terdegradasi karena mengalami ledakan pembangunan di sektor perkebunan dan pertambangan. Tanaman sawit mulai mendominasi hampir di setiap wilayah, untuk kepentingan investasi, demi pertumbuhan ekonomi negeri. Namun mengorbankan kelestarian alam, hingga deforestasi lambat laun mulai merubah rupa Pulau Kalimantan.



Total deforestasi dalam kawasan hutan dan bukan hutan Provinsi Kalimantan Barat dalam periode waktu 2013-2019<sup>6</sup>



Dari data Badan Pusat Statistik, peningkatan luasan deforestasi hutan Kalbar terus terjadi dan tertinggi pada periode 2015-2016 mencapai 124.956 hektar. Sementara sebagian besar dari kawasan yang terdeforestasi tersebut dialihkan menjadi kawasan perkebunan untuk industri seperti sawit dan hutan tanaman industri untuk pemenuhan kebutuhan pulp dan kertas.

Buku Statistik Perkebunan tahun 2019 - 2021 yang dipublikasikan Direktorat Jenderal Pertanian pada 2021 memaparkan, Kalbar memiliki luas perkebunan sawit dengan estimasi luasan mencapai 2.070.272 hektar. Terluas dari seluruh provinsi yang ada di Pulau Kalimantan dan berada di urutan kedua dengan luas perkebunan sawit terbesar di Indonesia setelah Provinsi Riau.

Deforestasi yang terjadi di Kalbar juga tidak terlepas dari dukungan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang diterbitkan

dalam undang-undang. Seperti yang terjadi pada 2014, kawasan hutan yang awalnya seluas 9,101 juta hektar yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 259/kpts-II/2000 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat. Kalbar setidaknya telah kehilangan 1,5 juta hektar kawasan hutan yang telah beralih fungsi menjadi kawasan perkebunan dan pertambangan.

Pemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memilih untuk melepas kawasan hutan dengan melakukan penataan ulang batas kawasan hutan. Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Kalimantan tentu berang akan keputusan itu. Mereka menentang rancangan tersebut dengan alasan jika keputusan tersebut diambil maka pemerintah mengabaikan ekspansi pertambangan dan perkebunan sawit ilegal yang ada di kawasan hutan<sup>7</sup>.

Namun rencana tersebut tetap dilakukan oleh pemerintah, puncaknya pada 2014, surat keputusan penataan batas kawasan hutan diterbitkan. Wilayah Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat resmi berubah luasannya menjadi 8.389,60 hektar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 733/ Menhut-II/ 2014 tanggal 2 September. Dengan terbitnya surat keputusan tersebut, Kalbar kehilangan kawasan hutan seluas 712,160 hektar.

### Mandiri di Hutan Sendiri

Direktur eksekutif Sahabat Masyarakat Pantai (SAMPAN) Kalimantan, Fazrin Nailus Subschi, mengatakan jika kehadiran perusahaan industri yang mengelola sumber daya alam dengan skala besar cenderung destruktif dalam pelaksanaannya. “Masyarakat bahkan kehilangan wilayah kerjanya,” katanya.

Hal ini berdampak pada sungai tempat menangkap ikan tercemar, lahan perkebunan garapan masyarakat yang dirampas, hingga merubah pola kerja mereka dengan terpaksa menerima dan bergantung pada lapangan kerja yang ditawarkan perusahaan industri.

Fazrin menekankan jika pengelolaan sumber daya hutan harus melibatkan masyarakat. Misalnya menerapkan skema Perhutanan Sosial (PS) yang telah disediakan oleh pemerintah. Dengan memanfaatkan peluang PS, diharapkan akan memutus konflik dan kriminalisasi dari perusahaan dan pemerintah kepada masyarakat.

Menurut Fazrin, konflik tenurial yang dialami warga tidak hanya datang dari perusahaan industri, beberapa kasus bahkan bersumber dari pemerintah. Contohnya di Desa Dabung, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Warga yang ada di desa itu kehilangan hak akses atas tanah, karena perubahan batas kawasan hutan yang dilakukan pemerintah dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 259/kpts-II/2000.

*Rekayasa sarang lebah madu hutan yang dibuat oleh masyarakat Desa Padang Tikar - SAMPAN*



Dengan terbitnya surat keputusan tersebut, sebagian wilayah Desa Dabung masuk pada kawasan hutan lindung, diantaranya tambak yang dikelola warga dan pemukiman yang mereka tinggali. Hingga membatasi ruang hidup masyarakat yang ada di sana. Penetapan surat keputusan tersebut, juga berakibat terhadap kriminalisasi puluhan warga, hingga mereka ditetapkan sebagai tahanan rumah<sup>8</sup>.

Skema PS sendiri adalah sistem pengelolaan hutan lestari dalam kawasan hutan negara dan dikelola



oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama. Program PS bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya yang diimplementasikan dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan nomor P.83/ MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. “Dengan menerapkan Perhutanan Sosial tentu menjadi solusi agar masyarakat bebas mengelola sumber daya alam dan terhindar dari konflik tenurial,” ujar Fazrin.

### Harapan Baru Dalam Perhutanan Sosial

SAMPAN Kalimantan sendiri adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang didirikan sejak 5 Juni 2009. Dengan visi mewujudkan sistem adil dan berkelanjutan dalam mengelola sumber daya laut, pesisir, pulau-pulau kecil, daerah aliran sungai dan daerah penyangga untuk kemandirian masyarakat, SAMPAN terus bekerja hingga kini.

Melihat latar belakang konflik tenurial yang terjadi, SAMPAN Kalimantan berinisiasi untuk mendorong setiap desa yang berada di dalam dan luar kawasan hutan untuk terlibat langsung dalam pengelolaan hutan dengan memanfaatkan Skema PS untuk kesejahteraannya.

Kegiatan tersebut menjadi bagian program kerja yang didukung Yayasan Siemenpuu dengan fokus utamanya, desa-desa yang memiliki kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Juga desa-desa yang berkonflik dengan perusahaan industri dan pemerintah.

Tujuannya agar masyarakat yang berada pada dua kawasan tersebut, terhindar dari konflik berkepanjangan yang datang dari pemerintah dan perusahaan industri. Selain itu tujuan utama dan paling penting adalah masyarakat terlibat aktif dalam pengelolaan hutan mulai dari menjaga kelestariannya hingga merasakan langsung manfaat hutan untuk penghidupannya.

Tahapan-tahapan yang dilakukan SAMPAN Kalimantan dalam pelaksanaannya melalui proses litigasi, sosialisasi, pemetaan potensi, memfasilitasi penyusunan dokumen verifikasi administrasi dan verifikasi faktual di masing-masing desa yang mereka usulkan untuk mendapatkan izin perhutanan sosial.

Dalam menjalankan kerjanya, SAMPAN Kalimantan memfasilitasi beberapa desa untuk memperoleh Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) dengan melakukan penyadartahuan serta mendorong desa-desa agar memanfaatkan skema PS, melalui forum diskusi terarah dengan pemerintah dan pemangku kawasan hutan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.

Setelah proses tersebut dilakukan serta izin PS didapatkan, dilanjutkan pendampingan pasca izin berupa penyusunan rencana pengelolaan hutan desa yang memenuhi aspek perlindungan kawasan,

rehabilitas, pengembangan usaha, pemanfaatan hutan kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan.

Dalam regulasi tentang PS sendiri, setiap desa yang telah mendapatkan izin PS dengan skema Hutan Desa (HD) diwajibkan untuk membentuk Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). Pembentukan lembaga ini sangat penting untuk pengelolaan HD, karena kehadirannya diibaratkan seperti dinas kehutanan yang ada di desa. Tugasnya untuk menjalankan aspek-aspek dalam pengelolaan hutan desa yang telah mereka rancang sebelumnya.

Untuk memenuhi kesejahteraan warga desa, mereka mendorong pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan jasa lingkungan seperti ekowisata. Dengan memberikan penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha melalui pelatihan-pelatihan pemanfaatan HHBK semisal budidaya lebah hutan, mangrove dan kelulut untuk diambil madunya. “Setelah pengembangan usaha berjalan, kami memfasilitasi KUPS agar mampu menjalankan bisnis dengan HHBK yang mereka miliki,” lanjut Fazrin.

Pada 2014 silam, SAMPAN Kalimantan memfasilitasi 10 desa yang ada di Bentang Pesisir Padang Tikar, Kecamatan Batu Ampar untuk mengusulkan 70.346 hektar skema Hutan Desa (HD) dan 3,800 hektar skema Hutan Kemasyarakatan (HKM) ke KLHK. Setahun berikutnya usulan tersebut diterima dan ditetapkan setelah melalui proses verifikasi dan Bentang Pesisir Padang Tikar adalah penerima PS dengan Hutan Desa terbesar di Indonesia.



Bunga nipah dikerumuni kelulut yang sedang menghisap nektar - SAMPAN

Setelah berjalannya waktu, Provinsi Kalbar pada 2020 mendapat sebanyak 116 izin Hutan Desa dengan total luasan 334 ribu hektar. Kalbar juga memiliki kelompok usaha terbanyak dalam skema HD dengan 235 KUPS dan 105 potensi komoditas usaha non kayu<sup>9</sup>.

Munculnya kesadaran pemerintah dan masyarakat untuk menerapkan skema PS yang ada di Kalbar tentu merupakan perkembangan yang baik. SAMPAN Kalimantan mengharapkan agar masyarakat dapat mempertahankan ekosistem

dan menjalankan ekonomi yang memiliki aspek berkelanjutan. “Karena dengan pengelolaan PS yang dikelola masyarakat menjadikan mereka sebagai ujung tombak untuk menjaga kerusakan hutan dan lahan gambut serta kebakaran hutan yang memperparah keduanya,” ujarnya.#



Jaringan Kerja Penyelamat  
Hutan Riau (Jikalahari)

# JIKALAHARI, KEBISINGAN UNTUK MENYELAMATKAN HUTAN RIAU

Oleh: Okto Yugo Setiyo  
dan Nurul Fitria



“JIKALAHARI ADALAH ANAK KANDUNG REFORMASI yang masih eksis hingga hari ini. Wajar kalau mereka selalu bising memprotes apa yang tidak beres di Riau. Karena memang begitulah mereka seharusnya,” kata Alm Al Azhar, tokoh adat, budayawan, aktivis dan akademisi Riau.

Satu-satunya pohon Sialang tersisa dalam konsesi PT APP di Desa Kesuma, Pangkalan Kuras, Pelalawan, Riau. Kepungan Sialang (pohon hutan alam) seluas 2 hektar telah ditebangi untuk dijadikan tanaman akasia - Jikalahari

## Jikalahari

Al Azhar merupakan Ketua Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau dan sering menjadi tempat Jikalahari berdiskusi menyoal masyarakat adat dan lingkungan di Riau. Setiap menghadiri diskusi yang ditaja Jikalahari, ataupun kegiatan yang dihadiri Jikalahari, kata-kata ini kerap diutarakannya kepada para peserta kegiatan dengan semangat.

“Ungkapannya ini menjadi parameter atas eksistensi dan peran Jikalahari dalam menyelamatkan hutan dan lingkungan di Riau. Kalimat yang tak pernah bisa dilupakan, walaupun beliau telah tiada,” ujar

*Truk yang membawa kayu-kayu hutan alam yang ditebangi dari kawasan hutan di Riau - Jikalahari*

Made Ali, Koordinator Jikalahari. Al Azhar tutup usia pada 12 Oktober 2021 silam.

Eksistensi Jikalahari terus bertahan sejak didirikan pada 26 Februari 2002. Berawal dari keresahan para aktivis lingkungan di Riau melihat kondisi hutan yang kian hari semakin terancam, dibentuklah jaringan yang terdiri dari organisasi pemerhati lingkungan dan kelompok mahasiswa yang peduli akan lingkungan.

Dua dekade berlalu, kerja-kerja Jikalahari masih terus membuat bising dan pusing para pelaku kejahatan lingkungan, korporasi



perusak hutan hingga pemerintah yang mengambil kebijakan yang tidak *pro natura*.

## Munculnya Jikalahari dan Tantangan yang Dihadapi

Berawal dari seminar dan lokakarya yang digagas organisasi lingkungan se Riau di Hotel Dyan Graha selama dua hari pada 25 hingga 26 Februari 2002, kala itu tutupan hutan yang berkurang menjadi topik utama yang dibahas. Hadir 22 organisasi lingkungan dan 7 kelompok Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) dalam diskusi bertajuk *Hutan Riau Kini dan Masa Mendatang* ini. Kondisi hutan yang rusak, meningkatnya deforestasi Riau dari 1999 hingga 2000 mencapai 840 ribu hektar hingga minimnya upaya menyelamatkan hutan alam

## PERSAHABATAN UTARA DAN SELATAN

Riau ini memicu para peserta untuk memikirkan apa upaya yang bisa dilakukan.

“Dulu, organisasi lingkungan di Riau lemah dalam advokasi penyelamatan hutan karena kita kesulitan untuk memperoleh data terkait hutan dan konsesi di Riau. Dari diskusi itu akhirnya kita memikirkan perlu wadah untuk bisa mengatasi hal ini,” jelas Susanto Kurniawan, Koordinator Jikalahari periode 2007 – 2011. Selain sebagai base data, dalam diskusi juga muncul gagasan untuk mensinergikan penyelamatan hutan Riau demi membangun kekuatan yang lebih besar.

Semua sepatutnya dengan usulan ini, dan dibentuklah jaringan sebagai wadah utama yang nanti anggotanya berasal dari lembaga-lembaga yang hadir dalam seminar tersebut.

Nama Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) dipilih sesuai dengan maknanya. Dimana jaringan ini, yang berisi organisasi-organisasi dan mahasiswa yang peduli akan hutan Riau, bersama-sama berupaya untuk menyelamatkan hutan tersisa yang ada di Bumi Lancang Kuning ini. Pada awal berdiri Jikalahari terdiri dari 31 lembaga anggota, seiring berjalannya waktu kini Jikalahari dimotori 19 lembaga yang terdiri dari 13 organisasi lingkungan dan 6 kelompok Mapala.

Jikalahari dalam kerja-kerjanya berupaya untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Hal ini tentunya mengacu kepada kearifan lokal Riau dengan tetap memperhatikan keanekaragaman hayati dan kondisi lingkungan.





Kawasan hutan alam tersisa dalam konsesi PT Selaras Abadi Utama di Kabupaten Pelalawan Riau - Jikalahari



Penutupan sungai alam oleh PT Selaras Abadi Utama untuk sumber air kanal perusahaan. Hal ini berdampak pada pencemaran Sungai Kampar, Riau - Jikalahari

Fokus utama sejak dibentuk hingga kini, Jikalahari berupaya untuk menghentikan konversi dan alih fungsi hutan alam di Riau serta mendorong pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat dengan menjunjung nilai kearifan lokal. Tak hanya itu, advokasi dengan pendekatan perbaikan kebijakan dan transparansi juga dilakukan demi perlindungan dan pengelolaan hutan yang lestari.

“Strateginya selain dengan melakukan advokasi terhadap kebijakan yang ada, Jikalahari juga melakukan pemberdayaan masyarakat serta penguatan informasi dan data terkait lingkungan hidup dan kehutanan di Riau,” ujar Made Ali. Zulfahmi, Koordinator pertama Jikalahari mengingat kembali kondisi kehutanan di Riau saat Jikalahari baru dibentuk. “Saat itu penebangan kayu hutan (*illegal*



*logging* atau disingkat *illog*) sangat massif. Orang-orang diorganisir untuk menebang kayu alam dan dijual ke korporasi-korporasi pulp dan kertas,” kenang Zulfahmi.

Kampanye melawan aktivitas ilegal ini dilakukan. Jikalahari—bersama anggota jaringannya—melakukan pemantauan langsung, melihat kondisi di lapangan bagaimana aktivitas penebangan hutan ini dilakukan, mengumpulkan dokumentasi sebagai bukti dan membuat laporan temuan. Laporan ini dipublikasikan dan diberikan kepada kepolisian untuk ditindak lanjuti.

“Momennya saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Inpres soal pemberantasan *illog*. Ini jadi amunisi kita memerangi perusakan hutan,” ujar Zulfahmi.

Pada 18 Maret 2005, terbit Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Indonesia. Menindaklanjuti kebijakan ini, berbagai Operasi Hutan Lestari (OHL) digelar di Indonesia. “Jikalahari terlibat aktif secara nasional dalam pelaksanaan Inpres ini. Kita menjadi bagian dari Tim Monitoring dan Evaluasi, disana kita memaparkan temuan-temuan kita soal kondisi hutan Riau,” jelas Susanto.

Sebagai satu-satunya perwakilan organisasi lingkungan dari Riau, Jikalahari memaparkan kondisi deforestasi yang terjadi, *illog* dan kejahatan kehutanan yang dilakukan korporasi serta temuan-temuan di lapangan. Hasil yang dipaparkan ini kemudian ditindaklanjuti oleh penegak hukum.





Dokumentasi drone menangkap perbedaan tutupan antara akasia tutupan baru tanam dan akasia yang baru ditebang dalam konsesi HTI - Jikalahari



memberi masukan untuk pemberantasan illog,” kata Zulfahmi, “Saat polisi menemukan 42 truk yang membawa kayu alam ini, mereka menghubungi saya dan bilang ‘Bang Zul, selanjutnya apa yang harus kami lakukan.’”

Hubungan baik ini berjalan dari Jikalahari dipimpin oleh Zulfahmi hingga berganti ke Susanto Kurniawan. Pembagian peran dalam pemberantasan kejahatan kehutanan Riau berjalan dengan baik. Jikalahari memberikan data temuan dari hasil investigasi dan data pendukung yang kemudian ditindaklanjuti dan dilengkapi oleh pihak kepolisian.

Pemberantasan illog yang progresif ini berhasil menjerat 14 perusahaan kehutanan, dimana 7 diantaranya afiliasi dari PT Riau Andalan Pulp and Paper,

anak usaha APRIL Group dan sisanya afiliasi dari PT Indah Kiat Pulp and Paper, anak usaha Sinar Mas/ APP Group. Anak usaha dari grup penghasil kertas terbesar di Indonesia ini ditetapkan menjadi tersangka oleh Sutjiptadi.

“Selama kita mengadvokasi kasus ini, Jikalahari didukung oleh Siempuu dan merupakan keberhasilan besar bagi Jikalahari,” ujar Zulfahmi, “sayang setelah Pak Tjip—sapaan akrab Sutjiptadi—dipindahtugaskan, kasus ini berhenti dan tersangka di SP3 kan.”

### Siempuu dan Pemberantasan Illog di Semenanjung Kampar

Perkenalan Jikalahari dengan Siempuu berawal saat Otto Miettinen—staff dari Siempuu—

Temuan adanya sawit yang ditanam dalam konsesi HTI. Areal ini merupakan areal konflik dan menunjukkan bagaimana perusahaan HTI tidak dapat menyelesaikan konflik di areal konsesinya - Jikalahari



masih seorang mahasiswa. Melakukan penelitian di Indonesia, Otto banyak bertemu dengan opara aktivis organisasi lingkungan. Bekerjasama dengan melibatkan beberapa pengurus organisasi lingkungan sebagai enumerator—petugas lapangan yang melakukan survei—Otto berkenalan dengan Zainuri Hasyim. Saat itu Zain bekerja di Yayasan Riau Mandiri, anggota Jikalahari.

“Saat masih mahasiswa asal Finland, saya bertemu dengan Otto dalam diskusi yang digelar di Rumah Ongah Rab—Tabrani Rab, tokoh masarakat Riau dan juga akademisi— dan bertemu lagi setelah dia bekerja di Siempuu dan saya sudah jadi Koordinator Jikalahari,” kenang Zulfahmi.



Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dalam areal PT Trisetia Usaha Mandiri Desa Bunsur Kecamatan Sungai Apit kabupaten Siak yang merupakan lahan gambut dengan kedalaman sekitar 1-2 meter. Kayu terbakar merupakan kayu hutan alam-Jikalahari

Otto banyak membantu Jikalahari dengan mencari sumber pendanaan untuk kegiatan-kegiatan kampanye penyelamatan hutan Riau. Selain dari Siemenpuu, ia berusaha mengenalkan Jikalahari dengan Lembaga lainnya yang dapat memberikan bantuan pendanaan. “Walaupun awalnya dana yang diberikan Siemenpuu tidak besar, namun dari bantuan itu, Jikalahari dapat melakukan kerja-kerja yang memberikan dampak besar,” ujar Zulfahmi.

Salah satunya, dengan dukungan Siemenpuu Jikalahari dapat ‘melahirkan’ istilah Semenanjung Kampar dan digunakan hingga saat ini. Kerja-kerja penyelamatan hutan tersisa di Semenanjung Kampar dan penyelamatan

gambutnya juga didukung oleh Siemenpuu.

Lokasi yang diberi nama Semenanjung Kampar ini merupakan bentang alam yang menjadi kantung hutan alam tersisa di Riau. Terhampar antara 2 kabupaten, Siak dan Pelalawan, luasan lansekap ini mencapai 681.752 hektar<sup>10</sup>. Sayangnya hutan alam yang ada di kawasan ini adalah yang terluas kala itu, karena hutan alam lainnya banyak sudah ditebang dan dijadikan areal konsesi kehutanan.

Ketika bahaya deforestasi mulai merambat ke kawasan ini, para aktivis lingkungan mulai khawatir. Ancaman semakin banyaknya hutan alam tersisa ditebang sudah



di depan mata, Jikalahari segera merapatkan barisan. Membahas rencana penyelamatan kawasan ini.

“Tahun 2000an, Semenanjung Kampar sudah kehilangan 45,86 persen tegakan hutannya—sekitar 312.668,27 hektar—karena illog dan penerbitan izin konsesi kehutanan,” kata Zulfahmi. Anggota Jikalahari sepakat untuk melakukan intervensi di kawasan ini, mulai dari melakukan investigasi untuk menemukan aktivitas illog dan melaporkannya ke penegak hukum, pendampingan bagi masyarakat disekitar kawasan hutan serta perlindungan terhadap kawasan gambutnya.

“Saat itu kantor Jikalahari masih di Jalan Angsa II, Sukajadi, Pekanbaru.

Kita membahas kampanye seperti apa yang harus kita gunakan untuk penyelamatan hutan di Semenanjung Kampar,” kenang Zulfahmi, “poin yang disepakatai, istilah yang digunakan harus mudah diingat.”

Muncullah usulan Semenanjung Kampar yang terinspirasi dari Semenanjung Malaka. Nama yang mewakili kekhasan melayu—karena Riau merupakan rumpun melayu—dan bentangan alamnya yang khas dan cocok disebut Semenanjung. Sedangkan kata Kampar dipilih karena areal ini berada disekitar Sungai Kampar.

Sempat ada diskusi membahas apakah Semenanjung Kampar atau Semenanjung Kampar Siak. Sebab selain berada di sekitar Sungai Kampar, areal ini juga membentang di sekitar Sungai Siak. Adapula usulan Semenanjung Pelalawan, karena sebagian besar wilayahnya berada di Kabupaten Pelalawan. “Akhirnya ditetapkan Semenanjung Kampar karena paling mudah diingat,” kata Zulfahmi.

Penamaan Semenanjung Kampar di respon baik bahkan hingga kini digunakan oleh pemerintah untuk merujuk bentang alam ini. Bahkan APRIL Group juga membuat konsep perlindungan terhadap hutan alam di Semenanjung Kampar dengan memberi batas berupa belt atau sabuk dengan menanam akasia, istilahnya Ring Kampar. Namun nyatanya APRIL Group tetap melakukan penebangan hutan alam di areal tersebut.

“Jikalahari patut bangga karena Semenanjung Kampar adalah nama yang kita berikan saat itu. Ini menjadi bahasa perlawanan kita terhadap perusakan hutan yang

terjadi,” kata Zulfahmi, “dan ada dukungan dari Siemenpuu disana.”

Perlawanan terhadap perusakan hutan di Semenanjung Kampar tidaklah mudah. Penegakan hukum saat itu masih ‘melempem’ sehingga illog terus merajalela. Saat Kapolda Riau diganti dari Irjen Pol Ito Sumardi ke Brigjen Pol Sutjiptadi, titik terang pemberantasan perusakan hutan muncul. Komitmennya menyatakan perang dengan melawan pembalakan hutan dan

pemberantasan illog menjadi harapan bagi aktivis lingkungan Riau.

“Waktu itu Pak Tjip bilang, kalian lapor, langsung kami proses. Ini kita coba buktikan. Langsung kita kirim laporan temuan investigasi Jikalahari dan Walhi Riau,” kenang Zulfahmi.

Jikalahari dan Walhi Riau melaporkan 39 korporasi HTI pelaku illog dan kejahatan lingkungan hidup ke Polda Riau.

*Karhutla dalam areal PT Trisetya Usaha Mandiri Desa Bunsur Kecamatan Sungai Apit, Siak yang merupakan lahan gambut. Kayu terbakar merupakan kayu hutan alam - Jikalahari*



Laporan ini berdasarkan temuan investigasi lapangan. Membuktikan ucapannya, Polda Riau sepanjang 2007-2008 berhasil menyita barang bukti berupa 5.115.612 meter kubik kayu gelondongan, 351.159 batang kayu olahan, 9.403 lembar kayu gergajian, 17.584 keping kayu dan 369 ton kayu.

Alat-alat untuk melakukan kejahatan ini turut disita seperti, 3 unit tugboat, 3 unit tongkang, 48 unit kapal, 59 perahu klotok, 2 unit



speedboat, 185 unit truk, 23 unit sepeda motor, 175 unit alat berat, 137 unit mesin dan 10100 lebih gergaji mesin.

Pencapaian ini merupakan terobosan yang membawa dampak baik untuk perlindungan hutan alam Riau. “Bahkan saat itu mobil pengangkut kayu yang sudah punya izin kayunya juga takut untuk jalan. Takut ditangkap polisi,” kata Zulfahmi.

Namun aksi berani Polda Riau ini juga memicu kemarahan oknum-oknum perusak hutan. “Kantor Jikalahari pernah didatangi pekerja sawmill diangkut dengan 1 truk. Ramai sekali, waktu itu saya cuma sendirian di kantor. Mereka semua mengamuk,” kenang Zulfahmi.

Karena hubungan baik antara Jikalahari dan Polda Riau, Zulfahmi menghubungi Sutjiptadi untuk meminta bantuan. Beberapa anggota Polda Riau yang berada di sekitar kantor Jikalahari langsung bergerak membantu mengamankan situasi.

Kala itu ada kode khusus bagi para aktivis lingkungan yang sering berdiskusi dan memberi masukan terkait penanganan kejahatan lingkungan di Riau dengan Sutjiptadi. Ini semacam kode sandi, biasanya digunakan sebelum memulai percakapan yang menandakan ada keputusan cepat yang harus diambil. “Kodenya merah putih, usai ucapkan kode, kita langsung sampaikan apa yang terjadi. Entah ada temuan lapangan, atau kondisi mendesak seperti kita mendapat ancaman,” ujar Zulfahmi.



Alat berat beroperasi di tengah-tengah bukaan lahan yang berada di kawasan gambut dalam konsesi PT RAPP Sektor Pelalawan – Siak di Desa Dayun – Jikalahari

Pembukaan lahan baru dan pembuatan kanal baru dilahan gambut oleh PT Suntara Gajapati di Dumai. Berdasarkan peta BRG areal ini berada pada prioritas lindung Gambut berkanal - Jikalahari

### Perebutan Ruang dan Penyelamatan Hutan di Semenanjung Kampar

Gerak cepat Sutjiptadi benar-benar menjadi capaian terbaik dalam upaya penyelamatan hutan Riau. Kolaborasi aktif dan saling melengkapi antara penegak hukum dan aktifis lingkungan menjadi lampu hijau untuk ‘kedamaian’ hutan alam tersisa di Riau. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Widodo A.S selaku Koordinator Penanggulangan Pembalakan Ilegal untuk mengumumkan 14 tersangka



perusahaan HTI yang melakukan perusakan lingkungan dan segera diproses Polda Riau.

Perusahaan-perusahaan ini adalah anak usaha dari APRIL dan APP Group yang tersebar di Pelalawan dan Siak. Untuk perusahaan yang berafiliasi dengan APRIL Group diantaranya, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Mitra Kembang Selaras, PT Madukoro, PT Citra Sumber Sejahtera, PT Bukit Betabuh Sei Indah, PT Nusa Prima Manunggal dan PT Anugerah Bumi Sejahtera.

Sedangkan perusahaan yang berafiliasi dengan APP Group yaitu, PT Inhil Hutan Pratama, PT Ruas Utama Jaya, PT Arara Abadi, PT Suntara Gajah Pati, PT Bina Duta Laksana, PT Rimba Mandau Lestari dan PT. Wana Rokan Bonai Perkasa.

Polda Riau bergerak cepat, sejak September 2007 berkas 14 perusahaan ini dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejari) Riau. Walau sempat bolak balik antara Polda Riau dan Kejati, pelengkapan bukti terus dilakukan.

Tak hanya penegakan hukum di tingkat kepolisian, Sutjiptadi pada April 2008 turut melaporkan 14 perusahaan ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dugaannya, ada tindak pidana korupsi dalam pemberian izin kepada perusahaan ini, indikasinya suap demi memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHKHT) dan persetujuan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Artinya, perusahaan melakukan korupsi untuk memperoleh izin untuk ‘melegalkan’ upaya perusakan hutan alam di Riau.

“Saat itu Pak Tjip membahas dokumen laporan ke KPK ini bersama Jikalahari hingga tengah malam. Melengkapi seluruh bukti-bukti dan temuan hingga diserahkan langsung ke KPK,” jelas Susanto, “bahkan beberapa kali saya diundang KPK untuk ekspos soal laporan ini sembari memaparkan temuan-temuan kita.”

Komisi anti rasuah sigap memproses kasus ini, 3 dari 14 korporasi yang dilaporkan masuk proses penyelidikan diantaranya PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Madukoro dan PT Rimba Mandau Lestari. Tak hanya perusahaan, KPK mengembangkan kasus ini dan akhirnya menguak kasus korupsi perizinan yang lebih besar melibatkan 20 korporasi HTI, Gubernur Riau, Bupati Siak dan Pelalawan serta 3 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau.

Para pembuat kebijakan ini sudah divonis hukum pidana penjara dan denda, dimulai dari T Azmun Jaafar, mantan Bupati Pelalawan divonis 11 tahun penjara karena merugikan negara dari tindakan korupsi penerbitan izin sebesar



“Ini seperti petir di siang bolong. Berbagai upaya yang kita lakukan bahkan bukti-bukti yang dikumpulkan Sutjiptasi jelas terpampang di depan mata seperti tak ada artinya,” ujar Susanto Kurniawan, “tapi kita tahu ada kedekatan antara Hadiatmoko dengan perusahaan karena mereka main golf bersama.”

Seperti peribahasa, patah satu tumbuh seribu, Jikalahari tak mati akal. Walau dari aspek penegakan hukum, upaya penyelamatan Semenanjung Kampar ‘mandek’, Jikalahari bersama anggota terus mencari cara untuk meyelamatkan hutan tersisa di Semenanjung Kampar. Salah satunya dengan memperjuangkan ruang kelola kawasan hutan oleh masyarakat.

Pendekatan ini memanfaatkan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang No



*Hutan alam tersisa di HKM Koto Intuok, Desa Pulau Padang, Kuantan Singingi seluas 1.565 hektar yang terancam ditebang untuk dijadikan tanaman akasia - Jikalahari.*

23 Tahun 2004 rentang Pemerintah Daerah. Daerah diberi kewenangan sendiri untuk mengelola dan mengatur kawasan hutan. Gubernur dan Bupati memiliki kewenangan untuk menentukan pengelolaan kawasan hutan di daerahnya untuk dapat dikelola perusahaan atau masyarakat.

Jikalahari melalui anggotanya, Yayasan Mitra Insani mengintervensi beberapa desa di Semenanjung Kampar untuk diajukan sebagai Hutan Desa. Melalui proses yang panjang akhirnya pada 8 Maret 2013 Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menerbitkan SK Penetapan Areal Kerja (PAK) HD Segamai – Serapung. Zulkifli menyerahkan langsung SK PAK HD Segamai dengan nomor SK 154/Menhut-II/2013 dengan luas 2.270 hektar dan SK PAK HD Serapung nomor SK155/Menhut-II/2013 dengan luas 1.956 hektar.

Namun perjalanan pengusulan HD ini sangat berliku. Segamai dan Serapung adalah secuil keberhasilan dari sebagian besar upaya pengusulan ruang kelola masyarakat yang didorong Jikalahari bersama anggotanya. Banyak usulan HD yang ditolak oleh Bupati, salah satunya HD di Pulau Muda da Kelurahan Teluk Meranti. Bupati Pelalawan, kala itu H M Harris menolak usulan HD dengan berbagai alasan.

Namun saat PT. Gemilang Citra Nusantara, anak perusahaan PT RAPP di Kabupaten Pelalawan mengajukan IUPHHK-RE seluas 19.674 ha, Bupati Pelalawan secepat kilat memberikan rekomendasi. Tak perlu menunggu lama, meski aturan dilabrak.

Dalam catatan Jikalahari yang diolah dari data Kemenhut RI, dari 1,25 Juta hektar hutan yang dicadangkan hanya 0,99 persen (12.000 ha) diberikan khusus untuk rakyat. “Dari 12 ribu hektar yang dicadangkan untuk rakyat, 70 persen luasan kawasan telah dirampok untuk kepentingan industri kertas dan perkebunan Kayu,” kata Muslim, Koordinator Jikalahari periode 2011–2015, “Ini mengindikasikan modus kejahatan korporasi kehutanan masih berjalan hingga detik ini, pemerintah tidak lagi berpihak pada masyarakat sekitar hutan untuk mengelola hak hutannya.”

Tahun berganti, kebijakan-kebijakan yang berpihak pada ruang kelola masyarakat diterbitkan, salah satunya Peraturan Menteri LHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Berbagai skema pemanfaatan hutan diberikan, mulai dari hutan desa, hutan adat, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan.

Perluasan ruang kelola kawasan hutan bagi masyarakat ini merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kondisi hutan Riau. Pengelolaan yang lestari dan berkelanjutan menjadi kunci dalam kegiatannya. Sehingga tak hanya untuk menjaga hutan, ini juga dapat menjadi peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. #



*Wahana Lingkungan Hidup  
Indonesia - Riau  
(WALHI Riau)*

# BANTUAN KEMANUSIAAN UNTUK ACEH DARI RIAU

Oleh: Nurul Fitria



**MINGGU PAGI DIHARI KE DUA PULUH ENAM** di Desember 2004 lalu menjadi hari yang takkan pernah bisa dilupakan oleh masyarakat Aceh. Saat mereka hendak memulai aktivitas di akhir pekan itu, guncangan besar melanda tanah Serambi Mekah.

Tanah tempat berpijak bergetar hebat. Seluruh masyarakat menghentikan aktivitasnya bahkan yang tengah berjalan kaki ataupun berkendara turut berhenti terdiam. Efek pusing karena gempa yang terjadi menghantam setiap orang.



Kondisi Aceh pasca dilanda tsunami pada 24 Desember 2004  
silam - Kompas.com



Warga Aceh korban tsunami di tengah reruntuhan puing-puing - TribunNews.com



Pagi itu, pukul 07.58 Waktu Indonesia Barat, gempa berkekuatan 9,1 hingga 9,3 skala richter mengguncang beberapa negara di sekitar Samudera Hindia. Berpusat di Aceh, gempa ini memicu gelombang tsunami dengan ketinggian mencapai 30 meter.

Gempa dan tsunami ini juga melanda beberapa negara selain Indonesia, diantaranya Sri Lanka, India, Thailand, Somalia, Myanmar, Maladewa, Malaysia, Tanzania, Seychelles, Bangladesh, Afrika Selatan, Yaman, Kenya hingga Madagaskar. Dampak terparah dari gempa dan tsunami ini terjadi di Indonesia, Sri Lanka, India dan Thailand.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban dari bencana di Aceh ini mencapai 220 ribu jiwa—total korban jiwa meninggal dari seluruh negara terdampak mencapai 280 ribu jiwa— dan 6.245 orang di Aceh dinyatakan hilang. Masyarakat di pesisir Aceh juga kehilangan

tempat tinggal karena disapu tsunami.

Dampak terparah dari gempa dan tsunami ini terjadi di Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Jaya dan beberapa daerah dibagian Timur Aceh seperti Pidie, Bireuen dan Lhokseumawe.

Bencana ini ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bencana kemanusiaan mematikan sepanjang sejarah. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan 3 hari sebagai masa berkabung.

### Dari Riau untuk Aceh Karena Siemenpuu

Dua hari pasca terjadinya gempa dan tsunami, Rully Sumanda sibuk mencari tiket pesawat untuk penerbangannya menuju Aceh. Rully merupakan pemimpin lembaga non pemerintah, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang bergerak di bidang advokasi lingkungan hidup di Riau. Berdiri

pada Februari 2003, organisasi ini dibentuk atas Prakarsa 8 organisasi daerah. Memiliki tujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atas sumber-sumber kehidupan yang dikelola secara adil dan lestari, Walhi Riau berperan dalam mendorong transformasi social dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA.

Rully berasal dari Banda Aceh, mendengar bencana yang melanda kampung halamannya ini, ia bergegas melakukan perjalanan menuju Aceh. Tiket dari Pekanbaru menuju Aceh saat itu kosong, tujuan terdekat adalah Medan. Setibanya di Medan, ia berencana menggunakan transportasi darat menuju Aceh.

Rute yang ia tempuh saat itu dari Pekanbaru, transit di Jakarta lalu bergerak ke Medan. Sayangnya pesawat saat tiba di sekitar Medan tidak dapat mendarat. Tengah hari itu pesawat kembali ke Jakarta dan ia harus menunggu dari pukul 2 siang hingga 2 dini hari. “Pukul 2 malam itu pesawat membawa kami ke Pekanbaru dulu, tiba pukul 4 pagi dan diinapkan di hotel dan siang harinya langsung menuju Medan,” kenang Rully.

Tiba di Medan, Rully bergerak via darat ke Aceh. Bergabung dengan relawan dari Walhi Nasional, Rully segera mengidentifikasi kondisi shelter—tempat berlindung bagi korban bencana yang dibangun darurat—di Banda Aceh dan mendata apa yang dibutuhkan para korban.

Sekitar 3 hari Rully sibuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan sembari mengurus keluarganya di Banda Aceh. “Saat itu Walhi Aceh kolaps, yang selamat itu

adalah Forum LSM Aceh. Jadi semua relawan berkumpul disana, dijadikan posko bersama.”

Disela kegiatannya mengidentifikasi kondisi di tiap shelter, Otto Miettinen—staff dari Siemenpuu—menghubunginya dan menanyakan apa yang bisa dibantu oleh Siemenpuu. Walhi Riau pada saat itu memang tidak ada kegiatan bersama Siemenpuu, namun sebelum di Walhi, Rully sudah sering beraktifitas bersama Siemenpuu melalui lembaga asalnya—Kaliptra Andalas, Lembaga swadaya masyarakat fokus pada isu lingkungan di Riau— dalam kampanye terkait aktifitas kayu illegal yang masuk ke Norwegia. “Otto langsung bilang untuk buat proposal kegiatannya, sehingga bantuan bisa segera dikirim.”

Di hari ketujuh pasca tsunami, Rully kembali ke Riau. “Setelah saya jelaskan kondisi di lapangan, teman-teman di kantor banyak yang ingin ikut. Tapi saya tekankan, jika mau membantu, kalian harus punya kemampuan yang dibutuhkan, sehingga tidak membebani. Karena kondisinya sangat sibuk,” kenang Rully.

Pasca diskusi bersama tim di Walhi Riau, malam itu juga Rully segera membuat proposal yang diminta oleh Otto untuk segera diproses oleh Siemenpuu. Hasil dari identifikasinya selama 4 hari di Banda Aceh, Rully berpikir bantuan-bantuan yang luput dari perhatian banyak orang adalah penyediaan bumbu-bumbu dapur—karena banyak yang memberikan bantuan mi instan— untuk masakan, pampers untuk anak-anak hingga pakaian dalam. “Pakaian layak pakai sangat banyak saat itu, namun tidak ada yang

menyumbangkan pakaian dalam, karena tidak etiskan. Maka kita sediakan yang baru untuk dibagikan ketiap shelter,” jelas Rully.

Selain penyediaan bantuan, Rully juga merencanakan untuk menyediakan genset sebagai sumber daya listrik dan membangun sumur bor di beberapa shelter. Pasokan air bersih saat itu sulit di dapatkan, sehingga pembangunan sumur bor ini dirasa sangat tepat. Selain itu kegiatan lainnya yang terpikirkan adalah melakukan kajian kondisi air tanah pasca tsunami. “Besi-besi, reruntuhan bangunan dan mayat-mayat sangat banyak. Kondisi luluh lantak, dan saat itu yang saya pikirkan bagaimana kondisi cadangan air tanah disana.”

Proposal diajukan ke Otto malam itu juga dan tinggal menunggu kabar selanjutnya dari Siemenpuu. Namun tim Walhi Riau tetap bergerak keesokan paginya, “Karena dari awal kita memang sudah berencana untuk membantu, walau pendanaan dari Siemenpuu belum turun, kita tetap bergetak.” Dua mobil—minibus dan pick up—bergerak dari Pekanbaru menuju Aceh membawa 12

orang tim yang akan membantu. Setibanya di Banda Aceh, tim Walhi Riau berkumpul di Forum LSM Aceh. Karena banyaknya relawan yang berkumpul disana, Rully berinisiatif untuk mengajak tim membersihkan rumahnya untuk dijadikan posko tim Walhi. Setelah membersihkan rumahnya, tim Walhi Riau segera bergerak merealisasikan rencana kegiatan.

### Sumur Bor, Pakaian Dalam, Bumbu Masakan dan Kajian Cadangan Air

Pasca bantuan dari Siemenpuu diterima, Rully dan tim bergerak mengidentifikasi lokasi pembangunan sumur bor. Dipilih 15 shelter di Banda Aceh yang memang tidak memiliki sumber air bersih.

Pembuatan sumur ini tidak mudah, selain kondisi lapangan yang masih berserakan, reruntuhan bangunan, besi-besi yang berserakan, tenaga ahli untuk pembuatan sumur ini didatangkan jauh-jauh dari Medan. Mempertimbangkan biaya yang besar untuk menyewa alat pembuatan sumur ini, Rully berinisiatif untuk membeli 1 alat

dan tim Walhi bersama-sama belajar dengan tenaga ahli.

Pembangunan sumur bor di 15 shelter sekitar Banda Aceh sangat membantu masyarakat untuk mendapat sumber air bersih. Karena kondisi air yang tergenang di permukaan tanah ataupun cekungan-cekungan tanah sudah sangat tidak baik. Terkontaminasi karat akibat besi-besi yang terendam air, sampah dan reruntuhan bangunan. Penggalan sumur bor ini bahkan mencapai 30 hingga 40 meter untuk benar-benar mendapatkan air yang bersih agar dapat dikonsumsi. Pembangunan sumur bor ini memakan waktu hingga 3 bulan.

Hal ini juga yang dipikirkan Rully untuk dijadikan kajian. Dari hasil identifikasi awalnya saat tiba di Aceh, ini adalah hal penting yang harus dikaji untuk dapat dicarikan solusinya oleh pemerintah daerah Banda Aceh. Rully menunjuk timnya, Susi Anggraini untuk

*Kondisi Banda Aceh dilihat dari atas, tampak seluruh kota dipenuhi lumpur dan reruntuhan- Getty Images/ Ulet Ifansari*

mengkoordinir terkait penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan adalah untuk mengkaji kondisi cadangan air tanah di Banda Aceh. Hal ini untuk mengetahui zat-zat yang mengkontaminasi air sebagai salah satu sumber kehidupan terpenting, terutama kala bencana alam ini terjadi. Sehingga dengan kajian ini dapat diketahui bagaimana kualitas air tanah di Banda Aceh yang terkena dampak tsunami.

Kajian ini juga ditujukan untuk melihat apakah ada kontaminasi dari zat-zat berbahaya atau kontaminasi air laut terhadap sumber air warga. Sebab jika sudah ada kontaminasi terhadap sumber air, maka warga tidak dapat menggunakannya untuk minum ataupun memasak.

Pengambilan *sample* untuk kajian ini dilakukan di 11 titik yang tersebar di Banda Aceh. Setelah itu *sample* di teliti di laboratorium







Reruntuhan berserakan di sekitar Banda Aceh pasca dihantam gelombang besar tsunami- Getty Images/ Ulet Ifansari

Universitas Riau untuk dilihat bagaimana kandungan besi, mangan dan zat-zat lainnya yang dapat mengkontaminasi cekungan air tanah di Banda Aceh. “Hasil penelitian ini kita serahkan sekitar Juni 2005 ke pemerintah daerah Banda Aceh,” ujar Rully.

Kegiatan yang Walhi Riau lakukan di Aceh dengan dukungan dari Siemenpuu ini sangat membantu masyarakat. Menurutnya, bantuan yang diberikan memang tidak terpikirkan oleh yang lain kala itu. “Ya banyak sekali mi instan dan beras yang diberikan saat itu, tapi kita berikan hal lain seperti bumbu dapur dan cabe bubuk,” kata Rully. Saat itu tim Walhi Riau mencari bumbu-bumbu dapur ini hingga ke Bireun dan Pidie.

Begitu pula dengan bantuan pakaian dalam dan popok anak. Dari hasil identifikasinya saat awal tiba di Aceh, memang 2 hal ini luput dari para pemberi bantuan.

“Baju perempuan, laki-laki, anak-anak banyak saat itu. Tapi pakaian dalam dan popok tidak ada, makanya kita sediakan itu.” Walhi Riau juga menyediakan genset 20 ribu watt di beberapa titik untuk dapat digunakan sebagai sumber listrik dan penerangan bagi warga.

Mengingat kembali kegiatan di Banda Aceh kala itu cukup memilukan bagi Rully. “Kondisi disana sangat mencekam, terutama di malam hari,” kenangnya. Saat tiba di Banda Aceh pemandangan yang terlihat hanya tumpukan-tumpukan reruntuhan. Jika sebelumnya di daerah tersebut banyak berdiri bangunan, kini yang tertinggal hanya tiang-tiangnya, ataupun bangunan itu roboh rata dengan tanah.

“Saat itu kita sangat kesulitan untuk mengidentifikasi apa yang dibutuhkan korban,” kata Rully. Shelter akan kosong di pagi hingga



sore hari, karena warga yang selamat akan berpencar mencari sanak keluarga yang hilang. Mereka baru kembali saat hari jelang gelap dan sudah dalam kondisi yang letih. Rully ingat tidak semua orang mau bercerita karena kondisi yang kalut dan mereka sudah lelah ditanyai berbagai hal namun tidak ada hasil yang diperoleh dari diskusi panjang lebar itu.

“Banyak sekali yang datang, menanyakan ini dan itu, tapi

setelah itu hilang. Tidak jelas hasil dari bincang-bincang itu membawa manfaat apa bagi mereka. Akhirnya kita inisiatif, tidak pakai tanya-tanya, langsung datang ke shelter, bawa bantuan, kita berikan, baru setelah itu kita coba ajak cerita,” kata Rully.

Tantangan lainnya yang dihadapi adalah jarak dan jalur transportasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Saat itu jalan-jalan masih dipenuhi reruntuhan dan membuat akses transportasi tidak leluasa. Jalur yang dibersihkan oleh relawan kala itu hanya jalur akses utama untuk menyalurkan bantuan-bantuan. Namun masih banyak puing-puing berserakan dan besi yang berbahaya jika tidak hati-hati saat melangkah.

Untuk membeli kebutuhan, tim Walhi Riau juga harus menempuh perjalanan yang jauh hingga ke kota lainnya yang masih lebih baik kondisinya dibandingkan Banda Aceh. “Ada beberapa tim yang tidak kuat dengan kondisi disana dan akhirnya memilih kembali ke Pekanbaru,” kenang Rully. Namun ini tidak menjadi hambatan dalam berkegiatan di Aceh.

Tsunami Aceh menjadi bencana kemanusiaan terparah sepanjang sejarah kala itu, namun mengetuk hati seluruh dunia untuk turun memberikan bantuan agar negeri Serambi Mekah ini segera pulih, Siemenpuu salah satunya. #



Hutan Kita Institut  
(HaKI)

## MENDORONG PENINGKATAN EKONOMI DAN PEMULIHAN MANGROVE

Oleh: Suryadi



**RUDI HARTONO, PUSING.**  
Tambak udangnya termasuk milik masyarakat lain tengah hancur-hancuran. Pasang besar. Banjir sekitar 50 cm di atas tanggul. Bandeng dan udang lari semua. Musibah itu terjadi sejak Rabu, pekan lalu. Tanggul tenggelam sehari. Jumat, pasang paling besar. Sabtu agak mendingan. Baru mulai surut, Senin 15 November 2021. Tapi air masih masuk meski tidak terlalu dalam.



Aktivitas penanaman mangrove bersama masyarakat di areal pesosor pantai timur Sumatera Selatan, tepatnya di Desa Simpang Tiga Abadi, Kabupaten OKI - HaKI



**Kegiatan penentuan tapal batas untuk pengajuan HKm Simpang Tiga Abadi - HaKI**



Menurut Rudi, tanggul tambak udang masyarakat mulai rendah akibat pasang surut air laut. Dia, pernah minta bantuan ke perusahaan sekitar, melalui kepala desa setempat, agar meminjamkan alat berat buat meninggikan tanggul. Tapi kades bilang, tak bisa, tanpa jelaskan alasannya.

Tahun ini, sudah dua kali tambak udang masyarakat Desa Simpang Tiga Abadi, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, tenggelam oleh air laut. Mei lalu, sudah pernah terjadi. Fenomena ini cukup jarang dan tak pernah berulang dalam satu tahun. Terakhir kali, pasang air laut menyerbu tambak udang masyarakat, tiga tahun lalu.

“Tapi walaupun tenggelam masih tak seberapa. Kalau tahun ini habis semua. Terlalu parah sekali,” kata Rudi. Menurutnya, tak ada solusi selain dengan tanggul untuk membentengi tambak udang yang sudah puluhan tahun jadi sumber pendapatan masyarakat di sana. Caranya, harus dibangun

dengan alat berat, tidak cukup digali dengan manual atau tangan semata.

“Ini karena hilangnya mangrove sebagai ‘tanggul’ yang menahan laju air laut di pesisir pantai timur Sumatera Selatan ini,” ujar Prastio Widodo, Staff Hutan Kita Institut (HaKI).

HaKI melihat persoalan ini dan mendorong masyarakat untuk bergerak bersama memulihkan kondisi pesisir agar masyarakat dapat mengelola areal tersebut secara lestari dan akhirnya memperoleh manfaat ekonomi tanpa mengesampingkan perlindungan ekosistem mangrove di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini.

### **Perhutanan Sosial, Mangrove dan Petambak Udang**

Pada 2017 lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebenarnya telah memberi izin hutan kemasyarakatan

(HKm) seluas 123 ha di Simpang Tiga Abadi. Itu, dikelola oleh 26 kepala keluarga. Namun belum ada kegiatan sama sekali untuk pemulihan hutan mangrove dalam kawasan lindung yang terlanjur diubah jadi tambak udang tersebut.

“HKm Simpang Tiga Abadi itu perhutanan sosial pertama di daerah pesisir pantai timur Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten OKI. Petambak itu sebenarnya pelarian dari Lampung yang pindah dan membuka tambak udang,” kata Prastio.

Sebelum mengenal perhutanan sosial, HaKI menjadikan Simpang Tiga Abadi, wilayah pesisir menghadap Selat Bangka, itu salah satu lokasi rehabilitasi mangrove yang didukung Siemempuu. HaKI, memulainya dengan terlebih dahulu membuka dialog dan berdiskusi bersama tokoh-tokoh masyarakat guna menyatukan persepsi: pentingnya menjaga mangrove. Proses itu lebih kurang tiga bulan, bolak-balik ke lokasi.

Setelah tercapai kesepakatan, mereka melibatkan langsung masyarakat dalam kegiatan itu. Mulai dari pembibitan hingga penanaman. Termasuk anak-anak sekolah juga diikutsertakan. Sampai akhirnya juga didukung oleh pemerintah desa setempat.

Kegiatan itu pun berlanjut pada pengurusan izin perhutanan sosial. Mengingat, banyak tambak udang masyarakat berada dalam hutan lindung. Tiap orang, memiliki lima atau lebih tambak udang berukuran 100x200 meter persegi. HaKI, ingin perekonomian masyarakat sejalan dengan pemulihan hutan mangrove.

Masyarakat pun ingin aktivitas itu diakui pemerintah melalui akses pengelolaan hutan. Kata Boni Bangun, Staf HaKI, pencapaian hak kelola hutan juga sekaligus jadi alat pemberdayaan masyarakat menjaga hutan-hutan mangrove sebagai penyangga daratan.

Sebelumnya, masyarakat selalu membuat tambak baru seiring sedimentasi atau penambahan daratan yang terjadi di wilayah pesisir tersebut. Fenomena itu diikuti pula dengan pertumbuhan mangrove baru secara alami. Masyarakat berkeyakinan, pembuatan tambak masih ditolerir bila berjarak 1 kilometer dari tepi hutan.

“Padahal, tanggul yang mengelilingi tambak mereka justru sering longsor kena terjangan ombak atau air laut yang masuk. Itu karena tak ada hutan mangrove yang membentengi. Tidak hanya keluar, udang dalam tambak pun juga terserang hama ikan kakap,” cerita Boni.

HaKI sudah memetakan zona lindung dan budidaya untuk HKm di Simpang Tiga Abadi. Dari pemetaan itu dirancang sekitar 95 ha diperuntukkan bagi tambak udang dan ikan bandeng, 6 ha untuk tanggul dan zona konservasi di pinggir pantai 22 ha. “Kawasan lindung harus dijaga kestabilannya. Masyarakat diharapkan dapat ‘menyulam’ kembali mangrove yang rusak dan bolong-bolong,” ungkap Boni.

HaKI berharap kawasan lindung itu juga menghasilkan potensi kepiting bakau dan menjadi penambahan ekonomi. “Kalau selama ini kepiting itu jadi hama udang dalam tambak, kini jadi penghasilan

tambahan masyarakat,” tambah Prastio.

Sejauh ini, memang belum nampak bentuk pengelolaan HKm paska izin diberikan. Boni menyebut, sempat hendak dibentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) tapi belum terlaksana. Tapi, HaKI juga mengusulkan pengembangan potensi lain di sekitar areal HKm. Mereka mendorong masyarakat menanam sayur di atas tanggul. Minimal untuk memenuhi kebutuhan sayur-mayur masyarakat setempat.

Boni menyebut, kelompok HKm Simpang Tiga Abadi beberapa kali telah mendapat bantuan dari Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) berupa pakan, jaring dan peralatan untuk budidaya udang. “Kami ingatkan mereka juga, jangan memikirkan keuntungan saja tapi harus terus sosialiasikan pelarangan perambahan hutan mangrove.” Penanaman mangrove di sekitar tambak udang masyarakat itu berdampak sebagai penjaga tanggul dari abrasi dan mengurangi potensi masuknya hama. Mangrove sebagai

benteng, pasang surut air laut tidak mempengaruhi kadar air payau yang masuk ke tambak. “Itulah gunanya ditetapkan zonasi di areal HKm itu. Kita tidak bicara aturan yang membuat masyarakat pusing, tapi langsung menggambarkan manfaat yang bisa didapat masyarakat,” papar Boni.

Masyarakat Simpang Tiga Abadi sudah memiliki tambak udang hampir sejak 50 tahun lalu. Rudi tak bikin sendiri. Melainkan dibeli dari pemilik sebelumnya. Tambak udang itu dibuat dengan menebang hutan-hutan mangrove. Di akhir obrolan, Rudi mulai menyadari pentingnya hutan mangrove untuk melindungi tambak-tambak yang terlanjur dibuka. Meski, tetap harus menjaga ketinggian tanggul minimal satu meter.

Setidaknya, kata Boni, sejak diberikan hak kelola, masyarakat berhenti menebang mangrove untuk buat tambak baru. Di samping mempertahankan tambak-tambak udang yang terlanjur dibuka sebelum dapat HKm, masyarakat mulai peka menjaga pesisir pantai.



Penyiapan bibit mangrove yang akan ditanam bersama masyarakat di pesisir pantai Simpang Tiga Abadi - HaKI

HKm Simpang Tiga Abadi disebut jadi contoh. Sebab, masyarakat desa lain yang memiliki aktivitas dan masalah yang sama juga ingin mendapat hak kelola karena aktivitas mereka yang tak berizin. Komitmennya juga sama: berhenti buka hutan mangrove untuk tambak udang baru dan merehabilitasi yang rusak.

Selain di Simpang Tiga Abadi, HaKI juga merehabilitasi mangrove di Desa Sungai Lumpur. Lokasinya berseberangan. Kegiatan di sini lebih tinggi gejolaknya karena banyak penolakan dan terbentur konflik kesukuan yang belum sepaham tentang penyelamatan mangrove. HaKI, juga menargetkan perhutanan sosial di wilayah berbeda di kecamatan ini. Sungai Lumpur masuk Kecamatan Cengal.

Selain itu juga masih ada konflik areal atau tata batas dengan tuan parit. Dia, yang memilik hak atas pembukaan hutan mangrove untuk tambak udang di sana, karena orang pertama yang buka parit. Masyarakat juga beli tambak ke kepala parit. Bagi kurang mampu harga tambak Rp 1-1,5 juta. Kalau tambak itu lengkap dengan berbagai peralatan dihargai Rp 10 juta. Itu harga yang berlaku pada 1995.

Awal memulai kegiatan di Simpang Tiga Abadi dan Sungai Lumpur, HaKI sebenarnya terlebih dahulu membentuk kelompok kecil. Mereka, berperan melobi kepala parit untuk membuka diri dengan kegiatan pemulihan mangrove. Meski, tidak semua kepala parit setuju. Alhasil tidak semua jalur bisa direhabilitasi.

Sebagian kepala parit yang menolak, menganggap semakin banyak dan tinggi pohon mangrove akan merugikan budidaya udang dalam tambak atau mengurangi hasil panen. Ketakutan yang tak berdasar ini pula yang mempengaruhi sebagian masyarakat menolak pemulihan mangrove di wilayahnya.

Tapi lambat laun, HKm di Simpang Tiga Abadi akhirnya jadi percontohan karena merupakan perhutanan sosial pertama di wilayah tersebut. Meski masih banyak pemilik tambak yang belum bersedia bergabung, perlahan masyarakat mulai sadar dan paham akan legalitas budidaya udang dalam kawasan lindung. Dengan catatan tidak akan membuka tambak baru.

“Kalau seluruh masyarakat Simpang Tiga Abadi dan Sungai Lumpur bersedia mengusulkan perhutanan sosial, luasnya sekitar seribuan hektar sesuai peta indikatif perhutanan sosial,” kata Sigit Widagdo, Staf HaKI. Prastio menambahkan, masyarakat mulai melek bahwa kegiatan mereka bisa dilegalkan dengan perhutanan sosial.

Sejak itu, banyak kelompok masyarakat sipil lainnya yang terlibat dalam kegiatan pemulihan mangrove, termasuk pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan ekonomi. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) pun mulai menapaki pekerjaannya di sana.#





# KAMI BUKAN PAHLAWAN, HANYA BERI PILIHAN SOLUSI UNTUK WARGA

Oleh: Rina Syahputri  
dan Nurul Fitria



**LEBIH DARI LIMABELAS TAHUN** sudah Perkumpulan Elang bersama-sama dengan Siemempuu melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di Riau. “Sudah sejak 2005,” kenang Susanto Kurniawan, Badan Pengurus Perkumpulan Elang.

Perkumpulan Elang awalnya didirikan pada April 2001. Saat dibentuk, kerja-kerja Perkumpulan Elang berkaitan dengan isu sumberdaya air. Bertambahnya usia, Perkumpulan Elang melebarkan sayapnya dan turut

*Hutan rawa gambut Taman Nasional Zamrud di Kabupaten Siak, Riau. Tanggal penetapannya adalah 22 Juli 2016 oleh Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla. Taman Nasional Zamrud merupakan lahan gambut dengan luas 31.480 hektare - Perkumpulan Elang*



*Illegal Logging di Semenanjung Kampar, kayu hutan alam yang ditebangi ini dihanyutkan ke sungai untuk diangkut ke perusahaan penerima kayu ilegal ini - Perkumpulan Elang*



bekerja bersama masyarakat untuk menyebarkan informasi dan membangun kesadaran terkait penyelamatan lingkungan hidup. Bahkan Perkumpulan Elang juga mulai masuk pada kerja-kerja mempengaruhi perubahan kebijakan di tingkat lokal maupun nasional agar peduli pada kondisi lingkungan.

Pada 2002, Perkumpulan Elang salah satu lembaga turut menginisiasi terbentuknya Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau atau disingkat Jikalahari. Langkah ini dianggap sebagai bentuk kerjasama Perkumpulan Elang dalam merealisasikan kerja-kerjanya.

Selain bergabung dengan Jikalahari, Perkumpulan Elang juga turut menginisiasi terbentuknya Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau dan bergabung menjadi anggota dari Sawit Watch Indonesia.

Sejak berdiri, Perkumpulan Elang tetap fokus pada kerja-kerja berkaitan dengan perlindungan sumber ekonomi masyarakat sehingga dapat terbangun kemandirian ekonomi yang bertanggungjawab secara social, budaya dan lingkungan.

Perkumpulan Elang juga mendorong terciptanya kesadaran dan kekuatan masyarakat terhadap akses politik yang berkeadilan. Tak hanya itu, Perkumpulan Elang juga mendorong terjaminnya akses masyarakat terhadap ruang kelola dan akses budaya dala pengelolaan ekosistem Sumatera.

Hingga kini, kerja-kerja Perkumpulan Elang yang didukung Siemenpuu merupakan perwujudan realisasi dari fokus kerjanya, salah satunya mendorong perluasan ruang kelola masyarakat dengan memanfaatkan skema Perhutanan Sosial (PS).

### Siemenpuu, Semenanjung Kampar dan Kerumutan

Hubungan erat dengan Siemenpuu sangat dirasakan oleh Perkumpulan Elang. Saat dukungan Siemenpuu baru masuk di wilayah Riau, perjuangan untuk menyelamatkan hutan alam tersisa di bentang alam Pelalawan, Siak dan Indragiri adalah yang utama. “Desain besarnya saat itu, bersama Jikalahari kita mengadvokasi Semenanjung Kampar. Penamaan istilah lansekap Semenanjung Kampar oleh Jikalahari ini ya karena disupport Siemenpuu sebenarnya,” tutur Susanto Kurniawan.

Ekosistem Semenanjung Kampar merupakan salah satu hamparan hutan rawa gambut terluas yang berada di Provinsi Riau yang memiliki luas wilayah lebih kurang 683.639 hektar. Didominasi 90% tanah gambut, memiliki tiga kubah

gambut besar dan beberapa kubah gambut kecil dengan kedalaman gambut bahkan ada yang mencapai 15 meter.

Izin-izin perusahaan kehutanan, baik itu Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (HTI) ataupun Hak Pengusahaan Hutan (HPH) banyak diterbitkan di lansekap ini. Mayoritas milik perusahaan yang berafiliasi dengan Asia Pulp and Paper (APP) Group milik Eka Tjipta Widjaya atau Asia Pacific Resources International Holdings Ltd (APRIL) Group milik Sukanto Tanoto. Perusahaan-perusahaan ini mengolah kayu-kayu untuk dijadikan bubur kertas, serat dan produk lainnya.

Penyelamatan hutan tersisa di Semenanjung Kampar menjadi prioritas. Berbagai konsep pengelolaan disusun. Pelibatan para pengambil kebijakan kunci dirancang demi penyelamatan hutan alam tersisa. “Konsep ini juga di replikasi Perkumpulan Elang untuk diterapkan di Indragiri Hilir,” jelas Janes Sinaga, Direktur Perkumpulan Elang.

Untuk Indragiri Hilir, Perkumpulan Elang menyusun konsep untuk penyelamatan lansekap Kerumutan, namun karena kompleksitas persoalan hingga tata kelola, Perkumpulan Elang mencoba fokus melaksanakan kegiatan di Desa Simpang Gaung. Kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan peningkatan pengelolaan hutan melalui Hasil Bukan Kayu (HBK) dan mendorong dilakukannya penegakan hukum terhadap kejahatan terkait lingkungan hidup dan kehutanan.

Perkumpulan Elang juga mendorong inisiatif pemanfaatan

sumber daya hutan berbasis masyarakat di hutan rawa gambut Kerumutan.

Sejak 2016 Perkumpulan Elang fokus mendorong perluasan ruang kelola masyarakat melalui skema perhutanan sosial. “Saat itu kita melihat ada peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan areal bekas izin HPH PT Bhara Induk menjadi Hutan Desa karena perusahaan lama tidak beroperasi sehingga rusaknya tata kelola hutan di Kawasan tersebut. maka pada 1 Oktober 2017 Perkumpulan Elang, Jikalahari dan masyarakat mengusulkan untuk pencabutan izin PT Bhara Induk seluas 37.687 ha dan mengajukan usulan Perhutanan Sosial,” kata Jay Jasmi Deputi Perkumpulan Elang.

Perkumpulan Elang mendorong pemanfaatan areal bekas HPH PT Bhara Induk sepenuhnya dikelola

Proses diskusi bersama masyarakat yang didampingi Perkumpulan Elang untuk pengajuan PS - Perkumpulan Elang



masyarakat, karena sempitnya ruang kelola untuk penghidupan mereka. Dengan luasnya areal perizinan PT Bhara Induk—mencapai 48 ribu hektar—jika pengelolaan selanjutnya tetap diserahkan kepada perusahaan lain, tentunya masyarakat Simpang Gaung akan kehilangan kesempatan untuk dapat memperoleh ruang kelolanya.

Tak hanya soal pemanfaatan ruang kelola, Perkumpulan Elang juga mendorong agar pemerintah melakukan *enclave*—mengeluarkan areal tertentu—sebagian areal masyarakat dari izin PT Bhara Induk. Dari hasil pemetaan Perkumpulan Elang, dari luasan 48 ribu hektar izin Bhara Induk, sekitar 10 ribu diantaranya merupakan areal kebun, pemukiman, lading dan fasilitas umum masyarakat.



Perkumpulan Elang gelar workshop bersama Pemda Siak membahas rencana kelola TN Zamrud dan Semenanjung Kampar - Perkumpulan Elang



“Dari kejadian ini bisa kita lihat bagaimana kacau balaunya system pemberian izin dari pemerintah kepada perusahaan yang tidak langsung mengecek lokasi di lapangan. Ruang ini yang kita perjuangkan agar masyarakat tidak kehilangan tanahnya,” jelas Janes.

Berbagai scenario disusun Perkumpulan Elang untuk mewujudkan rencana kegiatan di Simpang Gaung. Bak gayung bersambut, pada medio 2018 Perkumpulan Elang mendapat kabar bahwa izi PT Bhara Induk akan dicabut. “Kesana kemari kami mencari informasi ini, memvalidasi apakah benar atau tidak,” kenang Janes. Akhirnya pada 2019 izin HPH ini resmi dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar.

Sayangnya, kabar baik itu tak hanya didengar oleh Perkumpulan Elang. Masyarakat di sekitar areal HPH Bhara Induk juga tahu terkait pencabutan izin ini dan mulai massif ‘menduduki’ areal tersebut. Kegiatan pembukaan lahan dilakukan untuk alif fungsi tanaman dari kayu menjadi sawit. Bahkan banyak yang membuka lahan dengan cara bakar, sehingga

di areal tersebut banyak terjadi kebakaran.

“Itu jadi tantangan untuk kita. Jika dibiarkan terus menerus, dapat memicu karhutla dan illegal logging,” ujar Janes. Setidaknya tercatat tiga kali konflik manusia dan harimau terjadi di kawasan tersebut yang menewaskan 2 warga dan satu orang kritis sepanjang 2018 hingga 2019.

Melalui perhutanan sosial dengan skema hutan desa, masyarakat berharap dapat meningkatkan kesejahteraannya. Disamping itu, pengelolaan yang akan dilakukan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta meminimalisir perambahan dan ilegal logging.

### Ketergantungan Masyarakat Terhadap Kayu serta Sistem Buka Lahan dengan Bakar

Areal eks HPH Bhara Induk yang luas masih banyak ditutupi hutan, “Ada sekitar 80 persennya masih tutupan hutan,” ungkap Janes. Namun kondisi ini bak dua mata pisau. Disatu sisi memang baik bahwa masih banyak tutupan hutan di kawasan tersebut, namun juga



*Illegal logging yang marak terjadi di Semenanjung Kampar telah mengakibatkan berkurangnya tutupan hutan secara drastis - Perkumpulan Elang*



menjadi persoalan karena besarnya ketergantungan masyarakat untuk pemanfaatan kayu hutan demi kebutuhan mereka.

Simpang Gaung merupakan salah satu desa di Kecamatan gaung Indragiri Hilir. Memiliki luas sekitar 106 ribu hektar, kawasan desa ini berada di ekosistem gambut. Dalam kesehariannya, masyarakat Simpang Gaung banyak berkebun terutama kebun Kelapa. “Disana tidak banyak yang tertarik dengan sawit karena menurut mereka membutuhkan biaya perawatan yang tinggi dan nilai jualnya juga tidak setinggi kelapa,” kata Janes.

Untuk mendukung kegiatan perkebunan kelapa ini, masyarakat banyak membuat parit-parit dengan lebar sekitar 4 hingga 6 meter. Parit ini menjadi jalur transportasi, baik untuk mengalirkan kelapa-kelapa yang telah dipanen ataupun menjadi jalur transportasi

pompong atau sampan warga.

Perkumpulan Elang menemukan ketergantungan masyarakat dengan kayu hutan sangat tinggi di kawasan ini. Terutama untuk pembangunan rumah dan pembuatan sampan, warga masih memerlukan kayu dari hutan. Bagi Perkumpulan Elang, memberikan pilihan untuk menggunakan bahan lain untuk pembuatan rumah juga cukup sulit bagi warga Simpang Gaung.

“Biaya cukup tinggi dan tentu jadi lebih mahal karena akses ke daerah ini cukup sulit. Kembali ke penggunaan kayu atau papan adalah pilihan termudah bagi mereka,” jelas Janes.

Kondisi wilayah Simpang Gaung yang terhubung dengan sungai-sungai ini memang lebih mudah diakses dengan transportasi air. Jika hendak menggunakan kendaraan bermotor, pilihan terbaik adalah menggunakan sepeda motor.

Dilema lainnya karena akses yang sulit ini adalah berkaitan dengan cara pembukaan lahan. Pasca seringnya terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau, kampanye pembukaan lahan tanpa bakar marak disuarakan. “Tapi ini jadi masalah di Simpang Gaung,” ujar Janes.

Solusi untuk membuka lahan tanpa bakar adalah menggunakan alat berat, namun melihat kondisi wilayah Simpang Gaung yang menggunakan transportasi air, tentu mustahil. Janes mengenang saat ia berdiskusi dengan warga terkait cara membuka lahan tanpa membakar, kemudian warga menanyakan kembali, *Kalau kami buka lahan tak boleh membakar, pakai*

*apa kami buka lagi lahan itu?* Saat itu Janes kebingungan memberikan solusi masalah ini.

Tak patah arang, Janes bersama tim Perkumpulan Elang saat itu mencoba mencari cara. Diskusi dilakukan bersama warga. Berkunjung ke rumah Kepala Dusun dan Ketua Rukun Tetangga (RT) mereka lakukan. Menaiki pompong menuju rumah ke rumah selama beberapa hari. Saat itu didapat solusi, mereka akan melakukan pembersihan lahan secara berkelompok. Dibahas secara detail bagaimana system pembukaan lahan, berapa orang dalam 1 kelompok yang akan bekerja, hingga model pengelolaan yang diterapkan.

Bagi Perkumpulan Elang, proses ini penting dilakukan untuk menghindari persoalan lebih besar yang bisa muncul, apalagi berkaitan dengan karhutla. “Kegiatan penyadaran ini penting dan menjadi sangat krusial,” kata Janes.

Berbagai pelatihan dan kegiatan sharing ilmu pengetahuan terkait menjaga hutan kerap dilakukan. Membahas bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang lestari serta pentingnya menjaga ekosistem gambut. “Poin pentingnya adalah bagaimana mereka tahu penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari keringnya gambut hingga munculnya kebakaran, serta pentingnya menjaga hutan yang juga dapat meningkatkan perekonomian warga,” tutur Janes. #





*Yayasan Mitra Insani  
(YMI)*

## **MENYELAMATKAN EKOSISTEM HUTAN RAWA GAMBUT SEMENANJUNG KAMPAR DARI TAPAK**

*Oleh: Herbet dan  
Nurul Fitria*



**KELURAHAN TELUK MERANTI** merupakan daerah yang berada di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampar. Masyarakat sangat bergantung dengan sungai, dan hutan, serta lahan yang merupakan gambut. Di Teluk Meranti banyak ditemukan anak-anak sungai tempat masyarakat mencari ikan diantaranya Sungai Kutub, Serkap, Pebilah, Sangar, Kerumutan, dan Merawang.



*Kegiatan pembangunan sekat kanal di aliran sungai Serkap - YMI*



©FB Rian Anggoro/Greenpeace

Kunjungan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan ke Hutan Desa Segamai pada Tahun 2013 - YMI/ FB Rian Anggoro/ Greenpeace



Di samping sungai, terdapat juga beberapa danau, dan tasik di Kelurahan Teluk Meranti, dan keberadaan perairan ini sangat vital bagi denyut nadi masyarakat, karena hampir semua aktivitas masyarakat pada saat itu mengandalkan sungai.

Teluk Meranti berada di Kabupaten Pelalawan terhampar di kawasan ekosistem hutan rawa gambut yang kaya akan keanekaragaman hayati dan diberi nama Semenanjung Kampar. Bersama Siemempuu, Yayasan Mitra Insani (YMI) melakukan pendampingan dan kegiatan-kegiatan bersama masyarakat untuk menyelamatkan ekosistem ini. “Bagi YMI, Semenanjung Kampar memiliki arti penting dalam upaya penyelamatan ekosistem gambut,” ujar Herbet, Direktur Eksekutif YMI.

Semenanjung Kampar merupakan pondasi kerja-kerja penyelamatan kawasan berbasis masyarakat yang dilakukan YMI. Bersama Siemempuu sejak 2008 YMI banyak melakukan kegiatan di lansekap ini. Kegiatan sekat kanal—parit—pertama di Riau dilakukan di kawasan Semenanjung Kampar. YMI melakukan upaya memulihkan ekosistem gambut yang rusak, salah satunya dengan membuat sekat kanal, upaya yang diinisiasi dengan mengambil pembelajaran dari Wetland Indonesia.

Inisiatif sekat kanal<sup>11</sup> ini dipilih dengan mempertimbangkan kondisi sekitar kawasan Semenanjung Kampar yang banyak terdapat kanal-kanal bekas sarana untuk mengeluarkan kayu *logging*. Kanal - kanal ini sebelumnya dibangun menggunakan alat berat

(Kobelco), dengan lebar 2-3 meter dan kedalaman 1,5 - 2 meter. Pasca operasi penegakan hukum *illegal logging* secara besar-besaran di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2006, kanal-kanal tersebut dibiarkan dan berdampak pada rusaknya kondisi gambut yang berpotensi akan kering. Di samping itu, nelayan di Sungai Serkap mulai mengeluh karena hasil tangkapan ikannya berkurang sejak kanal dibangun.

Melihat kondisi tersebut, YMI bersama masyarakat melakukan penyekatan kanal di sepanjang aliran Sungai Serkap. Sekat kanal yang dibangun kala itu mencapai 20 sekat pada 20 kanal, dan beberapa kanal diantaranya mencapai 8 kilometer. Pembangunan sekat kanal ini memanfaatkan struktur dan model yang biasa digunakan masyarakat untuk menyekat parit di desa mereka. Bahan yang digunakan pun menggunakan kayu-kayu yang terdapat disekitar kanal dan juga terpal.

Sebelum melakukan penyekatan kanal ini, persetujuan dan kesepakatan bersama masyarakat haruslah diperoleh. Diskusi



YMI menemukan adanya spesies ikan endemik di Tasik Sungai Serkap - YMI



bersama kelompok masyarakat, aparat desa hingga pemilik kanal<sup>12</sup> juga dilakukan. Selain untuk memperoleh izin, kesepakatan ini juga diperlukan untuk membangun komitmen bersama menjaga sekat kanal tersebut.

Kanal yang telah disekat juga dimanfaatkan untuk menambah penghasilan masyarakat nelayan sekitar. Benih ikan lokal seperti ikan Selais (*Ompok hypophthalmus*), Baung (*Mystus nemurus*), Patin (*Pangasius sp.*), Tapah (*Wallago*) ditebar di kanal dan dikemudian hari dapat dimanfaatkan masyarakat. Kanal yang disekat ini akhirnya mengatasi persoalan gambut yang kering dan rawan terbakar. Gambut yang disekat lebih basah dan permukaan air di kanal menjadi lebih tinggi.

Dari kegiatan YMI di Kelurahan Teluk Meranti terdapat hal menarik, YMI menemukan adanya spesies ikan endemik di Tasik Sungai Serkap tersebut. Ikan ini biasa disebut masyarakat sebagai ikan merah dan banyak muncul kala sore hari. “Dari hasil riset dan kajian taksonomi, ikan merah termasuk spesies endemik baru

dengan nama latin *Pectenocypris*,” jelas Herbet.

Bermula dari diskusi bersama masyarakat yang kerap melihat ikan unik ini di Tasik Serkap, cerita ini sampai ke jaringan YMI yang merupakan peneliti dari Fakultas Perikanan, Universitas Riau. Riset dilakukan dan ditemukan ikan Merah merupakan spesies yang hanya dapat ditemukan di ekosistem perairan gambut. Ikan jenis ini dapat ditemukan di Riau, khususnya Semenanjung Kampar serta di Jambi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah<sup>13</sup>. “Penelitiannya pada 2013 dan bekerjasama dengan peneliti dari University of Vienna, Austria,” jelas Herbet.

**YMI dan Perjuangan Perluasan Ruang Kelola Rakyat**

Organisasi non pemerintah berbentuk Yayasan ini awalnya dibentuk pada 22 September 1998 di Pekanbaru, Riau. Memiliki fokus kerja untuk memfasilitasi masyarakat memperoleh hak akses legal terhadap sumber daya alam (SDA) di Riau. Hal ini karena dari temuan YMI, terdapat ketimpangan yang besar dalam pengelolaan ruang di Riau antara *private sector* dengan masyarakat.

Karena hal ini, YMI berkegiatan untuk mengedukasi masyarakat untuk dapat berpikir kritis dalam mengelola SDA. Transformasi pengetahuan dan peningkatan kapasitas pun diberikan YMI kepada masyarakat dampingan mereka. “Kami juga membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan,” jelas Herbet, “tentunya ini untuk membangun kerja-kerja

kolaboratif yang juga berdampak positif bagi masyarakat.”

Kerja-kerja YMI memang berkaitan erat dengan masyarakat. Mulai dari memfasilitasi masyarakat memperoleh ruang Kelola atas hutan dengan memanfaatkan skema Perhutanan Sosial (PS), pengelolaan lahan gambut yang ramah lingkungan hingga pengelkoloan ekosistem pesisir yang pro terhadap perlindungan mangrove. penggalan potensi dan inovasi ekonomi kerakyatan pun didorong YMI agar masyarakat dapat menggali potensi dari produk-produk lokal disekitar mereka.

Seperti di Semenanjung Kampar, timpangnya ruang Kelola masyarakat karena masifnya penguasaan lahan oleh korporasi akhirnya meminggirkan masyarakat atas haknya terhadap SDA yang ada. Padahal masyarakat hidup dan bergantung dari hasil hutan. Mereka kerap menggunakan kayu sebagai bahan membuat rumah, mengambil hasil hutan seperti rotan, damar, gaharu bahkan tanaman herbal untuk pengobatan tradisional.

Namun penguasaan lahan oleh korporasi membatasi gerak masyarakat dan akhirnya menimbulkan kerusakan ekosistem yang pada akhirnya berdampak langsung juga kepada masyarakat. “Penolakan-penolakan dari masyarakat terhadap perusahaan ini banyak, mereka berjuang untuk mendapatkan hak mereka untuk Kelola hutan dengan lebih baik,” ujar Herbet.

Kabar baik muncul saat Menhut menerbitkan Peraturan Menhut Nomor 49 tentang Hutan Desa pada 2008. YMI memutuskan untuk



ajukan dua desa dampingannya, Segamai dan Serapung, untuk diajukan sebagai hutan desa (HD).

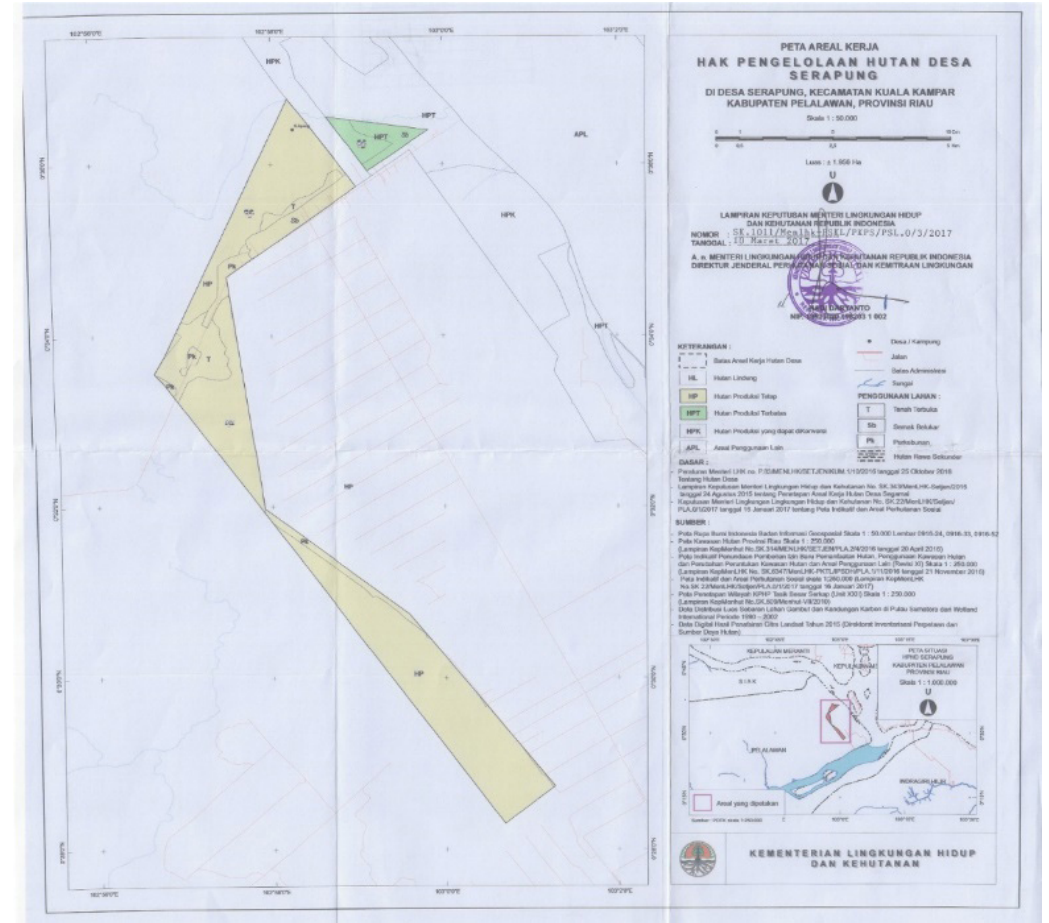
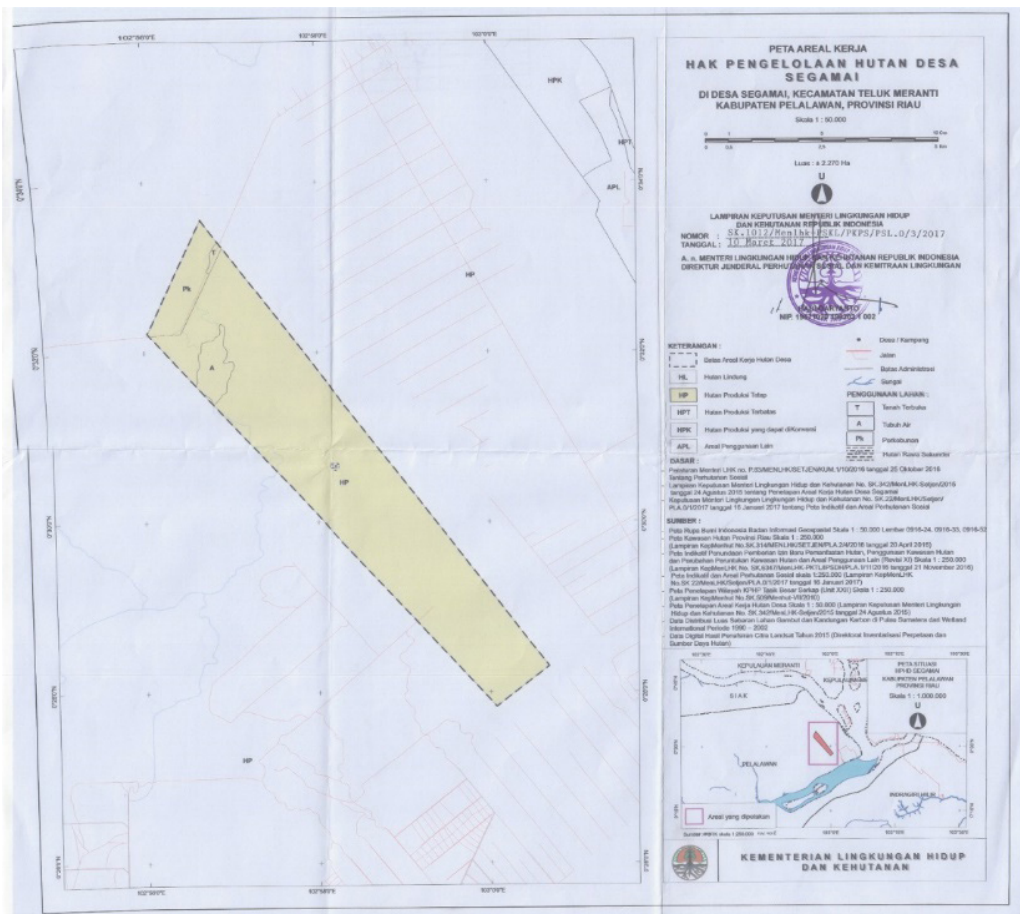
Sebelumnya YMI juga sempat mengajukan desa dampingan lainnya, Desa Teluk Binjai untuk dijadikan HD, sayangnya kawasan yang diusulkan tidak dapat dilanjutkan karena masuk dalam konsesi perusahaan pulp dan kertas PT Riau Andalan Pulp and Paper—anak usaha APRIL Group—berdasarkan SK 327/menhut-II/2009. Perusahaan ini memiliki izin seluas 43 ribu hektar di Blok Semenanjung Kampar yang mencakup Desa Teluk Binjai.



Belajar dari pengusulan Desa Teluk Binjai, YMI melakukan analisis potensi hutan desa yang dapat mereka ajukan. Pertimbangannya, areal bekas perusahaan yang izinnya akan habis masa berlakunya, izinnya dicabut atau mengundurkan diri. Gayung bersambut, ditemukan PT Agam Sempurna pada 2007 menyerahkan hak kelolanya atas areal seluas 18 ribu hektar kepada Menteri Kehutanan. Bergerak cepat, areal ini segera diajukan sebagai calon hutan desa Segamai – Serapung.

Kondisi eksisting areal yang diajukan ini merupakan hutan

Peta areal kerja Hak Pengelolaan Hutan Desa Segamai yang diperoleh dari KLHK.



Peta areal kerja Hak Pengelolaan Hutan Desa Serapung yang diperoleh dari KLHK.



alam bekas tebangan. Kawasanya membentang di 4 desa yaitu Teluk Meranti, Pulau Muda, Segamai dan Serapung. Setelah mempelajari kondisi wilayah dan berdiskusi dengan masyarakat, areal di Segamai dan Serapung dipilih untuk diproses pengajuan usulan HD ke Kemenhut.

Untuk Serapung, luasan yang diajukan sekitar 2000 hektar dan untuk Segamai seluas 7000 hektar. YMI bersama masyarakat Menyusun usulan ini dan menyerahkannya langsung ke Asisten I Bupati Pelalawan dan

Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan pada 22 Desember 2010. Usulan ini tidak dapat segera diproses Bupati Pelalawan kala itu H Rustam Effendy. Ia keberatan berurusan dengan perizinan kehutanan, karena bupati sebelumnya T Azmun Jaafar ditangkap karena kasus korupsi perizinan kehutanan.

Usulan ini masih belum mendapat persetujuan pasca dilangsungkannya pemilihan kepala daerah Pelalawan dan bupati terpilih kala itu, H M Harris. Areal yang diajukan tersebut tidak dapat diproses karena Bupati Pelalawan



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : SK.1011/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2017

TENTANG

PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA KEPADA LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA SERAPUNG SELUAS ± 1.956 (SERIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH ENAM) HEKTAR PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP DAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI DESA SERAPUNG KECAMATAN KUALA KAMPAR KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Nomor 522.12/UM/2011/232 tanggal 13 Juni 2011, Bupati Pelalawan mengajukan usulan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa pada kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas seluas ± 2000 (dua ribu) hektar di Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.343/Menhut-II/2015 tanggal 24 Agustus 2015, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa seluas ± 1.841 (seribu delapan ratus empat puluh satu) hektar pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan seluas ± 115 (seratus lima belas) hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

c. bahwa...

SK pemberian hak kelola hutan desa kepada LPHD Serapung



juga merekomendasikan areal eks PT Agam Sempurna untuk diberikan izinnya kepada PT RAPP.

Kampanye dilakukan secara gencar untuk memberikan izin kepada masyarakat demi menyelamatkan Semenanjung Kampar dari kerusakan. YMI pun terus melakukan diskusi untuk meyakinkan Bupati Pelalawan dapat memberikan rekomendasi untuk usulan HD Segamai – Serapung. Berbuah manis, akhirnya pada 2011 bupati mau mengeluarkan surat rekomendasi.

“Pertimbangannya saat itu, HD Segamai – Serapung menjadi uji coba awal untuk melihat apakah masyarakat dapat mengelola hutan dengan baik,” jelas Herbet.

Pertimbangan Bupati Pelalawan kala itu dikaitkan dengan sejarah maraknya penebangan hutan liar (*illegal logging*) yang banyak terjadi. Anggapan bahwa masyarakat merupakan sumber masalah dan penyebab rusaknya hutan sangat kuat. Usulan HD Segamai pun berkurang luasannya dijadikan 2000 ha sama dengan usulan HD Serapung.

Demi mewujudkan penetapan HD Segamai – Serapung, YMI tak hanya meyakinkan pemerintah tingkat daerah, pertemuan dengan pemerintah pusat, Kementerian Kehutanan pun dilakukan. Pada 18 Maret 2021, diskusi dengan Direktorat BPDAS-PS dan Planologi serta Direktur Jenderal BUK dilakukan. Pada 31 Maret 2011, Dirjen BUK mengeluarkan surat dukungan terhadap usulan HD Segamai – Serapung. Di daerah, pada 7 Juni 2011 Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan pun turut mengeluarkan surat pertimbangan teknis usulan HD ini ke Bupati Pelalawan.

Perjuangan YMI bersama warga akhirnya melahirkan SK Penetapan Areal Kerja (PAK) HD Segamai – Serapung pada 8 Maret 2013. Menteri kehutanan, Zulkifli Hasan kala itu menyerahka langsung SK PAK HD Segamai dengan nomor SK 154/Menhut-II/2013 dengan luas 2.270 hektar dan SK PAK HD Serapung nomor SK155/Menhut-II/2013 dengan luas 1.956 hektar.

Namun, SK PAK ini hanya berlaku selama 2 tahun. YMI dan masyarakat Segamai –

Serapung harus mengurus hak pengelolaan HD yang diterbitkan oleh Gubernur Riau dengan masa berlaku 35 tahun. Proses ini diikuti, mulai dari pengajuan hingga dilakukannya verifikasi lapangan di Segamai dan Serapung pada 19 September 2014. Hasil verifikasi ini dimuat dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan HPHD Serapung Nomor: BA. 187/BPDAS-INR-3/2014; Segamai Nomor: BA. 188/BPDAS-INR-3/2014 per tanggal 22 September 2014.

Namun SK HPHD ini tetap tidak diterbitkan. Kendalanya karena Gubernur Riau saat itu, Arsyadjuliandi Rahman enggan mengeluarkan izin karena takut tersangkut korupsi pasca ditangkapnya Annas Maamun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena suap alih fungsi kawasan hutan di Riau.

Tidak diterbitkannya SK ini menimbulkan kekhawatiran karena kawasan Segamai – Serapung dapat diusulkan oleh siapa saja untuk kepentingan yang berdampak pada kerusakan hutan.

Angin segar berhembus kala Siti Nurbaya terpilih menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Ia membuka ruang partisipasi masyarakat untuk menyampaikan keperluannya via WhatsApp. Masyarakat Segamai – Serapung pun memanfaatkan momen ini menyampaikan permohonan masyarakat untuk menyelamatkan HD Segamai – Serapung.

Siti Nurbaya merespon positif permintaan ini dengan mengirimkan tim dari kementerian untuk bertemu dengan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Segamai dan Serapung.

Hasilnya, Menteri LHK menerbitkan perpanjangan SK PAK Segamai – Serapung selama 2 tahun sembari mengamankan kawasan HD ini sebelum mendapatkan SK HPHD dari Gubernur Riau.

Berjalannya waktu, peluang memperluas ruang Kelola rakyat terhadap hutan ini semakin baik pada 2016. Menteri LHK mengeluarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Berbagai skema pemanfaatan hutan diberikan sehingga tidaknya dalam bentuk HD, masyarakat juga dapat mengajukan usulan berupa hutan adat, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan.

Kesempatan ini tidak dilewatkan YMI. Kegagalan sebelumnya saat mengajukan HD di Teluk Binjau ditebus. Kawasan yang hendak diajukan adalah hutan di Teluk lanus yang berada di Siak dan masih dalam bentangan Semenanjung Kampar seluas 3.400 hektar.

Sebelumnya areal ini sudah diajukan pada 2014, namun tidak mendapatkan respon yang baik dari Bupati Siak kala itu. Akhirnya pada Maret 2017 YMI Kembali ajukan HD Teluk Lanus dan mendapatkan respon baik dari KLHK. Pada Agustus 2017 verifikasi lapangan dilakukan dan pada SK HPHD Teluk Lanus terbit pada Desember dengan luasan 3.580 hektar. #



## Riau Corruption Trial (RCT)/ Senarai



# MENYIARKAN KEJAHATAN LINGKUNGAN DI RIAU LANGSUNG DARI RUANG SIDANG

Oleh: Nurul Fitria



**TIGA HAKIM BERGANTIAN MEMBACAKAN** berkas putusan perkara. Diketahui Bachtiar Sitompul, pembacaan putusan yang berlangsung lebih dari 30 menit itu mencapai klimaksnya. Membacakan vonis yang akan diberikan kepada terdakwa yang duduk di tengah ruang sidang, H M Rusli Zainal, Gubernur Riau kala itu.

Suasana ruang sidang saat pembacaan putusan terhadap terdakwa mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal yang terjerat kasus korupsi perizinan kehutanan Riau serta PON - Senarai



Senarai melakukan pemantauan jalannya persidangan langsung di pengadilan dari sidang dibuka hingga ditutup. Mendokumentasikan suasana sidang, tindakan hakim, jaksa, penasehat hukum hingga terdakwa dan saksi. Semua diabadikan melalui kamera foto dan video.  
- Senarai



“Majelis hakim memutuskan menghukum terdakwa pidana penjara selama 14 tahun dengan denda sebesar Rp 1 miliar,” ucap Bachtiar sembari mengetukkan palu sidangnya 3 kali. Riu mengisi ruang sidang karena para pengunjung—rerata merupakan kerabat Rusli—terkejut dengan putusan tersebut.

“Terima kasih Yang Mulia. Namun saya melihat pengadilan ini sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan ini,



saya sungguh terkejut. Saya merasa didzalimi,” ujar Rusli Zainal saat dimintai tanggapannya terhadap vonis yang diberikan.

Pengunjung ruang sidang Chakra Pengadilan Negeri Pekanbaru hari itu, 12 Maret 2014 langsung

menyahuti ungkapan hati Rusli. Gumamam kekegagalan atas vonis yang berat dijatuhkan kepada Gubernur Riau 2 periode itu. Rusli yang dijuluki Bapak Pembangunan Riau ini menjadi terdakwa kasus korupsi perizinan kehutanan di Riau dan Pekan Olahraga Nasional 2012 dimana Riau menjadi tuan rumah perhelatan akbar nasional ini.

Di sudut-sudut kursi pengunjung, berdesakan dengan wartawan lainnya, dua orang tim Riau Corruption Trial siap siaga menangkap momen tersebut menggunakan kamera

dan perekam video. Menangkap kegundahan Rusli yang dihukum berat, kegelisahan istri terdakwa mendengar suaminya akan dipenjarakan selama 14 tahun serta sibuknya media-media menangkap momen penting.

Dua tim lainnya, satu sibuk mencatat penjelasan hakim di selembar kertas, pena bergerak cepat menuliskan pertimbangan memvonis Rusli bersalah. Sedangkan yang satunya sibuk mengetik di ponsel pintar, menyampaikan secara ringkas pernyataan hakim ke publik luas melalui aplikasi twitter. Sesekali ia berdiri mengambil foto atau merekam video singkat untuk di unggah ke twitter.

Keempat orang yang bertugas kala itu, Yofika Pratiwi yang mencatat jalannya persidangan, Lovina menyebarkan via twitter, Edo mendokumentasikan dengan kamera foto dan Yaya yang merekam video. Keempatnya berpacu dengan wartawan lainnya untuk mengabarkan kasus ini ke khalayak ramai.

Saat sidang di tutup, Rusli berbalik mendekat ke pengunjung dan berpelukan dengan istrinya, Septina Primawati Rusli yang menangis. Yaya mengangkat *handycam* dan berusaha mendapatkan momen tersebut. Terdesak ke dinding ruang sidang karena didorong oleh pengunjung yang ingin bersalaman dengan Rusli serta wartawan yang hendak mengabadikan detik itu untuk dijadikan *headline* berita. Inilah keseharian yang dihadapi tim Riau Corruption Trial saat memantau langsung jalannya persidangan.

## Dari Riau Corruption Trial ke Senarai

Siang hari tanggal 9 Agustus 2011, duduk sebelas orang mengelilingi meja rapat di Kantor Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau—organisasi pemerhati hutan dan lingkungan di Riau—yang biasa disebut Jikalahari. Mereka berasal dari berbagai Lembaga diantaranya perwakilan dari Forum Pers Mahasiswa (Fopersma) Riau, staff Jikalaharis serta aktivis dari Gurindam 12 dan Look Riau, media di Riau.

Berasal dari berbagai latar belakang, namun siang itu mereka mendiskusikan hal yang menjadi perhatian bersama. Akan berlangsungnya sidang kasus korupsi perizinan kehutanan di Riau.

Perubahan nama Riau Corruption Trial menjadi Senarai pada 9 Desember 2019 diisi diskusi mengkritisi status Riau yang masih darurat korupsi - Senarai



Dua hari lagi, akan dilangsungkan sidang perdana kasus korupsi perizinan kehutanan dengan terdakwa Arwin AS, Bupati Siak. Ia melakukan korupsi dengan menerima suap serta menyalahgunakan jabatannya untuk menerbitkan izin kehutanan untuk perusahaan hutan tanaman industri di Kabupaten Siak.

Total ada 5 izin perusahaan yang diterbitkan Arwin kala itu. Kasus Arwin tidak berdiri sendiri, selain Arwin ada pelaku lainnya seperti T Azmun Jaafar—menerbitkan izin 15 perusahaan di Pelalawan—Bupati Pelalawan, Syuhada Tasman, Burhanuddin Husein dan Asral Rachman, Mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau serta Gubernur Riau, Rusli Zainal. Ke enam pejabat ini terlibat dalam kasus korupsi ini.



Sidang perdana yang dipantau Senarai saat baru dibentuk, sidang korupsi perizinan kehutanan dengan terdakwa Arwin AS, mantan Bupati Siak - Senarai



Sidang Azmun dan Asral Rachman berlangsung di Jakarta, sedangkan sidang 4 lainnya berlangsung di Pekanbaru dan dipantau langsung oleh Riau Corruption Trial. Diawali dengan memantau sidang Arwin inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Riau Corruption Trial atau disingkat RCT.

“Dua hari jelang sidang Arwin itu, semua media heboh memberitakan. Selain karena sidang tipikor pertama, ini juga melibatkan bupati dan berkaitan dengan izin kehutanan,” ujar Made Ali, saat itu merupakan Staff Advokasi Jikalahari.

Mengingat kasus korupsi adalah kasus berisiko dan banyak rekam jejak para pelakunya dibebaskan, seluruh yang hadir dalam rapat di Jikalahari sepakat, kasus ini harus diikuti dari awal hingga akhir. “Kita tidak ingin terdakwa kasus korupsi, terutama berkaitan dengan korupsi perizinan kehutanan ini dibebaskan,” jelas Made.



Sepakatlah semua orang bahwa sidang ini akan dipantau, dari pembacaan dakwaan hingga akhir putusan. Karena yang hadir saat itu memiliki kemampuan dalam menulis terutama berita, disepakati bahwa tiap hasil sidang akan dijadikan berita dan disebarluaskan. Namun ide-ide liar diusulkan dalam rapat siang itu.

“Terinspirasi dari Cikeusik Trial, kami sepakat untuk mengadopsi sistem kerja-kerja pemantauan persidangan ini,” jelas Made. Cikeusik Trial merupakan kelompok anak muda yang mendokumentasikan jalannya persidangan terkait kasus pembunuhan terhadap warga Ahmadiyah di Cikeusik, Serang, Banten pada Juli 2011. Tim Cikeusik Trial berbagi peran untuk mendokumentasikan persidangan itu dengan foto, video dan live tweet.





Selain melakukan pemantauan persidangan, aksi untuk mendorong agar hakim dapat menghukum korporasi pelaku kejahatan lingkungan juga dilakukan bersama jaringan - Senarai

Model ini yang diadopsi untuk diterapkan dalam pemantauan sidang Arwin AS. Dibagilah peran, setiap sidang berlangsung, ada yang bertugas mengambil foto, video, menyiarkan langsung jalannya persidangan melalui twitter dan mencatat informasi persidangan untuk dijadikan rilis berita.

Tiba di pembahasan nama, berbagai usulan nama muncul. Muslim, Koordinator Jikalahari kala itu usulkan Riau Corruption Trial, disingkat RCT. Maknanya sederhana. Mereka akan melakukan pemantauan persidangan kasus korupsi di Riau. "Tapi waktu itu kita pikir, kecil

sekali scoopnya jika hanya kasus korupsi, jadilah kita sepakat bukan hanya kasus korupsi kehutanan, namun juga kasus-kasus lain berkaitan dengan lingkungan dan masyarakat di Riau.

Dalam kerja-kerjanya, RCT bermodalkan semangat. Saat itu mereka menganggap ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan bekerja secara sukarela. Untuk konsumsi selama pemantauan persidangan, RCT dibantu oleh Jikalahari. Saat itu Jikalahari mencoba mencari dukungan untuk kegiatan ini dan Siempuu bersedia membantu. Selama 19 kali sidang Arwin AS,



RCT terus hadir dari awal dibuka sidang hingga ditutup. Tak habis di memantau sidang, RCT juga melakukan bedah kasus dengan menganalisis fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, dakwaan hingga tuntutan. Bedah kasus ini disebut bentangan. Dilakukan jelang agenda tuntutan atau setelah tuntutan berlangsung. Bentangan ini memuat analisis dari tim RCT terhadap kasus dan diakhir memberikan rekomendasi agar hakim memutuskan perkara tersebut.

Banyak sidang yang RCT pantau didukung oleh Siempuu. Diantaranya kasus kebakaran

hutan dan lahan yang melibatkan korporasi di Riau seperti PT Adei Plantation and Industry di Pelawan, PT Palm Lestari Makmur di Indragiri Hulu, PT Wana Subur Sawit Indah di Siak, PT Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir dan masih banyak kasus karhutla lainnya yang didukung Siempuu dapat RCT pantau dan kabarkan ke khalayak ramai.

Tak hanya kasus kebakaran, kasus kriminalisasi masyarakat adat, konflik satwa dan manusia, gugatan warga terhadap pemerintah terkait kondisi lingkungan turut RCT pantau. Bentangan yang dibuat juga memberikan dampak yang signifikan terhadap putusan yang diberikan oleh majelis hakim. "Bahkan dalam proses sidang berlangsung, saat di Pengadilan Negeri (PN) Rengat majelis hakimnya berkata kalau ada Senarai, kita harus perhatikan betul ini kasusnya," ujar Suryadi mengulang kembali perkataan hakim saat itu.

Senarai menjadi nama baru RCT sejak 2017. Setelah 6 tahun berlalu, pada Desember 2017 tepat peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Senarai dipilih sebagai nama baru. Pergantian ini menandakan perjuangan Senarai yang semakin luas. Memantau sidang menjadi salah satu kegiatan diantara kegiatan lainnya seperti kajian dan diskusi berkaitan dengan isu sosial, korupsi, hak asasi manusia, budaya dan ekologis.

"Senarai ini dari Bahasa Melayu yang berarti daftar atau catatan. Artinya Senarai akan mencatat gerakan sosial melawan kejahatan, ketidakadilan sosial dan kerusakan ekologis," jelas Made terkait makna dari Senarai.



Diskusi bentangan kasus membahas temuan menarik selama persidangan dan hasil analisis fakta persidangan juga kerap digelar jelang agenda tuntutan atau putusan - Senarai

### Senarai Keadilan Sosial dan Ekologis

Menegakkan keadilan sosial dan ekologis menjadi tujuan utama Senarai sejak awal berdiri. Intimidasi serta keberpihakan yang mengakibatkan rusaknya ekologi dan mencoreng keadilan menjadi hal yang dilawan oleh Senarai.

Tim Senarai menemui berbagai pengalaman menarik selama proses pemantauan persidangan. Hal utama yang menjadi pemicu adalah bagaimana terdakwa dan pihak pendukungnya tidak menyukai Senarai turut hadir di ruang sidang dari awal hingga akhir persidangan.

“Saat persidangan kasus Burhanuddin Husein, tim ditawari uang agar tidak ikut merekam pada sidang selanjutnya,” ujar Jeffri Novrizal Torade Sianturi, Koordinator Senarai saat ini menceritakan pengalaman-pengalaman tak terlupakan selama ini.

Selain tawaran diberi uang, video-video yang direkam Senarai pernah



Aksi dan menyampaikan persoalan selama persidangan juga kerap dilakukan bersama jaringan ke Pengadilan Tinggi atau ke Penghubung Komisi Yudisial - Senarai



juga ditawari dibeli dengan syarat tidak boleh dipublikasikan lagi di youtube Senarai. Dugaan tim saat itu, karena mereka tidak menginginkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebar luas.

“Karena media jarang yang mau mengikuti sidang dari awal hingga selesai. Bahkan kami akan terus menunggu walau sidang dimulai pukul 10 malam,” kata Jeffri. Hal ini merujuk saat Senarai memantau sidang putusan kasus gugatan perbuatan melawan hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT Merbau Pelalawan Lestari di PN Pekanbaru. “Media kebanyakan meliput hanya disaat penting seperti dakwaan, saksi yang menghadirkan tokoh penting, tuntutan dan putusan.”

Tak hanya menunggu sidang dimulai tengah malam, Senarai juga pernah melaporkan majelis hakim yang dinilai tidak menjalankan kode etik hingga dihukum. Pada Januari 2015, saat Senarai

memantau kasus kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan korporasi PT Nasional Sagu Prima di Pengadilan Negeri Bengkalis. Majelis hakim saat itu adalah Sarah Louis, Melki Salahuddin dan Renny Hidayati dengan penasehat hukumnya merupakan tim dari Otto Cornelis Kaligis.

Selama mengikuti persidangan, tim Senarai menemukan kejanggalan. Mulai dari berpihaknya pertanyaan dari majelis hakim kepada pernyataan-pernyataan kuasa hukum PT NSP hingga memberikan perlakuan istimewa kepada pihak terdakwa. Majelis hakim juga dinilai tidak aktif dalam menggali fakta-fakta persidangan perkara ini.

Senarai melaporkan hal ini karena menilai majelis hakim telah melanggar Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim kepada Penghubung Komisi Yudisial. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya putusan KY menghukum Melki dan Renny tidak mendapatkan bonus selama 6 bulan dan Sarah Louis harus non palu selama 6 bulan.

Selama proses pemantauan, Senarai juga kerap memberikan masukan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui bentangan yang memuat rangkuman fakta persidangan maupun analisis hukum yang disusun. Bentangan ini disambut baik oleh Jaksa. Bahkan dalam beberapa kasus, dalam tuntutannya jaksa melampirkan ucapan terima kasih kepada Senarai yang turut berpartisipasi dalam mengikuti jalannya persidangan, sehingga sidang dapat berjalan dengan baik tanpa bertele-tele. #



Forest Watch Indonesia  
(FWI)

# JANGKAR MANGROVE UNTUK PERLINDUNGAN EKOSISTEM MANGROVE

Oleh: Okto Yugo Setiyo



**SIAPA YANG SUNGGUH-SUNGGUH** melindungi ekosistem mangrove di Indonesia? Pertanyaan ini menjadi hal krusial yang patut didiskusikan oleh para aktivis lingkungan hidup.

*Harapan. Kuncup tanaman mangrove yang tumbuh di tengah ancaman aktivitas tambak udang di Cagar Alam Tanjung Panjang - FWI*



Potret Ekosistem mangrove di Sungai Sembilan, Riau - FWI



Pada awal 2000an, persoalan kehutanan banyak menyita perhatian karena masifnya penebangan kayu liar dan pembukaan hutan untuk dijadikan areal konsesi. Namun ada hal yang terlewatkan, yaitu masifnya penebangan mangrove yang menjadi pagar penting pelindung garis pantai.

Mangrove merupakan ekosistem alami yang berperan penting untuk menahan arus air laut yang dapat mengikis garis pantai dan menyebabkan erosi garis pantai. Mangrove biasa tumbuh di bibir pantai atau kawasan muara dengan struktur tanah rawa ataupun padat. Mangrove biasa tumbuh berkelompok dan dalam jumlah banyak<sup>14</sup>.

Ekosistem mangrove memiliki banyak manfaat. Dari beberapa jenis tumbuhan dalam ekosistem mangrove, baik dari akar hingga buahnya dapat dimanfaatkan dan diolah menjadi berbagai panganan hingga kerajinan. Mangrove juga menjadi habitat bagi ikan dan kepiting untuk berkembang biak dan dapat berperan dalam mitigasi bencana alam dan adaptasi perubahan iklim.

Sayangnya, upaya perlindungan ekosistem mangrove belum mendapatkan perhatian dari banyak pihak. Informasi mengenai penyebaran dan kondisi ekosistem mangrove di Indonesia pun masih minim. “Berapa luasan tutupan tersisa? Kenapa upaya penyelamatan mangrove ini tidak sekencang isu hutan alam?”

pertanyaan dari Soelthon Gussetya Nanggara, Ketua Perkumpulan Forest Watch Indonesia (FWI) membuka diskusi panjang menyoal kerja-kerja FWI yang didukung Siemenpuu.

FWI sendiri lahir berawal dari keresahan beberapa organisasi non pemerintah karena tertutupnya data, informasi serta system tata kelola hutan di Indonesia. Pada 1997 diinisiasilah sebuah program yang disebut Pro-Bela. Program ini bertujuan untuk melakukan pemantauan praktik pengelolaan hutan di Indonesia secara independent. Pemantauan yang dilakukan dengan membentuk sebuah jaringan pemantau independent, jaringan inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya FWI.

Bermula dari jaringan pemantau independent yang hanya berupa program kegiatan beranjak menjadi organisasi dengan bentuk yayasan pada tahun 2000. Dengan pertimbangan dinamika organisasi dan juga kerja-kerjanya sebagai organisasi masyarakat sipil, pada 18 Juli 2014 FWI berubah dari yayasan menjadi perkumpulan agar semakin fokus dalam melakukan kerja-kerja terkait monitoring kondisi hutan dan praktik-praktik ilegal yang terjadi.

Selain itu juga melakukan advokasi dan kampanye mendorong perbaikan tata kelola hutan, pemberdayaan masyarakat untuk pemantauan dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan hingga mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Perkenalan FWI dengan Siemenpuu kala Otto Miettinen—staff dari Siemenpuu— datang ke kantor FWI dan berdiskusi dengan Bob Purba, Direktur Eksekutif FWI

saat itu. Persoalan yang dibahas terkait ekosistem mangrove yang kian tahun semakin terancam. Dari diskusi, satu pertanyaan yang menohok menjadi pemicu dibentuknya koalisi penyelamatan mangrove. “Melihat kondisi ini, apa kita mau tetap diam saja dan menutup mata seolah itu tidak terjadi,” kenang Soelthon mengingat kembali pertanyaan tersebut.

Hasil diskusi ini ditindaklanjuti dengan mengadakan diskusi intens yang akhirnya melahirkan inisiatif dibentuknya Jaringan Kerja Penyelamatan Mangrove disingkat Jangkar Mangrove. Jaringan ini diinisiasi 6 organisasi lingkungan di Indonesia dan dideklarasikan pada 29 Agustus 2016 di Bogor. “Deklarasi ini menjadi semangat baru untuk penyelamatan mangrove di Indonesia dan menjadi wadah untuk menyuarakan isu ini agar dapat menjadi perhatian bagi public dan para pihak,” kata Soelthon.

Inisiator Jangkar Mangrove ini berasal dari 6 daerah berbeda di Indonesia yang miliki kekayaan mangrove di daerahnya masing-masing. Dari Sulawesi Selatan, Blue Forest atau Yayasan Hutan yang kerap melakukan aktifitas rehabilitasi mangrove dengan pendekatan ekologi menjadi inisiator.

Kerja-kerja mereka fokus pada perbaikan tata kelola ekosistem mangrove, peningkatan penghidupan masyarakat di sekitar ekosistem mangrove, perbaikan teknis restorasi-rehabilitasi ekosistem mangrove serta peningkatan kapasitas masyarakat local untuk mengelola ekosistem mangrove.



Aktivitas monitoring ekosistem mangrove di Teluk Balikpapan oleh FPTB -FWI



Inisiator lainnya dari Gorontalo adalah Jaring Penyelamat Sumber Daya Alam atau JAPESDA. Japesda beraktifitas membuat kajian sosial ekonomi masyarakat pesisir mangrove, manajemen kebencanaan masyarakat pesisir serta mendorong kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan.

Dari Kalimantan Timur, Forum Peduli Teluk Balikpapan menjadi inisiator Jangkar Mangrove. Forum ini melakukan kerja-kerja rehabilitasi hutan mangrove, monitoring regular, mendorong inovasi dan implementasi kebijakan pengelolaan mangrove.

Perkumpulan Sahabat Masyarakat Pantai Kalimantan (SAMPAN) dari Kalimantan Barat menjadi inisiator lainnya. SAMPAN banyak melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan

memberdayakan masyarakat untuk mengelola ekosistem mangrove secara lestari dan berkelanjutan.

Riau diwakili Yayasan Mitra Insani (YMI) yang memiliki kerja-kerja berkaitan dengan rehabilitasi mangrove, fasilitasi hak kelola masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat sekitar kawasan hutan mangrove serta pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan ekosistem mangrove.

Sebagai penginisiasi dan penyelenggara diskusi yang melahirkan Jangkar Mangrove, FWI berperan dalam kerja-kerja kampanye dan advokasi penyelamatan mangrove serta menjadi pangkalan data berkaitan dengan mangrove di Indonesia. FWI juga melakukan penguatan kapasitas jaringan kerja dari organisasi masyarakat sipil di Indonesia.

mangrove ke dalam Perda Kaltim Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)<sup>15</sup> dan kebijakan kawasan Ekosistem Esensial<sup>16</sup>.

Tak hanya itu, mempertahankan keanekaragaman hayati, menyelamatkan bentang alam hingga membuka akses kelola dan kepemilikan masyarakat di ekosistem gambut juga menjadi perhatian koalisi ini. “Bersama Siempuu, FWI mencoba memfasilitasi koalisi untuk mendorong praktik pengelolaan yang lestari dan berkelanjutan dengan masyarakat sebagai aktor penting perubahan,” kata Soelthon. #



Jangkar Mangrove didesain untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong perbaikan tata kelola ekosistem mangrove melalui intervensi kebijakan. Hal ini diharapkan dapat menjamin kelestarian mangrove di Indonesia. Jangkar Mangrove juga diharapkan dapat mengintervensi kebijakan sehingga Pemerintah dapat melakukan moratorium konversi ekosistem mangrove di Indonesia.

Dorongan untuk membentuk kawasan konservasi dan ekowisata mangrove juga menjadi rencana yang akan digesa Jangkar Mangrove. Seperti halnya yang dilakukan di Teluk Balikpapan Kalimantan Timur bersama FPTB, yakni mendorong adanya kebijakan perlindungan ekosistem

Bentang alam ekosistem mangrove di Teluk Balikpapan Kalimantan Timur. Peningkatan status perlindungan menjadi sangat penting mengingat perluasan kawasan Industri dan pembangunan IKN baru-baru ini. - FWI





Dugong sedang memakan Lamun, salah satu makanan bagi dugong dan menjadi ekosistem berkembang biak bagi ikan kecil dan udang - KKP

## MENELAAH POTENSI PEMANFAATAN PADANG LAMUN

Oleh: Okto Yugo Setiyo



KERJA KAOEM TELAPAK dengan Siempenpuu berawal pada November 2016 karena diskusi antara Zainuri Hasyim—kalah itu menjadi pengurus Perkumpulan Kaoem Telapak—bersama Otto Miettinen, Toni Haapanen dan Risto Isomaki dari Siempenpuu. Mereka berempat membahas tentang isu ekosistem pesisir yang juga mengalami degradasi karena aktifitas manusia. Saat itu, Siempenpuu sedang merancang cakupan topik baru selain hutan teresterial yang selama ini menjadi fokus kerja-kerja mereka.

“Saat itu Risto menyampaikan, ‘Zen—sapaan akrab Zainuri—bagaimana kalau buat riset tentang status padang lamun di Indonesia?’ , langsung saya setuju kalau Siempenpuu mau mendukung,” kenang Zein.



Padang lamun di pesisir pantai Auki, Biak, Papua. Foto: Ridzki R Sigit/Mongabay Indonesia



Padang Lamun atau tanaman rumput di laut (Seagrass) yang Hidup di Dasar pesisir Laut - Parangtritis Geomaritime Science Park

Hubungan Siemenpuu dan Kaoem Telapak memang baru jika dibandingkan beberapa Non Government Organization (NGO) di Indonesia yang selama ini telah bekerjasama, namun para pengurusnya telah lama bersinergi dengan Siemenpuu. Sebab, banyak anggota Kaoem Telapak merupakan mantan anggota Perkumpulan Telapak yang memutuskan membentuk lembaga baru. Riset padang lamun ini menjadi kerjasama Kaoem Telapak dengan Siemenpuu.

Padang lamun bersama ekosistem mangrove dan terumbu karang merupakan ekosistem penting di pesisir yang memiliki potensi baik ekonomi, sosial dan lingkungan, namun kini semakin terancam. Ekosistem khas laut dangkal ini merupakan bagian perairan laut yang kedalamannya kurang dari 3 meter. Namun beberapa lamun

dapat tumbuh di kedalaman lebih dari 5 meter, bahkan bisa sampai di kedalaman 90 meter. Dengan catatan kondisi lingkungan tempat tumbuhnya lamun mendukung.

Padang lamun berada diantara ekosistem mangrove dan terumbu karang. Disebut padang lamun karena areal ini didominasi tumbuhan lamun— sejenis rumput yang tumbuh di laut dan dapat berbunga— yang beradaptasi dengan air asin dan kerap dijadikan sumber panganan hewan mamalia laut seperti duyung atau dugong.



Di Indonesia, terdapat 12 jenis lamun yang tersebar di hampir seluruh perairan Indonesia dengan luasan mencapai 30 ribu km<sup>2</sup> diantaranya: *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata*, *Cymodocea serrulate*, *Halodule pinnifolia*, *Halodule uninervis*, *Halophila ovalis*, *Halophila minor*, *Halophila spinulosa*, *Halophil decipiens*, *Thalassodendron cyliautum*, *Siringodium isoetitolium*.

“Biasanya lamun di Indonesia berada di ekosistem mangrove dan karang, atau di dekat pantai berpasir dan hutan pantai,” jelas Zen.

Hamparan lamun biasa disebut Komunitas Padang Lamun yang akan membangun ekosistem padang lamun saat areal tersebut menjadi tempat interaksi biota-biota laut di dalamnya. “Dalam suatu ekosistem itu biasanya ada beberapa biota seperti ikan baronang, rajungan dan karang-karang,”

ujar Zen menjelaskan hasil kajian tersebut.

Lamun sangat bermanfaat bagi kelestarian terumbu karang karena dapat menyaring zat-zat halus berbahaya dari daratan menuju terumbu karang. Ia dapat menjadi tempat berkembangbiaknya ikan kecil dan udang serta menjadi penyedia bahan makanan bagi biota laut. Lamun juga menjadi tempat tinggal bagi biota laut bernilai ekonomis seperti ikan baronang, lingkis, berbagai macam kerang, rajungan atau kepiting hingga teripang.

Fungsi lainnya, ia dapat menjadi ‘benteng’ penahan sedimen pesisir agar terhindar dari erosi akibat arus pasang laut. Lamun juga memberikan manfaat bagi manusia karena dapat diolah menjadi panganan bergizi, pupuk ataupun kertas<sup>17</sup>.

“Lamun ini unik, kelestariannya itu dipengaruhi kecerahan, temperature, salinitas, substrat, kecepatan arus dan sedimentasi. Semua ini harus dalam batas wajar agar lamun dapat tumbuh dengan baik.”

Penurunan luas padang lamun sudah terjadi sejak awal abad 20. Sebelum 1940, luas padang lamun di seluruh dunia mengalami penurunan sebesar 0,9% per tahun. Kemudian, laju penurunan meningkat menjadi 7% per tahun pada tahun 1990-an. Menurut Waycott et al. (2009)<sup>18</sup>, sebaran padang lamun global telah hilang sekitar 29% sejak abad ke-19.

Penyebab utama hilangnya padang lamun secara global adalah penurunan kecerahan air, baik karena peningkatan kekeruhan air maupun kenaikan masukan zat hara ke perairan.

Pada daerah sub tropis (*temperate*), kehilangan padang lamun disebabkan oleh alih fungsi wilayah pesisir menjadi kawasan industri, pemampatan (*deposition*) udara, dan banjir dari daratan. Sementara itu, penyebab utama hilangnya padang lamun di daerah tropis adalah peningkatan masukan sedimen ke perairan pesisir akibat pembalakan hutan di daratan dan penebangan mangrove yang bersamaan dengan pengaruh langsung dari kegiatan budi daya perikanan.



Status Padang Lamun di Indonesia pada 2017 dan beberapa diantaranya sudah dalam kondisi kritis - LIPI



Ekosistem berharga ini terancam karena minimnya pemahaman terkait fungsi padang lamun. Selain karena memang meningkatnya pembangunan di sekitar pesisir, seperti pembangunan pelabuhan, dermaga, pengembangan kawasan industri dan aktivitas pemanfaatan pesisir yang tidak ramah lingkungan.

Bahkan aktivitas reklamasi, polusi dari minyak di laut, penambangan pasir dan karang, pertanian rumput laut, sedimentasi hingga sampah berkontribusi besar terhadap kerusakan padang lamun. Luas total padang lamun di Indonesia semula diperkirakan 30.000 km, tetapi diperkirakan kini telah menyusut sebanyak 30-40%.

Perkumpulan Kaoem Telapak ([www.kaoemtelapak.org](http://www.kaoemtelapak.org)) bersama Siemenpuu ([www.siemenpuu.org](http://www.siemenpuu.org)) menilai ekosistem padang lamun merupakan ekosistem penting di pesisir yang belum banyak dikaji dan diekspos kepada publik. Proses kajian terhadap kondisi ekosistem padang lamun di Indonesia ini dilakukan melalui riset dokumen, diskusi dengan pihak-pihak terkait seperti

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), akademisi, dan masyarakat di beberapa lokasi. Keseluruhan hasil riset disajikan dalam bentuk laporan kajian. Melakukan kajian atas ekosistem ini akan memberikan informasi yang memadai untuk kepentingan pemahaman, menyusun rencana pengelolaan, dan merancang kegiatan penyelamatannya.

Dari kajian yang dilakukan, Kaoem Telapak mengkaji kebijakan yang ada di Indonesia menyoal padang lamun. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 200 tahun 2004, kondisi padang lamun terbagi menjadi 3 kategori, yaitu sehat, kurang sehat dan miskin. Kategori sehat jika penutupan lamun di suatu daerah > 60%, kurang sehat jika 30-59,9% dan tidak sehat jika penutupan antara 0-29,9%.

Pada Juni 2017, LIPI secara umum mempublikasi persentase tutupan lamun di Indonesia yang dihitung dari 166 stasiun pengamatan adalah 41,79%. Apabila nilai tersebut digolongkan mengikuti Kepmen LH 200 tahun 2004, maka status padang lamun di Indonesia pada

tahun 2017 termasuk dalam kondisi "kurang sehat".

Perhitungan kondisi lamun dilakukan dengan menggunakan beberapa sumber data. Sumber data pertama berasal dari data monitoring kondisi lamun yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Oseanografi (P2O-LIPI) melalui proyek COREMAP-CTI. Sumber data kedua, berasal dari hasil - hasil penelitian berbagai institusi, universitas, LSM dan sebagainya.

Hanya 5% yang kondisinya sehat (misalnya di Biak, Papua). Bahkan daerah konservasi seperti Wakatobi dan Lombok juga kondisinya kurang sehat. Tim Walidata Lamun menyebutkan setidaknya ada 150 ribu hektar padang lamun tersebar pada 423 lokasi di Indonesia. "Saat itu kita masih kajian tahap awal dan sekarang sedang diproses untuk penggalan mendalam, namun kajian ini terhenti

Hasil pengamatan Kaoem Telapak di Pulau Lima Teluk Banten pada 2012. Lamun masih tergolong sehat walaupun agak berlumut - Kaoem Telapak



sementara, karena satu dan lain hal" jelas Abu Meredian, Direktur Kaoem Telapak saat ini.

Kaoem Telapak memang memiliki fokus kerja pada isu-isu lingkungan seperti kehutanan, pertanian, komunitas, masyarakat adat dan nelayan. Organisasi non pemerintah berbasis keanggotaan ini memiliki 3 lokus utama sebagai target konstituen: petani, nelayan dan masyarakat adat.

Lahir pasca pertemuan di Sarongge pada 2016, Kaoem Telapak aktif melakukan pemantauan, pendampingan dan mendorong perbaikan kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Diharapkan dengan advokasi dan kajian yang dilakukan, keadilan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia secara berkelanjutan dapat tercapai.#





*Jaringan Masyarakat  
Gambut Riau (JMGR)*

## **MENYELAMATKAN GAMBUT RIAU BERSAMA SIEMENPUU**

*Oleh: Rina Syahputri  
dan Nurul Fitria*



**SENYUM MEREKAH DI WAJAH**  
Isnadi saat menceritakan kembali  
kerja-kerjanya kala menjabat  
sebagai Sekretaris Jenderal Jaringan  
Masyarakat Gambut Riau (JMGR).  
“Perjuangannya sangat panjang  
dan alhamdulillah berbuah manis  
pada 2020 lalu,” ujarnya.

*Pembukaan Hutan Alam dan Pengaliran Kanal di kawasan gambut dalam oleh  
PT. RAPP tahun 2016 - JMGR*



*Penebangan Hutan Alam dan pembuatan kanal di gambut dalam oleh RAPP di Pulau Padang tahun 2014 - JMGR*



JMGR lahir pada 31 Maret 2010 hasil dari Kongres Masyarakat Riau. Lahirnya JMGR dideklarasikan di depan Gedung DPRD Riau kala itu. Turut hadir warga dari 32 desa di lima kabupaten Riau seperti Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Pelalawan dan Siak.

“Saat itu kami sudah sangat kecewa melihat kondisi gambut Riau. Pembukaan hutan di gambut massif dilakukan untuk konsesi hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan sawit,” jelas Isnadi Esman. Saat kongres tersebut, ia perwakilan dari masyarakat Kepulauan Meranti.

Keresahan-keresahan warga yang bermukim di bentangan gambut Riau ini sudah lama disuarakan, namun tak juga mendapatkan respon positif dari pemerintah. Pembukaan lahan dan penerbitan izin terus berlanjut hingga menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan.

Bahkan izin-izin terus diberikan pemerintah di atas kawasan gambut dan pulau-pulau kecil, seperti di Kepulauan Meranti dan Bengkalis. Ancaman masuknya air laut ke perkebunan masyarakat karena pembukaan kanal-kanal pengairan untuk perkebunan sawit dan pembukaan hutan alam oleh korporasi HTI membuat masyarakat resah.

Saat itu masyarakat memutuskan membentuk JMGR yang nantinya akan bekerja untuk mewujudkan tata Kelola sumber daya ekosistem hutan rawa gambut Riau yang lestari, berkeadilan dan mensejahterakan masyarakat. JMGR akan menjadi wadah bagi masyarakat untuk bertukar informasi, komunikasi dan diskusi.

“Targetnya, JMGR dapat mengembangkan unit usaha yang produktif untuk pelestarian sumber daya gambut yang lestari,” jelas Isnadi.

ke hutan yang biasanya mereka manfaatkan untuk mencukupi kebutuhan hidup hingga persoalan tapal batas. Desa-desa ini berada di 22 titik wilayah gambut dengan luasan 272.063 hektar<sup>19</sup>.

Persoalan konflik yang berkepanjangan ini sebab tidak adanya transparansi dan upaya dari pemerintah untuk turun langsung melihat eksisting di lapangan. Tumpang tindih penguasaan lahan terjadi antara masyarakat yang telah lama mendiami kawasan tersebut dengan perusahaan yang tiba-tiba muncul berbekal izin yang diberikan pemerintah.

“Ini juga disebabkan sikap abai pemerintah terhadap hak-hak masyarakat untuk dapat memanfaatkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan mereka,” ujar Isnadi.

Untuk itu, JMGR dengan dukungan Siemenpuu kerap melakukan kegiatan-kegiatan penguatan kapasitas untuk memperdalam pemahaman warga terkait hak-hak

### Konflik dan Kerusakan di Lahan Gambut Riau

Pada 2011, JMGR melakukan pengumpulan data—berdasarkan pengaduan yang masuk—terkait konflik-konflik yang dihadapi masyarakat dengan perusahaan di Riau. Diperoleh, ada 62 desa yang berkonflik dengan perusahaan dalam bentuk perampasan lahan, akses masyarakat yang ditutup

*Kanal yang dibuat oleh PT RAPP di Pulau Padang pada 2016, padahal berada di gambut dalam - JMGR*



## JMGR

mereka dalam pengelolaan hutan serta pemanfaatan gambut yang lestari.

Isnadi menceritakan kembali terkait perjuangan masyarakat dampingan JMGR melawan PT Rimba Rokan Lestari (RRL) di Bengkalis. Perusahaan HTI yang berafiliasi dengan APRIL Group ini kerap berkonflik dengan masyarakat. Perusahaan ini memperoleh izin pada 1998 berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 262/KPTS-II/1998 dengan luasan izin konsesi di Pulau Bengkalis mencapai 11.069,54 hektar yang berada di 18 desa di Pulau Bengkalis.

Izin PT RRL ini tumpang tindih dengan pemukiman, ladang kebun masyarakat hingga fasilitas-fasilitas umum di desa-desa tersebut. Berdasarkan data analisis *Geospacial Informatio System* (GIS) Jikalauhari, areal PT RRL ini

Sisa kayu-kayu tebang hutan alam yang dilakukan PT RAPP pada 2014 di kawasan gambut Pulau Padang - JMGR



tumpang tindih dengan desa: Bantan Air (81,78 ha), Bantan Sari (205,1 ha), Bantan Timur (862,83 ha), Kelemantan (652,07 ha), Kelemantan Barat (1.982,78 ha), Kembung Baru (1.270,99 ha), Kembung luar (433,13 ha), Ketam Putih (1.017,03) dan Muntai Barat (18,21 ha).

Sembilan desa lainnya yaitu, Palkun (346,56 ha), Pematang Duku (900,02 ha), Pematang Duku Timur (818,19 ha), Penebal (73,3 ha), Sekodi (30,81 ha), Sukamaju (833,09 ha), Sungaibatang (92,47 ha), Teluklancar (1.167,29 ha) dan Ulu Pulau (283,83 ha).

“Banyak masyarakat yang menolak aktivitas perusahaan ini karena mereka merasa konversi hutan alam mereka, terutama di kawasan gambut, menjadi kebun sawit ataupun konsesi HTI adalah hal yang salah, dan berdampak buruk pada lingkungan tempat mereka



tinggal,” ujar Isnadi.

Kesadaran ini memang menjadi tujuan dari aktivitas JMGR, membuat masyarakat sadar akan pentingnya melindungi gambut dan lingkungan sebagai rumah mereka dan anak cucu nantinya. JMGR kerap melakukan penguatan organisasi bagi pengurus JMGR dan masyarakat dampingannya.

Mulai dari pelatihan ataupun diskusi yang membahas soal isu-isu terkait lingkungan, pemahaman terkait gambut, baik mengenal ekosistem gambut hingga pemanfaatannya yang lestari maupun terkait regulasi-regulasi yang berlaku berkaitan dengan gambut. JMGR juga kerap memberikan pelatihan terkait pengorganisasian masyarakat dan pengelolaan kawasan hutan terutama untuk menerapkan skema Perhutanan Sosial (PS).

### Perhutanan Sosial di Kawasan Gambut

Masyarakat dampingan JMGR menyadari bahwa kampung mereka saat ini adalah satu-satunya warisan yang dapat mereka berikan ke anak cucu. “Mereka tinggal disana, lahir, besar dan bahkan menutup usia nantinya di kampung mereka saat ini,” kata Isnadi. Namun ancaman konversi lahan gambut, menjadi konsesi HTI dan perkebunan sawit semakin jelas di depan mata mereka.

Penolakan bukan jadi satu-satunya cara, JMGR memandang masyarakat perlu diberi pemahaman terkait potensi-potensi ruang Kelola dan peningkatan ekonomi dari gambut.

Sejak 2016, JMGR mengorganisir masyarakat untuk memperjuangkan ruang

## PERSAHABATAN UTARA DAN SELATAN

Kelola hutan mereka dengan mengusulkan skema PS di areal mereka. Selain memperoleh ruang Kelola dan dapat memberdayakan hasil hutan, ini juga dapat menjadi cara yang dilakukan masyarakat untuk menyelamatkan gambut dan hutan tersisa mereka.

JMGR telah mengajukan usulan PS dengan 3 skema di daerah dampingannya, diantaranya Hutan Desa di Desa Rawa Mekar Jaya, Hutan Adat di Kampung Penyengat dan Hutan Kemasyarakatan di Kepulauan Meranti khusus bagian hutan mangrovenya. Selama prosesnya, JMGR melakukan pendampingan bersama masyarakat, mulai dari proses pengusulan, pemetaan hingga adanya verifikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Proses ini tentunya panjang dan memakan banyak waktu serta tenaga. Ditambah pengusulan Hutan Desa di Rawa Mekar Jaya, masyarakat harus ‘bertarung’ melawan korporasi serta sering berdialog dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) setempat. Akhirnya pada 2020, SK HD Rawa Mekar Jaya diterbitkan sehingga masyarakat dapat mengelola kawasan tersebut dengan lebih baik.

“Tentunya ini memakan waktu yang lama sebab perjuangan hak masyarakat ini tidak bisa didapat dengan mudah. Kami bersyukur dalam prosesnya, dukungan Siemenpuu benar-benar membantu dalam pergerakan ini,” ujar Isnadi. #



Riau Women Working  
Group (RWWG)

## PEREMPUAN BERANI BERJUANG UNTUK PERUBAHAN

Oleh: Rina Syahputri  
dan Nurul Fitria



SEKELOMPOK PEREMPUAN SIBUK duduk sambil bercerita. Tangan mereka tak henti bekerja, ada yang sibuk mengupas kulit nenas, memotongnya, bahkan yang lainnya sibuk mengaduk olahan nenas yang dijadikan dodol di kuili. Senda gurau dan cerita-cerita ringan menemani kegiatan mereka di siang itu.

Kelompok Perempuan Wanalestari inisiasi pembentukan kelompok ini atas dasar kebutuhan kegiatan yang akan dilakukan di Kampung Dosan. Kelompok ini juga dibentuk atas dasar kemauan masyarakat, serta peran serta tokoh masyarakat - RWWG

Perempuan-perempuan ini adalah warga Kampung Dosan, Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, Riau. Tergabung dalam Kelompok Perempuan Wanalestari, mereka kerap melakukan aktifitas pemberdayaan perempuan salah satunya dengan mengolah hasil perkebunan menjadi panganan yang dapat dijual ke pasaran. Dodol nenas yang mereka olah ini contohnya, akan mereka bawa ke bazar di kantor Camat Pusako.

Kelompok perempuan Wanalestari aktif memproduksi panganan olahan dari kebun mereka. Nanas yang diolah ini bahkan mereka tanam di pekarangan maupun lahan kosong di desa tersebut. Tujuannya tentu selain untuk memanfaatkan ruang bercocok tanam, hasil dari kreatifitas kaum perempuan ini dapat membantu perekonomian keluarga masing-masing. Bahkan dari pihak Kecamatan Pusako mengapresiasi keaktifan perempuan dari Kampung Dosan.

“Ini jadi bentuk dukungan moril dan semangat bagi kami. Saat semangat sedang naik turun, tapi dengan adanya kegiatan yang memberdayakan perempuan, membuat kami lebih semangat,” ujar Suci Handayani, perempuan berusia 40 tahun keturunan Jawa yang dipercaya menjadi Ketua Kelompok Wanalestari.

Suci merupakan penggerak perempuan di kampungnya ini. Ia aktif mengikuti pelatihan-pelatihan dan ilmunya ia teruskan kepada perempuan-perempuan lainnya. Ia juga memberanikan diri menjadi Ketua Kelompok Perempuan Wanalestari dan Kelompok Tani Dosan. Ia bahkan pernah menjabat sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) serta saat ini menjadi salah satu anggota Badan Pengawas Desa (BPD) periode 2019 – 2024.



Kegiatan kelompok perempuan WANALESTARI yang baru saja memetik hasil kebun di lahan pecontohan mereka - RWWG



### Advokasi dan Pemberdayaan Perempuan

Kelompok Perempuan Wanalestari adalah satu dari sekian banyak kelompok perempuan yang didampingi Riau Women Working Group, atau biasa disingkat RWWG. Memiliki fokus kerja pada isu pemberdayaan perempuan dan lingkungan hidup, lembaga yang didirikan pada 23 Maret 2006 ini sering turun ke desa-desa di Riau. Dengan visi mewujudkan keadilan ekologis dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan terhadap perempuan, berbagai kegiatan dilakukan, salah satunya dengan dukungan dari Siemenuu.

Pada 2018 hingga 2020, RWWG fokus melakukan kegiatan pendampingan di Kampung Dosan. Lembaga yang berkantor di Pekanbaru ini melakukan kegiatan untuk mendorong perlindungan ekosistem gambut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya penyelamatan dan pemanfaatan lansekap

Semenanjung Kampar secara berkelanjutan. Tak hanya itu, tentunya mereka juga memastikan pelibatan aktif kelompok perempuan Dosan dalam aktifitas tersebut.

“Bagi kami, ini hal yang baru karena perempuan-perempuan disini didorong untuk terlibat aktif,” kata Suci.

RWWG secara langsung turut berbaur dan tinggal bersama warga Dosan. Mengikuti aktifitas sehari-hari hingga dapat menemukan hal-hal yang patut dimaksimalkan untuk pemberdayaan perempuannya. Mulai dari membentuk kelompok perempuan yang terstruktur, hingga merencanakan kegiatan-kegiatan yang dapat membawa dampak positif.

Pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas digelar hingga pendampingan pelaksanaan kegiatan hortikultura. Para perempuan Dosan belajar



Suci Handayani, perempuan aktif yang terlibat di kegiatan RWWG dan menjadi Ketua Kelompok Perempuan Wanalestari. Suci bersama 20 orang anggotanya mengajak perempuan untuk turut serta dalam pengelolaan lahan gambut di sekitar rumah dengan menanam Nanas, Jeruk Nipis dan Pinang - RWWG



Salah satu hasil produk turunan dari Nanas yang dibuat kelompok perempuan dampingan RWWG Wajik Nanas - RWWG



mengidentifikasi jenis tanaman yang bisa mereka tanam di lahan gambut. Pilihannya jatuh pada nanas, pinang dan jeruk nipis. Mulai dari yang muda hingga tua—rentang usia perempuan Dosan rata-rata 23 hingga 50 tahun—aktif mengelola kebun mereka untuk hasilnya dapat diolah. “Kami tetap bisa menyelesaikan pekerjaan di rumah atau membantu suami kami di kebun, disela-sela itu, kami berkumpul dan merencanakan apa yang hendak kami buat bersama tim dari RWWG,” jelas Suci.

Tak hanya pemberdayaan perempuan, RWWG juga melakukan advokasi pemanfaatan ruang kelola bagi masyarakat Dosan. Melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, perempuan dan perangkat desa, RWWG mendorong pengajuan izin Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa untuk Dosan.

“Ruang kelola ini harus diperjuangkan karena tanah masyarakat Dosan selama ini dikuasai oleh perusahaan hutan tanaman industri (HTI) PT Arara Abadi,” kata Sri Wahyuni, Direktur RWWG. Advokasi-advokasi Panjang yang dilakukan RWWG ini tentunya diharapkan berbuah manis.

### DOSAN DAN SEMENANJUNG KAMPAR

Dosan, salah satu desa di Kabupaten Siak. Berada di Kecamatan Pusako, dengan luas 10.028 km<sup>2</sup>. Berada di atas ekosistem gambut, Dosan memiliki kekayaan alam berlimpah dan wisata alam berupa Danau Naga Sakti.

Dosan merupakan 1 diantara desa lainnya yang berada di lansekap Semenanjung Kampar. Kawasan ekosistem gambut dengan luas mencapai 682.511 hektar ini membentang di dua kabupaten, Siak sekitar 38 persen dan sisanya di Pelalawan. Ada 14 desa di Siak dan 12 desa di Pelalawan berada di lansekap Semenanjung Kampar ini.

Dengan kedalaman gambut mencapai 15 hingga 20 meter, kawasan hutan rawa gambut ini memiliki kekayaan hayati yang berlimpah. Terdapat 4 kawasan lindung di lansekap Semenanjung Kampar diantaranya: Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar, Suaka Margasatwa Tasik Belat, Suaka Margasatwa Tasik Metas dan Suaka Margasatwa Tasik Serkap.

Semenanjung Kampar memiliki potensi kayu yang tinggi yakni sekitar 287 m<sup>3</sup>/hektar terdiri dari 58 jenis. Sepuluh jenis di antaranya dilindungi dan persentase tutupan tajuk rata-rata hutannya mencapai 76 persen. Di kawasan ini juga dapat ditemui 25 jenis satwa endemic dan 7 jenis di antaranya dilindungi.

Hampir keseluruhan Semenanjung Kampar merupakan hamparan gambut dengan ketebalan lebih dari 4 meter. Juga terdapat beberapa kubah gambut yang luas dengan kedalaman lebih dari 15 meter.

Sayangnya, di kawasan ini, ekspansi perusahaan HTI untuk penguasaan hutan dan lahan sangat massif. Di Dosan sendiri, anak perusahaan HTI milik Asia Pulp and Paper (APP) Group—milik alm Eka Tjipta Widjaya—PT Arara Abadi telah lama menguasai hutan dan lahan mereka. Menebang hutan-hutan alam dan diubah menjadi tanaman akasia, hamper setengah luasan Kampung Dosan masuk dalam izin milik PT Arara Abadi.

Konflik dengan masyarakat pun tak terhindarkan. Demonstrasi dari masyarakat untuk menolak aktifitas perusahaan ini kerap dilakukan. Namun perusahaan tak menghiraukan suara dari masyarakat dan terus beraktifitas. Tanaman akasia terus ditanam, bahkan sampai merusak kebun-kebun milik masyarakat.

Namun gerakan masyarakat yang didampingi RWWG mulai berubah. Tak hanya dengan melakukan aksi penolakan, pendekatan lainnya pun dilakukan untuk memenangkan ruang kelola bagi masyarakat ini. “Kita mulai mengajak warga untuk memahami regulasi dan aturan yang berlaku, bahkan berusaha

mempelajari perizinan dari perusahaan ini,” kata Sri Wahyuni.

RWWG dan masyarakat Dosan melihat adanya peluang yang dapat dimanfaatkan. Hal ini karena izin operasi PT Arara Abadi akan segera berakhir, dorongan agar pasca izin berakhir, areal bekas izin ini dapat diberikan kepada masyarakat untuk dikelola bersama dengan skema PS dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dianggap dapat menjadi solusi.

Bersama warga, RWWG menyusun proposal pengajuan izin PS dengan skema Hutan Desa seluas 399,32 hektar. Areal yang diusulkan ini berada disekitar Danau Naga Sakti, danau alami yang telah dikepung konsesi PT Arara Abadi. “Areal ini diusulkan karena kita hendak menyelamatkan hutan lindung yang masuk dalam areal tersebut,” jelas Sri Wahyuni.

Areal ini memang sdah lama hendak diselamatkan warga Dosan. Bahkan mereka juga telah menyusun Peraturan Desa terkait pengelolaan Danau Naga Sakti agar lebih lestari namun juga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan perekonomian.

Untuk pengelolaan areal yang diajukan sebagai Hutan Desa ini, RWWG memfasilitasi warga untuk membentuk Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) dan membekali para pengurusnya terkait wawasan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan. #





## Mereka yang Terdampak

**KONDISI LINGKUNGAN HIDUP** dan kehutanan di Indonesia tiap tahun terus berubah. Kerusakan yang terjadi, deforestasi dan degradasi lahan, berkurangnya areal pemanfaatan lahan untuk ladang penghidupan masyarakat hingga termarginalnya kaum perempuan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terus terjadi.

Berbagai upaya dilakukan untuk dapat meminimalisir bahkan menghentikan kerusakan yang terjadi. Siemenpuu bersama mitra-mitranya di Indonesia melakukan berbagai kegiatan yang ditujukan berdampak langsung ke lapisan masyarakat.

Baik kegiatan pendampingan masyarakat, reforestasi hingga intervensi kepada pembuat kebijakan agar melahirkan kebijakan yang pro natura terus dilakukan. Upaya-upaya ini tentunya diharapkan berdampak langsung kepada masyarakat yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

Cerita-cerita berikut menyajikan berbagai hal yang dirasakan oleh masyarakat yang terlibat dan merasakan langsung dampak dari kegiatan yang dilakukan Siemenpuu bersama para mitranya.

Bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat meningkatkan nilai ekonomi suatu wilayah dan dapat menjadi sumber perekonomian alternatif. Kegiatan reforestasi yang diharapkan dapat mengembalikan tutupan hutan yang hilang, hingga mendorong perubahan kebijakan yang meminimalisir dampak kerusakan terhadap hutan dan lingkungan.

Cerita-cerita berikut menyajikan secuil kesan dan harapan dari masyarakat yang selama ini berjibaku menyelamatkan hutan tanah mereka. Cerita perjuangan ini tak hanya untuk dikenang, namun harapannya dapat menginspirasi dan menjadi tunas-tunas baru perjuangan untuk menyelamatkan hutan dan lingkungan di Indonesia.



# Menjaga Mangrove

# Menjaga

# Penghidupan

*Sony Monginsi (nelayan Torosiaje) sedang memperbaiki jaring pukat di tengah pancaroba*

Oleh: Renal Husa dan  
Nurain Lapolo



**FAJAR MULAI MERANGKAK NAIK,** cahayanya masuk menyinari rumah-rumah kayu terapung di atas laut. Pagi itu, sorak-sorai keramaian terdengar di sudut penjuru desa. Sebagai salah satu tempat wisata di Kabupaten Pohuwato, Desa Torosiaje memang sering ramai dikunjungi wisatawan saat akhir pekan. Wisatawan datang untuk melihat perkampungan suku Bajo.

Desa Torosiaje, perkampungan terapung di atas laut, dan dihuni mayoritas Suku Bajo yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Selain di Desa Torosiaje, Suku Bajo juga banyak bermukim di Desa Torosiaje Jaya dan Desa Bumi Bahari. Tiga desa tersebut dikenal dengan sebutan Torosiaje Serumpun.

Berbeda dengan pagi-pagi sebelumnya. Hari itu, tak tampak







Beberapa ojek perahu sedang mengantar masyarakat dari darat ke Desa Torosiaje - JAPESDA



perahu-perahu tanpa cadik— bambu atau kayu yang dipasang di kiri kanan perahu berbentuk seperti sayap sebagai alat pengatur keseimbangan agar tidak mudah terbalik— milik nelayan di pelabuhan kecil. Tak ada pula keramaian transaksi menukar ikan dengan rupiah antara warga dan nelayan.

“Semalam, para nelayan tidak turun melaut karena sedang musim pancaroba,” kata Umar Pasandre, warga Torosiaje Jaya sekaligus tokoh masyarakat yang giat melakukan aktivitas pelestarian mangrove di Torosiaje Serumpun. Saat ditemui, 8 Maret 2021, Umar mengatakan, pada musim pancaroba langit yang terlihat cerah dan tidak berawan, sewaktu-waktu akan berubah menjadi

petaka. Cuaca saat musim pancaroba adalah ancaman dan musuh alami bagi nelayan.

“Namun, ada baiknya cuaca seperti sekarang ini. Selain waktu untuk nelayan beristirahat, juga kesempatan untuk ikan-ikan bertelur dan berkembang biak,” ungkap Umar.

Umar mengungkapkan, saat musim pancaroba berlangsung, badai seringkali tidak bisa diprediksi. Pada periode tertentu, seperti pada April hingga Mei, biasanya tidak ada aktivitas nelayan. Sebab, biasanya waktu itu menjadi momen datangnya angin kencang yang membawa gelombang ombak tinggi, sehingga berisiko kepada para nelayan yang melaut.

Sekarang, pancaroba sedang berlangsung di pesisir Torosiaje Serumpun. Mereka dipaksa untuk beristirahat dan melabuhkan perahunya. Tak heran, sejak pagi hingga menjelang siang, tidak ada aktivitas jual ikan di pelabuhan. Yang terlihat hanya puluhan perahu *sope* berderet, terparkir rapi di pelabuhan Torosiaje Jaya. *Sope* adalah sebutan suku Bajo untuk perahu khas tradisional mereka, yang biasanya tanpa cadik.

Di pelabuhan yang berbeda, Sony Monginsi, pria berusia 42 tahun ini juga memilih untuk memarkirkan perahunya saat itu. Sony adalah nelayan tangkap di Torosiaje Jaya. Sebagai orang yang terlahir dari Suku Bajo, dia telah menjalani aktivitas melaut saat umurnya masih 14 tahun. Perkara perubahan angin Timur yang sedang terjadi, dia sudah terbiasa dan tahu betul kapan perubahan arah angin itu berlangsung. Karena pengalaman itu juga, dia memutuskan untuk tidak turun melaut hari ini.

Siang itu, dia memilih memperbaiki pukat dan jangkar perahunya, karena tahu jika memaksa tetap turun melaut, angin Barat sewaktu-waktu akan meremukannya di lautan lepas. Walau cerah disiang hari, namun angin badai akan menerjang jelang sore. “Nyawa menjadi taruhan jika memaksa melaut pada saat-saat seperti ini,” katanya.

Meskipun jika ia berhasil kembali dan menjual ikan hasil tangkapannya dengan harga meningkat dua hingga tiga kali lipat, namun itu tak sebanding dengan pertaruhan nyawa di lautan lepas. Bagi Sony, ikan dan uang masih bisa dicari saat pancaroba berakhir.

Di beberapa tempat, angin Barat dan pancaroba memporak-porandakan pemukiman yang ada di pesisir. Beruntung hal itu tidak terjadi di Torosiaje Jaya. Sebab pesisir pantai di tempat ini memiliki bentangan hutan mangrove yang menjadi pagar beton alami untuk meredam dampak angin musim pancaroba atau angin Barat.

Kawasan mangrove di pesisir perkampungan Torosiaje Serumpun luasnya mencapai 124,5 hektar. Selain menjadi benteng dari abrasi dan penghalang saat angin kencang melanda, tempat itu juga menjadi kawasan alternatif lain bagi nelayan Desa Torosiaje Serumpun menangkap ikan.

Ekosistem mangrove ini masih terjaga dan menyediakan cadangan ikan, kepiting dan kerang bagi nelayan yang ingin menangkap dan memungutnya. Mencari kerang (*bia*), kepiting, teripang dan ikan-ikan pada saat air surut, serta biota laut lainnya adalah alternatif tambahan pendapatan bagi ibu-ibu dan anak-anak yang cukup menghasilkan ataupun untuk dikonsumsi demi mencukupi kebutuhan protein keluarga. Nelayan yang berperahu *sope*, biasanya menangkap ikan dengan menggunakan jaring di kawasan mangrove.

Seperti cerita Umar Pasandre, saat musim pancaroba dan angin Barat berlangsung, beberapa nelayan memilih untuk menangkap ikan di kawasan mangrove untuk menghidupi ekonomi keluarga. “Di dalam kawasan mangrove itu nelayan dapat menangkap ikan belanak, baronang, udang, kepiting serta teripang,” kata Umar.



Kawasan mangrove di Torosiaje tahun 2019 tampak dari atas - JAPESDA



Karena hutan mangrove itu juga, Desa Torosiaje Serumpun dimasukkan pada rencana Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) melalui Surat Keputusan Gubernur Gorontalo dengan Nomor 322/21/X/2017 pada Oktober 2017. Surat keputusan itu diterbitkan setelah Bupati Pohuwato menyurati Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (BPEE) untuk menjadikan Torosiaje Serumpun sebagai KEE.

Alasan mendasar lain terkait penetapan KEE demi menjaga kelestarian bentangan mangrove yang ada di tempat itu<sup>20</sup>. Sebab, seperti kawasan mangrove pada umumnya di Kabupaten Pohuwato, hutan mangrove terlihat seperti ladang uang untuk dijadikan kawasan budidaya tambak bandeng dan udang oleh pengusaha tambak<sup>21</sup>.

Di Kecamatan Popayato terdapat bukaan lahan tambak sebesar 507,9 hektar. Sementara di Torosiaje

Serumpun terdapat 90,126 hektar kawasan budidaya tambak yang tersebar di dua desa, yaitu Desa Torosiaje 33,138 hektar dan Desa Torosiaje Jaya 56,988 hektar<sup>22</sup>. Mirisnya, luasan tambak di Torosiaje Serumpun hanya dikuasai oleh 16 orang saja. Ditetapkannya KEE di Torosiaje Serumpun, sebagai upaya menekan laju kerusakan mangrove, juga untuk melindungi kawasan hutan lindung di wilayah ini.

### Menolak Tambak Untuk Ekosistem Laut

Siang yang terik di Pesisir Bonda, Desa Torosiaje, terlihat sekitar 10 orang sedang melakukan penanaman mangrove. Hari itu, 30 Juni 2020 masyarakat Torosiaje Serumpun menanam 600 pohon mangrove jenis *Rhizophora apiculata* dan *Rhizophora stylosa*. Mereka melakukan kegiatan tersebut untuk memulihkan mangrove yang telah hilang ditebang.

Penebangan mangrove itu terjadi pada 2010. Beberapa orang merencanakan mengubah tempat tersebut menjadi lahan tambak. Warga Torosiaje Serumpun menolak rencana ini, karena 14 hektar luasan dari pesisir itu diubah menjadi tambak dirasa tidak masuk akal. Umar dan beberapa warga lain yang tergabung dalam Kelompok Sadar Lingkungan (KSL) Paddakauang giat mengabarkan kepada penduduk setempat untuk menolak rencana pembuatan tambak pada kawasan mangrove itu.

Terlahir dari suku Bajo yang dikenal sebagai pengembara laut, mereka sadar tidak bisa lepas dari kehidupan laut dan pesisir. Mereka harus menjaga keduanya, termasuk kawasan mangrove yang ada disana. Rencana pembuatan tambak untuk mengkapling pesisir menjadi lahan tambak tentu akan merusak ekosistem

dan keanekaragaman hayati. Mangrove yang menjadi tempat ikan bertelur akan hilang dan mesti akan merusak tabungan ikan sebagai tangkapan mereka di masa mendatang.

Wajah Umar terlihat kesal mengingat kejadian saat itu. Dia mengisahkan, saat menolak rencana pembuatan tambak, beberapa orang yang terlibat dalam rencana itu datang menemuinya. Mereka mengancam akan membakar rumahnya jika dia masih menghasut warga untuk menolak rencana mereka. Namun, Umar tak gentar atas ancaman itu. Pada akhirnya, orang-orang itu luluh dan meninggalkan Umar dengan pendiriannya.

Meski telah ditentang banyak warga di Torosiaje Serumpun, bahkan sampai dibuat peraturan desa terkait pelarangan pembukaan lahan mangrove, tapi pengerjaan pembuatan tambak tetap saja dilakukan. Mereka menebang mangrove dan mulai membuat pematang tambak dengan menggunakan eskavator.

Mendengar hal itu, Umar menghubungi pihak kepolisian, Kepala Desa di Torosiaje Serumpun dan mengumpulkan warga yang telah bersepakat untuk menolak pembuatan tambak. Beramai-ramai mereka pergi menuju pesisir Bonda, Desa Torosiaje untuk menghentikan eskavator yang sedang bekerja. Melihat masa yang banyak, akhirnya eskavator harus berhenti bekerja dan segera meninggalkan tempat itu.

Setelah kejadian tersebut, warga dan Kepala Desa di Torosiaje Serumpun meminta para pihak yang berencana membuat tambak menghentikan rencana mereka.

**Mereka yang Terdampak**

Akhirnya disepakati rencana pembuatan tambak tidak akan dilanjutkan.

Warga memang berhasil menghentikan pembuatan tambak di Pulau Tompe, sayangnya, kerusakan mangrove tidak bisa mereka cegah. Beberapa deretan mangrove berhasil dipangkas mati. Kurang lebih 4 hektar kawasan mangrove dari 14 hektar rencana pembuatan tambak telah rusak. Bekas-bekas galian pematang tambak terpampang menjadi saksi bisu atas kejadian itu.

**Satu Pohon Untuk Kelestarian**

Sejak kejadian penolakan warga, tidak ada lagi pembukaan kawasan tambak baru di Torosiaje Serumpun. Kawasan hutan mangrove mulai bertambah dengan adanya kegiatan konservasi melalui penanaman mangrove yang mulai dilaksanakan. Dari kegiatan penanaman dimulai sejak 2011 hingga 2019 tersebut, setidaknya sekitar 26 hektar kawasan mangrove telah dipulihkan melalui program penanaman yang dilakukan pemerintah daerah dan LSM<sup>23</sup>.

Melalui program yang didukung Siemnpuu Foundation selama periode pertama 2016-2017 dan periode kedua 2018-2021, KSL Paddakauang dan JAPESDA telah berhasil menanam setidaknya 10.000 bibit mangrove di Torosiaje Serumpun. Selain melakukan penanaman, mereka juga giat melakukan penyadartahuan kepada warga Desa Torosiaje Jaya akan pentingnya kawasan mangrove untuk ekosistem laut.



Selama program berlangsung, mereka menggandeng dan mengajak banyak pihak untuk terlibat dalam kegiatan rehabilitasi hutan mangrove. Beberapa penanaman yang dilakukan JAPESDA dan KSL Paddakauang berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti perguruan tinggi, pelajar di Kecamatan Popayato, dan pemerhati lingkungan di Gorontalo.

Pada 2019 misalnya, dilakukan dua kali penanaman yang diikuti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Gorontalo, LSM Biodiversitas Gorontalo (BIOTA), mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo serta

*Penanaman mangrove JAPESDA bersama pemerintah-siswa-masyarakat di Torosiaje Jaya - JAPESDA*

pelajar dari Sekolah SMA dan SMK di Kecamatan Popayato.

Tak hanya itu, JAPESDA dan KSL Paddakauang menginisiasi pelaksanaan paket ekowisata di Torosiaje. Tujuannya untuk mengedukasi wisatawan tentang ekosistem mangrove.

Dalam paket ekowisata yang ditawarkan, wisatawan dapat belajar langsung tentang ekosistem mangrove dari KSL Paddakauang. Mulai dari mengelilingi kawasan hutan mangrove dan mempelajari ekosistem hingga wisatawan juga dapat merasakan langsung proses penanaman mangrove.

Di saat tambak yang dibangun di Torosiaje hanya menguntungkan beberapa orang saja, kawasan hutan mangrove menawarkan lebih yaitu menyediakan cadangan ikan untuk nelayan dan serapan karbon untuk Kabupaten Pohuwato.

Hutan mangrove kini menjanjikan paket ekonomi untuk warga Torosiaje Serumpun melalui rencana ekowisata yang mulai dibangun dan diperkuat lewat Forum Kolaborasi Kawasan Ekosistem Esensial (KEE).#



# Perempuan Torosiaje dan Kemiskinan Pesisir

*Simin Santiu sedang mengisi polybag di persemaian mangrove di Torosiaje*

Oleh: Defri Sofyan dan  
Nurain Lapolo



“DINDING BAGIAN BELAKANG rumah saya itu hancur karena angin Barat.”

Simin Santiu menunjuk ke arah belakang rumahnya yang terlihat runtuh. Saat ditemui, Ia sedang berada di *tongke*<sup>24</sup> di belakang rumahnya. Perempuan yang kini berusia 73 tahun ini sudah menjanda puluhan tahun, suaminya meninggal tahun 2000 silam. Sejak ditinggal suami dan anaknya yang sudah berkeluarga, Simin harus membiayai hidupnya seorang diri.

Siang itu, terik cahaya matahari terasa begitu menyengat kulit. Simin menggunakan pelepah daun kelapa kering untuk melindunginya dari panas mentari. Ia tampak serius memasukkan lumpur ke dalam *polybag* yang nantinya akan dijadikan medium tanam bibit mangrove. Setiap *polybag* yang



**Mereka yang Terdampak**

berhasil Ia isi dihargai seratus rupiah. Jadi, kira-kira berapa pendapatan yang bisa Ia dapatkan dari pengisian *polybag* ini selama sehari? Tentunya tak banyak.

Jika pekerjaan mengisi *polybag* telah usai atau air sedang pasang, Simin akan bekerja apapun yang dia bisa agar perutnya bisa terisi setiap hari, seperti membantu jualan kue tetangga, mencuci pakaian dan lain sebagainya. Bahkan bantuan yang sering didapatnya dari pemerintah desa hanya akan berakhir menjadi bahan makanan, alih-alih sebagai modal untuk usaha. Sebab, selain jumlah uangnya yang terlalu sedikit, Simin tak dibekali dengan keterampilan.

Perempuan seperti Simin merupakan gambaran umum bagaimana kemiskinan dan kesenjangan ekonomi berbasis gender menjadi masalah di kawasan pemukiman pesisir Indonesia, khususnya Torosiaje.

Meskipun Torosiaje dikenal sebagai tempat indah nan eksotis dengan lanskap pantai yang indah, terumbu karang dan laut yang kaya akan biota, jajaran pohon bakau yang membentuk benteng alam, dan pemukiman terapung Suku Bajo yang unik, tetap tak bisa menutup realitas yang lain tentang masalah khas pesisir, yakni kemiskinan dan kesenjangan gender.

Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada 2016 ada 25% atau 7,87 juta orang miskin yang tinggal di wilayah pesisir. Sementara menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa)<sup>25</sup>, perempuan di Indonesia mempunyai pendapatan

yang lebih kecil dari laki-laki. Hal ini diukur dari pengeluaran per kapita antara perempuan dan laki-laki selama satu dekade, dari 2010 hingga 2019.

Wilayah pesisir memang merupakan wilayah yang mempunyai potensi sumber daya alam sangat besar. Ekosistem terumbu karang, mangrove dan padang lamun yang berada di pesisir, selain berfungsi secara ekologis, juga mempunyai fungsi penting untuk memenuhi kebutuhan ekonomis manusia di sekitarnya. Seperti sebagai sumber pangan maupun pendapatan. Sayangnya, seringkali sumber daya pesisir yang bersifat *open acces* ini belum berhasil dimanfaatkan secara adil oleh laki-laki dan perempuan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Aktivitas perempuan di Torosiaje dalam memanfaatkan sumber daya alam pesisir tidak sama dengan memenuhi kebutuhan keluarga.

Nelayan yang kebanyakan diperankan oleh laki-laki memang menangkap langsung ikan, teripang, kepiting dan sumber daya laut lainnya secara tradisional, setelah ditangkap biasanya langsung dijual ke penampung. Cara tradisional inilah yang bisa diperkaya jika perempuan mengambil perannya: Diversifikasi—penganekaan usaha untuk menghindari ketergantungan pada ketunggalan kegiatan, produk, jasa, atau investasi.

Nurwati Pakaya, atau yang biasa disapa Bunda Wati adalah salah satu perempuan Torosiaje yang melihat potensi itu. Suaminya memang bukanlah nelayan, tapi penampung, sebuah profesi yang



Nurwati Pakaya sedang memamerkan berbagai produk olahan dari mangrove - JAPESDA



mendapat keuntungan berlipat dibanding nelayan tradisional. Bunda Wati sendiri adalah pensiunan pegawai honorer pemerintah desa. Walaupun dengan kondisi yang tidak sama dengan kebanyakan keluarga Torosiaje yang berkomposisi suami nelayan dan istri ibu rumah tangga, tapi apa yang dilakukan Wati bisa menjadi contoh bagaimana perempuan Torosiaje bisa mengambil peran penting dalam memanfaatkan sumber daya pesisir.

Sejak diintervensi Siemenpuu Foundation dan Jaring Advokasi Pengelolaan Sumberdaya Alam (JAPESDA) melalui program “Pengelolaan Mangrove dan Alternatif Mata Pencarian Masyarakat Pesisir”, Wati bersama kelompok perempuan Torosiaje mulai melihat potensi usaha itu.

Mangrove yang dulunya hanya dianggap tumbuhan dengan fungsi ekologis semata, mulai dimanfaatkan secara ekonomis.

“Kita bisa bikin kerupuk mangrove, pia mangrove, dan stik mangrove, pesanan kita bahkan dipesan oleh lembaga luar negeri, dari Denmark dan Finlandia kalau tidak salah,” kata Wati.

Menurut sebuah penelitian, mangrove memang bisa menjadi sumber pangan alternatif karena memiliki kandungan energi yang tinggi. Per 100 gram buah mangrove dari jenis *Bruguiera gymnorrhiza* bisa menghasilkan 371 kalori, lebih tinggi dari beras (360 kalori per 100 gram) dan jagung (307 per 100 gram). Begitupun dengan kandungan karbohidratnya, sebesar 85,1 gram per 100 gram.<sup>26</sup>

### Mereka yang Terdampak

Sementara Torosiaje yang telah dikukuhkan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) pada 2017, mempunyai banyak asosiasi mangrove seluas 1.200 hektar. Terdiri dari sembilan spesies, yakni *Rhizophora mucronata*, *Rhizophora stylosa*, *Rhizophora apiculata*, *Ceriops tagal*, *Bruguiera sp.*, *Sonneratia sp.*, *Xylocarpus sp.*, *Lumnitzera sp.*, dan *Avicennia sp.*<sup>27</sup>

Kelimpahan mangrove ini yang dimanfaatkan oleh Wati bersama kelompoknya. Dengan keterbatasan fasilitas dan modal, cara sederhana mereka lakukan sebagai solusi. Untuk berbagai olahan, mereka menggunakan buah mangrove tertentu yang bisa dikonsumsi. Tahap pertama direbus untuk menghilangkan kadar racunnya, kemudian diblender, dan terakhir tinggal dicampur ke adonan apapun yang mereka

inginkan. Kemudian, sebagai tambahan, mereka memberi sedikit bumbu agar bisa disajikan dengan banyak rasa.

Selain memanfaatkan mangrove, Wati bersama kelompoknya juga mengolah ikan asin menjadi sambal dan abon. Diberi merek, dikemas apik, kemudian dipasarkan ke pemesan-pemesan yang jaringannya dibantu lembaga seperti JAPESDA.

Wati merasa senang dengan keuntungan yang didapatnya dari usaha-usaha itu. Dari penjualan stik mangrove dalam sekali produksi saja, dia bisa mendapat untung sekitar seratus ribu rupiah. Sedangkan untuk olahan ikan asin, hanya membutuhkan modal dua kilogram ikan asin mentah yang akan diolah menjadi abon atau sambal seberat satu kilogram.

Nelayan perempuan di Torosiaje.  
Mereka dikenal sebagai pelaut tangguh  
- Mongabay



Pada saat pandemi ini, di tengah maraknya pemecatan buruh perusahaan dan merosotnya harga komoditas, Wati mengaku tidak begitu merasakan dampaknya. Sebab, usaha yang dia lakukan dengan mengolah komoditas pangan, masih mendapat banyak pesanan dari luar dan pasti laku saat diecer di lingkungannya.

“Suami saya waktu pandemi (COVID 19) awal-awal itu sampai tidak kerja, karena harga ikan waktu itu kan turun. Karena usaha ini, *alhamdulillah*, saya bisa membantu uang untuk modal memulai lagi usahanya,” kata Wati.

Membuat olahan mangrove dan ikan asin baginya bukan pekerjaan tambahan yang memberatkan, karena pekerjaan itu berhubungan dengan dapur yang memang menjadi tempat bekerjanya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga.

### PERSAHABATAN UTARA DAN SELATAN

Tapi, justru dengan usaha barunya itu, dia merasa tidak menjadi ibu rumah tangga biasa. Dia mempunyai penghasilan sendiri, tidak menggantungkan diri dari penghasilan suaminya sehingga bisa mengaburkan posisi politisnya dalam rumah tangga.

“Kerjanya juga biasa, tidak terlalu sibuk. Saya masih bisa memasak untuk keluarga, mencuci pakaian, membersihkan rumah dan berbagai jenis pekerjaan rumah lainnya. Di sisi lain saya bisa mendapat penghasilan sendiri,” sambung Wati.

Usaha yang tampak menjanjikan bagi Wati dan perempuan Torosiaje ini bukan tanpa kendala dan tantangan. Wati sendiri mengaku masih membutuhkan berbagai bentuk dukungan untuk melancarkan usahanya.

Dari segi produksi, dia dan kelompoknya masih kekurangan fasilitas seperti alat penggilingan, alat masak dan alat pengemasan. Hal ini akan membuatnya kesulitan jika tiba-tiba ada pemesanan dalam jumlah banyak, juga karena dia dan kelompoknya hanya menggunakan dapur sendiri untuk produksi. Mereka sering gagal untuk mendapat bantuan atau pinjaman modal, karena salah satu syarat harus mempunyai rumah produksi.

“Seandainya saja saya diberi bantuan misalnya 20 juta dari pemerintah mungkin saya bisa bersaing dengan UMKM-UMKM yang ada di kota,” ucap Wati.

Kemudian, dari segi *branding*, Wati menilai produknya masih kalah jauh dengan produk-produk lain yang beredar di toko oleh-oleh di pusat-pusat perbelanjaan. Sebagai ibu rumah tangga yang memantau



Kirsi Chavda, pemerhati lingkungan dari Siemenpuu Foundation Finlandia sedang melakukan penanaman mangrove bersama masyarakat Desa Torosiaje Serumpun - JAPESDA



secara ketat persaingan di pasar kuliner dan oleh-oleh, Wati sadar betul bagaimana produk itu tidak terkesan murahan karena *branding* yang dirancang sesuai dengan preferensi pasar. Sementara dari segi pemasaran, sejauh ini Wati masih mengandalkan jaringan yang telah ada, belum terpasarkan secara luas.

Kemandirian ekonomi penting untuk para perempuan agar kesetaraan gender bisa dicapai. Sebagaimana yang dikatakan Sri Dewi Jayanti Biahimo, *District Facilitator* untuk program *National Support for Local Investment Climate (NSLIC)* Gorontalo, yang turut membantu JAPESDA dalam mengintervensi pengembangan kreativitas perempuan Torosiaje.

“Ketika dia ditinggal suami atau anggota laki-laki dalam rumah tangga, istri atau perempuan ini bisa mengisi kebutuhan ekonomi tanpa kelabakan,” kata Dewi.

Dewi juga mengatakan, masih banyak yang perlu dilakukan agar perempuan pesisir seperti yang ada di Torosiaje bisa benar-benar mempunyai posisi setara secara ekonomi.

Selain memberikan mereka pengetahuan dan fasilitas, juga harus dilanjutkan dengan upaya-upaya untuk menciptakan keberlanjutan. Karena kebanyakan masalah yang menimpa usaha-usaha kecil masyarakat, akan pupus tidak lama setelah usaha itu digembar-gemborkan sebagai keberhasilan oleh pemerintah maupun lembaga program terkait.

“Upaya itu bisa berupa membuat koperasi berbasis komunitas untuk menunjang kebutuhan modal dan pengembangan usaha. Selain itu, yang paling penting menjamin pasar agar produk yang mereka olah bisa terus dibeli orang,” kata Dewi, menjelaskan.

Selain masalah yang bersifat ekonomis itu, ada masalah mendasar lainnya yang patut diperhatikan. Sebuah penelitian tentang mata

pencaharian masyarakat pesisir yang pengumpulan datanya dilakukan sejak 1998 sampai 2007 di bagian Timur Indonesia, termasuk Sulawesi, mengkritik apa yang dilakukan oleh pemerintah dan *Non Government Organization (NGO)* lingkungan terkait pelibatan perempuan ini.

Menurut penelitian itu, perempuan pesisir memang sering dilibatkan dalam setiap program, tapi keterlibatannya cenderung pasif, yakni hanya sebagai objek program alih-alih subjek yang akan menentukan bagaimana program tentang perempuan berjalan<sup>28</sup>.

Kritik lainnya adalah program-program tersebut tidak mencoba melawan norma yang ada dalam komunitas-komunitas pesisir yang cenderung patriarkis. Sebaliknya, malah mengakomodasi nilai-nilai tersebut, yang penting perempuan sudah dilibatkan.

Apa yang dilakukan Wati dan kelompok perempuan Torosiaje hanyalah langkah awal untuk mendobrak kesenjangan ekonomi berbasis gender yang menimpa masyarakat-masyarakat pesisir.

Masih banyak perempuan Torosiaje dan wilayah pesisir lain yang bernasib sama dengan Simin, menjadi korban pemiskinan struktural dan kultural akibat tak adilnya akses terhadap sumber daya pesisir. Memarjinalkan perempuan hanya akan semakin memperburuk kondisi masyarakat pesisir Indonesia. #



# Menyelamatkan Cagar Alam untuk Bentang Hutan Mangrove

Oleh: Renal Husa



**CAGAR ALAM TANJUNG PANJANG** sedang merintih, kondisinya kini tengah sekarat akibat alih fungsi yang terjadi. Membayangkan pohon-pohon menjulang tinggi dengan diameter besar seperti cagar alam pada umumnya, hanya tinggal anangan belaka di tempat ini. Kawasan konservasi itu telah berganti rupa menjadi kawasan tambak.

Cagar Alam Tanjung Panjang (CATP) terletak di Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo ditetapkan sebagai kawasan konservasi dengan fungsi sebagai cagar alam pada 2015, melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9612/MENLHK-PKTL/KUH/2015, dengan luasan 3.174,10 hektar.

*Mangrove rusak di dalam Cagar Alam Tanjung Panjang*





**Mereka yang Terdampak**

Alih fungsi hutan mangrove menjadi tambak di tempat ini telah terjadi sejak 1980-an. Masyarakat menjamah tempat itu, lalu merubahnya menjadi kawasan tambak perikanan budidaya ikan bandeng dan udang. CATP kini menjadi satu-satunya cagar alam di Provinsi Gorontalo yang tidak memiliki bentangan hutan pada wilayahnya.

Rusaknya CATP ikut berpengaruh hingga merambah ke kawasan hutan mangrove yang berada di kawasan hutan lindung. Padahal cagar alam adalah tingkatan tertinggi dalam upaya konservasi hutan berdasarkan undang-undang kehutanan. Di dalam sebuah cagar alam, menurut undang-undang, tidak dibenarkan sembarangan melakukan aktivitas apapun, terutama di zona inti, apalagi jika telah melakukan perubahan fungsi lahan.

Lemahnya penegakan hukum ditengarai menjadi sebab terhadap perambahan kawasan hutan dan kawasan konservasi. Tanggung jawab pemangku kawasan dipertanyakan terhadap pengelolaan hutan mangrove yang amburadul di wilayah tersebut, terutama Kementerian Kehutanan sebagai pemegang otoritas atas kawasan ini.

Dalam UU Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dijelaskan, cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.



**Kawasan mangrove di Torosiaje tahun 2019 tampak dari atas - JAPESDA**



Alasan utama ditetapkannya kawasan CATP, karena memiliki bentangan hutan mangrove yang luas dan menjadi salah satu kawasan serapan karbon untuk Kabupaten Pohuwato.

Di CATP juga terdapat ekosistem flora, fauna dan beragam biota yang penting dijaga dan dilestarikan. Sementara pemanfaatan untuk kawasan ini hanya sebatas pada penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan penyadartahuan konservasi alam, penyerapan dan penyimpanan karbon serta pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya (Allo Noel Layuk, 2019).

Berlainan dengan fungsi kawasan yang dimaksud dalam UU, kontras dengan yang terjadi di CATP. Nasib CATP kini tengah kritis, merintih di tengah alih fungsi. Keragaman hayati dan ekosistem hutan mangrove di CATP terancam mati.

Saat kawasan Tanjung Panjang ditetapkan sebagai cagar alam, Jaringan Advokasi Pengelolaan Sumberdaya Alam (JAPESDA), salah satu organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada isu lingkungan menuliskan jika luasnya saat itu hanya tersisa sekitar 600 hektar dari luas wilayahnya. Sementara di tahun 2017 luasannya hanya tersisa sebanyak 451,92 hektar<sup>29</sup>, sisanya telah beralih fungsi menjadi kawasan tambak udang dan ikan.

Seiring dengan kerusakan yang terjadi di CATP, berbagai pernyataan sikap mulai muncul untuk mempertahankan kawasan konservasi itu. Suara-suara protes itu datang dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi dan pemerhati lingkungan, termasuk JAPESDA.

Mereka menuntut tentang kepedulian terhadap kawasan hutan mangrove, serta kawasan konservasi di CATP yang kian

kritis dan status kawasannya harus dipertahankan. Mereka juga meminta adanya penegakan hukum pada kawasan konservasi tersebut.

Menyikapi protes tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato menerbitkan surat keputusan tentang pelarangan pembukaan lahan tambak baru hingga renovasi tambak yang berada di kawasan hutan mangrove di wilayah Kabupaten Pohuwato. Surat instruksi Bupati Tahun 2010, 2012 dan 2014 itu disebarakan kepada semua kepala desa, terutama desa-desa yang berada di kawasan mangrove<sup>30</sup>.

Namun, surat keputusan ini nampaknya tidak menjadi dasar yang kuat untuk menghentikan pembukaan lahan tambak baru di Pohuwato. Kawasan mangrove terus terdegradasi. Pembukaan lahan tambak baru yang berada di hutan lindung masih terus terjadi. Sedangkan di CATP, alat berat

### Mereka yang Terdampak

jenis eskavator masih tetap leluasa keluar masuk memperbaiki tambak yang ada di sana<sup>31</sup>.

Seperti ada sebuah pembiaran yang terjadi disana, instruksi Bupati terkesan hanyalah sebuah sandiwara, yang penting sudah mengeluarkan surat, tetapi implementasi dari surat-surat tersebut dibiarkan tanpa ada upaya-upaya penegakan hukum dalam pelaksanaannya.

### Dari Kawasan Mangrove Menjadi Kawasan Budidaya Tambak

Provinsi Gorontalo terdiri dari lima kabupaten dan satu kota. Hanya ada tiga kabupaten yang memiliki bentangan hutan mangrove cukup luas, yaitu Kabupaten Gorontalo

Utara, Boalemo dan Pohuwato. Dua kabupaten lainnya cenderung sedikit mangrovenya. Sementara bentangan mangrove terluas di Provinsi Gorontalo berada di Kabupaten Pohuwato. Tak hanya sebagai kawasan hutan mangrove terluas, Kabupaten Pohuwato juga menjadi penyumbang angka kerusakan mangrove terbesar di Gorontalo.

Dari waktu ke waktu, perlahan-lahan bentangan mangrove mulai menyusut dan menghilang. Ada banyak faktor yang mengakibatkan hilangnya bentangan hutan mangrove. Akan tetapi, sebagian besar bersumber dari pemanfaatan lahan dan alih fungsi yang dilakukan secara masif dan ilegal untuk pembukaan tambak bandeng dan udang.

Para siswa menuju ke lokasi penanaman mangrove di kawasan CATP - JAPESDA



Dalam penelitian *Sustainable Coastal Livelihoods and Management (SUSCLAM)* yang dipublikasikan pada 2011, menyatakan bahwa pada 1988 terdapat 13.242,33 hektar bentangan hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato, sementara pada 2011 separuh luasannya menyusut menjadi 7.420,73 hektar. Penyusutan mangrove di Pohuwato masih terus berlangsung dan terjadi secara terselubung hingga saat ini.

Dari catatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XV Gorontalo, pada 2015 masih terdapat mangrove seluas 6.608 hektar di Pohuwato, sementara pada 2017 mengalami penyusutan sebanyak 1.859 hektar, hingga luasan mangrove yang ada hanya tersisa sebanyak 4.749 hektar.

Hilangnya bentangan mangrove di Pohuwato merupakan potret buruk terhadap pengelolaan kawasan mangrove di Provinsi Gorontalo. Padahal, bentangan mangrove sangat penting untuk ekosistem pesisir dan serapan karbon, terlebih lagi Provinsi Gorontalo masuk dalam kawasan Teluk Tomini yang terkenal dengan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Hilangnya bentangan mangrove ini tentu akan mempengaruhi ekosistem tersebut.

Luasan hutan mangrove yang berganti menjadi tambak di Pohuwato, tersebar di 9 dari total 13 kecamatan di Pohuwato. Dari hasil pendataan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pohuwato pada 2017, terdapat kawasan tambak budidaya udang dan ikan seluas 4.470,80 hektar yang tersebar di tujuh kecamatan. Luasannya hampir separuh dari bentangan hutan mangrove yang tersisa di tahun itu.

### PERSAHABATAN UTARA DAN SELATAN

Tujuh kecamatan yang tercatat memiliki luasan mangrove tersebut adalah Patilanggio seluas 1.051,68 hektar, Wanggarasi 1.049,53 hektar, Paguat 166,182 hektar, Lemito 834,70 hektar, Popayato Barat 710,10 hektar, Popayato 507,97 hektar dan Popayato Timur seluas 151,125 hektar.

Data tersebut belum termasuk tiga kecamatan, yakni Marisa, Duhiadaa dan Randangan. Sementara itu, dari tujuh kecamatan yang tercatat, terdapat setidaknya 2.789,84 hektar luasan kawasan tambak budidaya udang dan ikan yang masuk pada kawasan hutan lindung.

### Nasib Hutan Mangrove Masa Mendatang

Hasil pengolahan citra satelit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, pada 2019, telah terdapat bukaan lahan sebesar 93,31% di wilayah CATP<sup>32</sup>. Bukaan lahan didominasi kawasan budidaya tambak bandeng dan udang.

Padahal, penetapan Tanjung Panjang menjadi kawasan konservasi telah dimulai dan berlangsung sejak 1984. Saat itu, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 250/Kpts-II/1984, tanggal 20 Desember 1984, Tanjung Panjang ditunjuk sebagai areal hutan di Wilayah Provinsi Dati I Sulawesi Utara (saat ini menjadi Provinsi Gorontalo), dengan luasan 1.877,22 hektar.

Tujuh tahun berselang dilakukan penataan batas kawasan Tanjung Panjang berdasarkan berita acara tanggal 8 November 1991. Ditetapkan pada 1995 dengan Surat

### Mereka yang Terdampak

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 573/Kpts-II/1995 tanggal 30 Oktober, seluas 3.000 hektar.

Kemudian pada 1999 ditunjuk kembali sebagai kawasan hutan dengan fungsi sebagai cagar alam bersama kawasan hutan lainnya. Melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan dengan Nomor 452/Kpts-II/1999 pada 17 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Dati I Sulawesi Utara.

Selanjutnya, pada 2010, Tanjung Panjang kembali ditunjuk sebagai hutan dengan fungsi sebagai cagar alam, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor 325/Menhut-II/2010 pada 29 Mei 2010, tentang penunjukan kawasan hutan di Provinsi Gorontalo.

Ditetapkannya kembali Tanjung Panjang sebagai hutan dengan fungsi cagar alam adalah hasil peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo pada 1999. Hingga akhirnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9612/MENLHK-PKTL/KUH/2015, dengan luasan 3.174,10 hektar pada 2015.

Dalam perjalanan alot penetapan kawasan itu, perubahan juga berjalan dan mulai berlangsung di CATP. Alih fungsi kawasan hutan mangrove menjadi kawasan budidaya udang dan bandeng berjalan beriringan dengan penetapan kawasan konservasi CATP.

Dimulai sejak 1990-an, penambahan kawasan konservasi mulai masif terjadi pada 2000, dan berlangsung secara cepat hingga 2016<sup>33</sup>. Pada 2016 kawasan

konservasi itu telah seutuhnya berganti rupa menjadi kawasan tambak.

Sebagai pemangku kawasan Konservasi CATP, Kepala Seksi BKSDA Sulawesi Utara Wilayah II Gorontalo, Sjamsuddin Hadju mengakui baru mengetahui jika bentangan hutan mangrove di Tanjung Panjang masuk pada kawasan cagar alam yang berada di wilayah kerja mereka pada 2010.

Setelah mengetahui hal tersebut, mereka bergerak cepat dan mulai aktif melakukan patroli serta membangun kantor resort di Desa Huyula, Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato pada 2014 (Dako, 2018)<sup>34</sup>. Namun, Sjam mengatakan sebagian besar tapal batas di CATP telah hilang.

Pihaknya kemudian menyurati BPKH untuk melakukan rekonstruksi batas kawasan, dan pada 2010 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 325/Menhut-II/2010 dikeluarkan untuk melakukan penataan batas kawasan di CATP. Proses itu berlangsung selama lima tahun dan melahirkan Surat MENLHK tahun 2015 tentang penetapan kawasan CATP.

Setelah rekonstruksi batas kawasan dan pemasangan ulang tapal batas telah rampung, mereka mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat petambak yang menduduki kawasan konservasi CATP. Sosialisasi mulai dilakukan khususnya kepada warga petambak, pemerintah desa dan kecamatan.

Sosialisasi hanya sebatas angin lalu ditelinga masyarakat, mereka telah merasa nyaman atas kepemilikan lahan yang dikelola, karena mereka



Kolaborasi mahasiswa-BKSDA-penambak melakukan penanaman mangrove di kawasan CATP - JAPESDA



mengaku telah menggarap tambak lebih dulu sebelum cagar alam ditetapkan.

Seperti yang diungkapkan Baba, pria penambak berusia 45 tahun di Desa Siduwonge, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato. Baba adalah warga asal Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan.

Sejak datang ke Desa Siduwonge tahun 2003, dia langsung bertambak dengan membeli lahan dari warga setempat seluas 8 hektar yang dihargai sebesar Rp 20 juta. Dia membeli lahan tambak itu dengan menjual aset di kampung halamannya. Alasan itulah yang membuat dia dan sebagian besar warga petambak yang menduduki CATP keberatan untuk melepaskan tanah garapan mereka<sup>35</sup>.

Alasan lainnya, menurut mereka, sejak awal tidak ada papan pemberitahuan atau tapal batas yang menandakan jika lahan tersebut adalah kawasan konservasi

CATP. Papan pemberitahuan kawasan CATP baru dipasang sekitar tahun 2017-2018.

“Dulu lahan saya tidak masuk cagar alam, kenapa sudah berhasil seperti sekarang baru masuk cagar alam?” ungkap Baba, geram. Bisa Jadi Baba belum mengetahui persis batas kawasan cagar alam sehingga dia berkata demikian.

### Melepas atau Mempertahankan Kawasan Konservasi Melalui TORA

Setelah melakukan sosialisasi, pihak BKSDA mengambil langkah represif dengan melakukan tindakan penegakan hukum kepada penambak yang menggarap lahan di CATP yang dilakukan pada 25-26 Oktober 2016. Dalam periode tersebut, mereka merubuhkan dangau—gubuk atau rumah kecil—serta membuka pintu air dari tambak yang berada dalam kawasan konservasi CATP.

### Mereka yang Terdampak

Masyarakat penambak yang tergabung dalam Serikat Petani Tambak (SPT) Gorontalo keberatan dan melakukan perlawanan balik. Mereka mengadu ke Presiden Republik Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk meminta perlindungan terhadap penggusuran yang mereka alami. SPT Gorontalo melalui Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)<sup>36</sup> mengirimkan surat protes dan aduan dengan Nomor 290/Seknas-KPA/XI/2017 terhadap operasi represif yang dilakukan saat itu.

Inti dari poin-poin surat yang dilayangkan ke Komnas HAM tersebut meminta perlindungan dari Komnas HAM terkait rencana penggusuran paksa terhadap anggota SPT Gorontalo yang menduduki areal tambak di kawasan CATP. Karena menurut mereka, penambak telah lebih dulu memiliki dan mengelola lahan tambak di Tanjung Panjang, sebelum SK tentang penetapan kawasan cagar alam diterbitkan. Dalam surat itu juga, mereka meminta kepada Presiden Republik Indonesia agar memasukan lahan tambak yang telah mereka kuasai ke dalam lokasi prioritas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Satu bulan kemudian, Pemerintah Daerah Pohuwato, menerima surat dari Komnas HAM Nomor 1826/K-PMP/XII/2017, tentang permintaan penyampaian tanggapan dan klarifikasi terhadap operasi represif yang dilakukan saat itu. Dalam surat tersebut juga, Komnas HAM, meminta dokumen-dokumen tentang penetapan status CATP untuk dipelajari sebelum memberikan rekomendasi atas laporan yang diterima Komnas HAM dari SPT Gorontalo.

Pemerintah Kabupaten Pohuwato secara telak membantah tuduhan atas surat yang dilayangkan SPT Gorontalo, melalui KPA kepada Komnas HAM, dalam surat klarifikasi Nomor 800/sep/75/I/2018. Pemerintah Kabupaten Pohuwato tidak membenarkan jika penambak telah menguasai lahan tambak udang dan ikan yang mereka kelola sebelum Tanjung Panjang ditetapkan sebagai cagar alam. Mereka juga mengatakan jika penggusuran paksa perlu dilakukan jika memasuki kawasan hutan tanpa izin sesuai dengan amanat undang-undang. Semangat mempertahankan kawasan CATP mulai memudar



*Hutan mangrove di pesisir Teluk Tomini yang berada di kawasan Cagar Alam Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo terancam tambak udang dan bandeng. Foto: Christopel Paino/Mongabay Indonesia*



bersamaan dengan surat aduan SPT Gorontalo tersebut. Terlebih lagi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan dengan Nomor 8716/Menlhk-PKTL/PLA.2/XII/2018 tentang peta indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA. Sementara CATP adalah salah satu kawasan hutan yang masuk pada peta indikatif tersebut. Peta indikatif adalah peta yang menjadi rujukan untuk penentuan lokasi kawasan TORA atau PS. Kalau disetujui izinnnya, lokasi ini akan berubah sesuai dengan izin yang diajukan oleh masyarakat.

TORA sendiri seperti yang terpatri pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk penyelesaian masalah dalam kawasan hutan. Sementara tujuh poin dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 menjelaskan jika TORA adalah alat hukum untuk mengurangi ketimpangan

### PERSAHABATAN UTARA DAN SELATAN

penguasaan atas kepemilikan tanah untuk menciptakan keadilan, menangani sengketa dan konflik agraria, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan hingga memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Menanggapi surat keputusan tentang masuknya CATP ke dalam peta indikatif TORA, JAPESDA bersama sejumlah LSM, akademisi, mahasiswa, komunitas pecinta alam dan organisasi jurnalis di Gorontalo membentuk organisasi taktis yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Penyelamatan Cagar Alam Tanjung Panjang. Mereka mengirimkan surat protes kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor 001/AMSP-CATP/III/2019 karena telah memasukan CATP pada peta indikatif TORA (Paino, 2020). Aliansi masyarakat sipil menuding negara lepas tangan atas penyelesaian konflik dan perambahan kawasan hutan mangrove yang ada di CATP.

Nurain Lapolo, Direktur JAPESDA Gorontalo mengungkapkan bahwa status CATP sebagai kawasan konservasi harus dipertahankan. Jika dilepas, kata dia, akan menjadi contoh lemahnya penegakan hukum terhadap perambahan kawasan hutan mangrove yang ada di Gorontalo. Impunitas akan terjadi kepada perambah hutan mangrove di Gorontalo. Disisi lain, dia mengungkapkan jika keputusan tersebut tidak sesuai dengan amanat undang-undang terhadap TORA.

“Karena ada banyak masyarakat pendatang yang menguasai lahan di CATP. Selain itu, lahan yang dikuasai oleh penambak yang ada disana memiliki luasan diatas 10 hektar, bahkan ada orang yang

### Mereka yang Terdampak

menguasai lahan hingga 100 hektar luasnya,” ungkap Nurain.

Alasan lainnya, masyarakat nelayan di desa-desa sekitar CATP banyak kehilangan pekerjaan akibat berubahnya wilayah tangkapan mereka menjadi kawasan budidaya tambak. Bahkan tidak menutup kemungkinan Kabupaten Pohuwato akan kehilangan bentangan hutan mangrove jika status kawasan CATP sebagai kawasan konservasi tidak berhasil dipertahankan dan dipulihkan, terang Nurain.

Persentase kemiskinan di Pohuwato dalam laporan Bappeda Provinsi Gorontalo tahun 2019, mencapai 21,27 persen pada 2017, membuat Kabupaten Pohuwato menjadi kabupaten kedua yang menyumbang angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo tahun itu. Sementara pada 2018, turun

menjadi 19,4 persen dan pada 2019 menjadi 18,16 persen. Pada 2019, Kabupaten Pohuwato berada di posisi ketiga yang menyumbang persentase kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Akibatnya pada 2019, Provinsi Gorontalo berada pada posisi kelima dengan tingkat kemiskinan tertinggi<sup>37</sup>.

Setelah mendapat protes keras dari Aliansi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Cagar Alam Tanjung Panjang, rapat pembahasan permasalahan TORA di CATP mulai dibahas di tingkat kementerian. Inti dari kesimpulan dalam rapat hari itu adalah tetap menjalankan inventarisasi Permasalahan Tanah dalam Kawasan Hutan (PTKH), agar mendapatkan data penguasaan lahan yang akan digunakan untuk penyelesaian permasalahan tambak di kawasan CATP, serta menjalankan rapat tertutup dan

terbuka. Rapat tertutup dihadiri oleh pemerintah pusat dan daerah Sementara rapat terbuka dihadiri oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait.

Pada akhirnya, hasil pelaksanaan rapat terbuka dan rapat tertutup yang dilaksanakan di Gorontalo, semua pihak mufakat untuk mempertahankan status kawasan konservasi di CATP dengan kegiatan sesuai fungsi dan peruntukannya.

### Mulai Menanam Kehidupan di Kawasan Konservasi

Sekitar pukul 10 pagi, puluhan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Randangan bersama pegiat lingkungan yang tergabung dalam organisasi JAPESDA, Biodiversitas Gorontalo (BIOTA), BKSDA Seksi Wilayah II Gorontalo, melakukan kegiatan pengamatan burung migran dan penanaman mangrove di kawasan konservasi CATP pada 9 Februari 2020<sup>38</sup>.

### PERSAHABATAN UTARA DAN SELATAN

Wajah riang terlihat dari pelajar yang datang, sebab pengamatan burung dan penanaman mangrove adalah pengalaman pertama untuk mereka. Suasana saat itu sejenak menutup kisah kelam tentang alih fungsi kawasan konservasi dan konflik tenurial yang sedang berlangsung di CATP. Setidaknya ada sekitar 100 pohon mangrove yang mereka tanam di pematang tambak hari itu. Tidak banyak memang, tapi cukup untuk memberi hidup dan semangat baru bagi kawasan konservasi CATP yang tengah sekarat.

Dalam semangat yang sama di bulan yang berbeda, BKSDA Seksi Wilayah II Gorontalo, JAPESDA dan puluhan mahasiswa Jurusan Biologi, Universitas Negeri Gorontalo, melakukan penanaman mangrove di kawasan CATP pada 1 Oktober 2020.

Berbeda dengan penanaman mangrove sebelumnya, sebanyak 3000 bibit mangrove jenis *Rhizophora mucronata* ditanami pada lahan seluas 10 hektar di kawasan CATP. Penanaman mangrove yang berlangsung saat itu adalah penanaman terbesar setelah proses panjang konflik tenurial di CATP berakhir dengan kata sepakat untuk mempertahankan status kawasan sebagai kawasan konservasi.

Namun cerita pilu dari alih fungsi belum usai, wajah CATP masih saja buram kehilangan bentuk. Bukaan lahan masih terpampang nyata di sana. Nasib petambak yang menguasai kawasan konservasi itu juga belum ditentukan. Dengan begitu konflik tenurial yang sedang terjadi disana belum benar-benar dikatakan selesai. #

Nelayan dari Suku Bajo di pesisir Teluk Tomini, tepatnya di kampung Torosiaje, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, memanfaatkan mangrove untuk mencari ikan. Foto: Christophe Paino/Mongabay Indonesia



# Mengadu Nasib di Kawasan Terlarang

Oleh: Defri Sofyan



**CAGAR ALAM TANJUNG PANJANG (CATP)** mempunyai alasan tepat untuk namanya. Kawasan itu memang sangatlah “panjang” untuk bibir pantai yang menjadi habitat puluhan jenis pohon mangrove beserta beragam spesies fauna dan flora khas pesisir. Bahkan dipercaya sebagai kawasan mangrove terbesar se-Teluk Tomini. Kekayaan ekosistem mangrove itulah yang mendorong pemerintah untuk menetapkannya sebagai cagar alam (CA), salah satu status konservasi terketat yang ada di Indonesia.

Namun, ironisnya, nyaris bersamaan dengan penetapannya sebagai cagar alam, Tanjung Panjang diserbu beramai-ramai oleh penduduk lokal yang melihat ada peluang usaha menjanjikan yang menunggu untuk disambangi, yakni tambak budidaya udang dan tambak garam.

*Mangrove mati di dalam tambak Siduwonge*





Ambo Dale sedang mengeruk kristal garam di tambak garam - JAPESDA



Menurut penuturan warga di sana, “penyerbuan” itu bermula pada 1980-an akhir hingga 1990-an awal. Waktu itu penduduk lokal membentuk kelompok-kelompok yang terdiri dari 20-30-an orang setiap kelompoknya. Mereka melakukan survei, memilih lokasi sampai melakukan perintisan. Perintisan ini dulunya dilakukan hanya dengan menggunakan tenaga manusia, mengingat kondisi saat itu infrastruktur transportasi darat masih belum mendukung.

Setelah perintisan awal, penambak lazim melakukan perluasan dan perawatan tambak dengan bantuan alat berat, tapi ada juga dengan

hanya menggunakan tenaga manusia, bergantung dari modal, luas lahan yang akan dibuka dan tegakan mangrove yang menjadi halangan.

Djafar Papempang, warga Desa Siduwonge yang menyaksikan perubahan kawasan itu menuturkan, saat itu perintisan dilakukan kebanyakan tidak sampai menjadi tambak, baru sebatas lahan yang sudah ditebangi pohon mangrovenya tapi belum ada pematang untuk pengkavelingan. Lahan inilah yang selanjutnya dijual kepada pembeli dari Sulawesi Selatan.

Dalam sebuah tulisan Basri Amin<sup>39</sup>, warga lokal tidak sekonyong-konyong berinisiatif secara mandiri membuka lahan-lahan calon tambak itu. Banyak aktor yang terlibat, termasuk pemerintah yang pada 2009 menyetujui pembukaan lahan untuk tambak seluas 200 hektar menggunakan alat berat.

Hasil dari alih fungsi itu terbilang cukup besar, dari dulunya 3 ribu hektar hutan mangrove kini tersisa hanya 600 hektar<sup>40</sup> saja, sisanya tambak. Sebagai gambaran, pada 2019 menurut data dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pohuwato, tambak di Tanjung Panjang menghasilkan 8.965 ton hasil perikanan budidaya, dan garam sebanyak 2.434 ton.

Saat ini kita masih bisa melihat bagaimana mangrove-mangrove itu mati. Pemandangan tegakan mangrove dengan berbagai ukuran dalam kondisi kering kerontang berada di antara lautan tambak terlihat hampir di semua area Tanjung Panjang. Mati oleh air yang senantiasa tergenang akibat penambakan.

Pemandangan horor itu sejenak akan teralihkan ketika kita melihat mobil mewah lewat di jalan desa yang berbatu dan berlubang. Membuat kita bertanya, siapa orang kaya yang tinggal di tempat ini? Jalanan belum teraspal, listrik belum terpasang di semua rumah, fasilitas air bersih belum terbangun, dan juga jauh dari perkotaan. Sesampai di pemukiman, bukan hanya mobil dan motor mewah yang akan kita lihat, tapi juga rumah-rumah megah yang berdiri kontras di antara lanskap rawa dan tambak.

Para penghuninya adalah para pengusaha tambak asal Sulawesi Selatan yang sudah lama berdomisili di Desa Siduwonge dan sekitarnya. Mereka adalah “contoh sukses” dari usaha pertambakan Tanjung Panjang. Penambak asal Sulawesi Selatan memang menjadi aktor dominan, namun tentu saja bukan aktor tunggal. Karena pertama kali yang membuka lahan tambak adalah penduduk lokal yang dalam prosesnya bahkan difasilitasi pemerintah daerah dan oknum aparat keamanan<sup>41</sup>.

Penambak asal Sulawesi Selatan ini memang ada sejak awal Tanjung Panjang dibuka, tapi hanya beberapa orang dan baru bertambak garam. Seiring waktu, gelombang kedatangan mulai meningkat dan akhirnya mendominasi usaha tambak di Tanjung Panjang.

**Mereka yang Terdampak**

Menurut sosiolog Basri Amin<sup>42</sup>, dominasi penambak asal Sulawesi Selatan ini berhasil karena mereka mempunyai modal, keahlian, jaringan pasar dan dukungan pengusaha besar. Semua ini adalah hal yang tidak dimiliki penduduk lokal yang selama ini terbiasa dengan profesi nelayan tangkap atau petani daratan.

Apa yang disimpulkan Basri memang tidak terjadi secara instan, bahwa dalam prosesnya para pendatang ini juga seperti berjudi dengan nasib, banyak dari mereka meninggalkan kampung halaman dengan kondisi yang juga tidak mempunyai modal besar pada awalnya. Beberapa bahkan harus balik ke kampung karena tidak berhasil.

Ambo Dale misalnya, sebagai contoh yang “berhasil”, datang sebagai penggarap, sekarang menjadi pemilik tambak. “Saya datang sebagai penggarap, kasihan, tak punya uang saya mau beli empang,” kata Ambo sambil tertawa.

Datang sebagai penggarap saat itu Ambo Dale dan istrinya tinggal di gubuk tak layak huni dan hanya mempunyai satu unit sepeda motor butut sebagai satu-satunya aset.

“Pondok saya itu atapnya bocor, lantainya tanah, dindingnya papan keropos. Kalau hujan pasti sibuk cari tampungan agar tidak becek, juga nanti airnya untuk diminum karena memang susah air. Sementara motor saya gunakan untuk mengojek orang-orang di sini, lumayan untuk makan sehari-hari,” kata Ambo bercerita.

Sekarang Ambo Dale telah memiliki sekira 4.402 hektar tambak, tambak budidaya juga

tambak garam, hasilnya Ambo bisa membangun rumah yang layak huni dan membeli beberapa unit kendaraan, juga membangun unit-unit usaha yang lain, seperti sarang burung walet.

Ada banyak yang sama dengan Ambo Dale. Datang sebagai penggarap, kalau berhasil menetap dan menjadi “bos” tambak, kalau tidak terpaksa pulang kampung atau mencari sumber penghidupan lain. Penggarap adalah buruh, mereka hanya menyediakan tenaga kerjanya untuk menggarap di tambak orang. Bagi hasil penggarap tidak punya standar baku, tapi umumnya 20% dari laba bersih penjualan hasil tambak. Kerja mereka seperti buruh tani daratan yang mengerjakan semuanya di tambak tapi tanpa hak milik.

Abdul Gani misalnya, belum genap dua tahun pada Maret 2021 lalu dia meninggalkan Pangkep kampung halamannya untuk menjadi buruh penggarap di dua petak tambak di Desa Siduwonge. Berbekal ajakan dan informasi dari kerabatnya, dia nekat datang memboyong istri bersama dua anaknya yang masih balita.

“Yang mendorong saya merantau ke sini itu karena di sana juga saya tidak punya pekerjaan tetap, penghasilan yang saya dapat pun kurang memenuhi kebutuhan hidup saya dan keluarga,” kata Gani.

Gani bekerja serabutan di kampungnya, menjadi kuli bangunan dan juga penggarap di tambak orang. Karena penghasilan yang minim dan diajak seorang keluarganya yang bekerja sebagai penggarap di Tanjung Panjang, dia pun memutuskan untuk mengadu peruntungannya. “Saya tidak kenal



**Abdul Gani sedang mengisi air tambak dan menangkap 2 ikan yang melawan arus air di pintu tambak - JAPESDA**



dengan bos ini, yang saya kenal di sini hanya keluarga yang mengajak saya, sampai sekarang pun saya tidak pernah tahu rumah bos saya di mana.”

Gani datang tentu dengan membawa harapan, harapan yang tak jauh berbeda dengan harapan penggarap-perantau lainnya. Dia ingin segera mendapat modal, berusaha secara mandiri, hasilnya bisa menghidupi keluarganya dengan layak.

“Ya, intinya kalau sudah ada modal kan saya bisa usaha apapun yang saya inginkan, entah beli tanah atau berkebun, yang penting, mudah-mudahan saya bisa mendapat modal.”

Namun jauh panggang dari api, maksimal upah yang dia terima

dari bagi hasil tambak setiap bulan hanya sebanyak dua juta rupiah, dia bahkan mengibaratkannya dengan: “habis bulan, habis gaji”. Tak jarang dia harus meminjam uang ke bosnya di awal bulan karena gaji yang diterima tak cukup untuk memenuhi kebutuhannya pada bulan lalu.

Sebabnya tambak yang dia garap sering bermasalah, tanggul sering jebol sehingga bibit bisa hanyut terbawa arus, hasil panen pun otomatis berkurang. Karena hanya menggunakan alat sederhana, setiap saat dia harus menambal jebolan tanggul. Menurutnya tambak yang dia kelola bisa bagus kondisinya kalau dikerjakan dengan alat berat, tapi itu mustahil karena sudah dilarang. Dengan kondisi seperti itu memiliki modal untuk memulai usaha mandiri



**Mereka yang Terdampak**

masih menjadi sekadar mimpi baginya.

Cerita Ambo Dale, Abdul Gani dan para penambak pendarang di Tanjung Panjang adalah cerita tentang manusia yang sekadar ingin mencari penghidupan yang layak. Akan berbeda tentunya jika dibandingkan dengan motif korporasi-korporasi besar ketika mengeksploitasi sumber daya alam.

Dampak dari alih fungsi Tanjung Panjang juga membawa malapetaka ekologis tentu tak bisa dibantah, tapi mengatasinya harus dengan pendekatan yang berbeda. Juga jangan lupa dengan absennya pemerintah dalam mengawasi kawasan itu sejak ditetapkan sebagai cagar alam pada 1984 hingga 2010. Salah satu faktor yang menyebabkan alih fungsi kawasan berkembang pesat.

Menurut kesaksian Ambo Dale yang datang ke Tanjung Panjang di Desa Siduwonge pada 2008 silam, kondisi dusun tempat di mana dia tinggal, baru dihuni sekitar empat keluarga. Tidak ada informasi atau tanda apapun yang mengatakan kalau tempat barunya itu adalah kawasan cagar alam.

“Saya datang di sini memang sudah terbuka, sudah banyak empang. Tapi jujur saja, saya sendiri tidak tahu kalau kawasan ini adalah CA, sama sekali tidak ada tanda-tandanya, plang, tapal batas atau apapun. Tidak ada juga yang memberikan informasi, termasuk pemerintah,” kata Ambo yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dusun Bolongga di Desa Siduwonge.

Pengakuan Ambo Dale mungkin benar, bahwa saat itu tidak ada informasi yang diberitahukan



kepada dirinya dan penambak lain terkait status CATP. Karena bahkan sekelas Sjamsudin Hadju, Kepala Seksi BKSDA Sulawesi Utara Wilayah II Gorontalo, mengaku pemerintah dalam hal ini pihaknya, baru tahu kalau kawasan seluas 3.174,10 hektar itu adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi cagar alam. Juga masih menurut Sjam, kondisi saat itu memang sudah tidak ada plang atau tapal batas kawasan.

Lalu dengan kondisi seperti itu pemerintah datang menggunakan pendekatan represif tentu tidak akan menjadi solusi. Pemerintah pernah sekali mencoba. Pada 25-26 Oktober 2016, BKSDA sebagai pemangku kepentingan memimpin operasi represif, gubuk penggarap di

*Papan informasi penanaman mangrove seluas 10 Ha di kawasan CATP oleh BKSDA bekerjasama dengan BPDASHL Bone Bolango - JAPESDA*



lokasi tambak dirubuhkan, dan menghancurkan tanggul-tanggul tambak.

Alhasil, para penambak yang membentuk serikat (Serikat Petani Tambak) dibantu Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyurat ke Komnas HAM, lalu Komnas HAM pun menyurati Pemerintah Daerah Pohuwato dan BKSDA, meminta tanggapan dan klarifikasi terkait tindakan represif yang telah mereka lakukan.

Irfan selaku Ketua Serikat Petani Tambak mengatakan, mereka

sadar betul bahwa tambak mereka bermasalah, apalagi sejak pemerintah berani mengambil langkah represif. Tapi di sisi lain juga menuntut solusi karena mereka bukan satu-satunya pihak yang harus disalahkan.

“Kalaupun dilarang negara harus hadir secara keseluruhan. Tapi di sisi lain para penambak-pendatang orang Bugis itu sudah menjual semua yang dimilikinya di kampung,” kata Irfan.

Para penambak memang tidak bisa selamanya dipandang



Tampak tambak udang dan bandeng menggantikan mangrove di Teluk Tomini. Foto: Christopel Paino/Mongabay Indonesia



sebagai orang asing yang datang menghancurkan Tanjung Panjang. Para penambak ini dari manapun asalnya sudah tinggal sekian lama dan menjadi penduduk setempat. Terlepas dari konstruksi etnisitas yang bukan Gorontalo.

Tanjung Panjang sudah menjadi rumah dan sumber penghidupan mereka. Ditambah modal besar baik secara ekonomi maupun sosial yang telah mereka keluarkan untuk tinggal dan bertambak. Mereka telah meninggalkan “kenyamanan” di kampung halaman, juga saat membuka dan mengelola tambak, biaya yang mereka keluarkan tidaklah sedikit.

Bagi yang membuka lahan baru mereka harus menyewa alat berat

yang berkisar Rp 800 ribu hingga Rp 900 ribu per jamnya, dengan kisaran ini dikalikan luasan dan lama kerja, menurut penuturan beberapa penambak di sana bisa mencapai kurang lebih Rp 30 juta per lima hektar. Belum lagi bayar uang “keamanan” ke sejumlah oknum aparat pemerintahan. Sementara bagi yang membeli tambak yang sudah ada, selain melakukan pembelian, juga dalam prosesnya harus mengantongi modal untuk pengelolaan (beli bibit dan bayar penggarap jika tambaknya luas).

Walaupun setelahnya hasil yang didapat dari usaha tambak ini berkali lipat, tapi justru itulah yang semakin mengikat para penambak dengan Tanjung Panjang. Para

penambak tentu tidak akan memberikan begitu saja tambak mereka atas nama hukum atau dampak ekologis yang belum tentu mereka pahami.

Saat ini pemerintah bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah (NGO) yang bergerak di isu lingkungan seperti JAPESDA melakukan upaya pemulihan ekosistem di Tanjung Panjang, tidak lagi dengan pendekatan represif, tapi melalui penyadartahuan dan melibatkan secara aktif masyarakat terutama penambak.

Ambo Dale menjadi salah satu partisipan dalam upaya pemulihan ini. Posisi Ambo Dale cukup kompleks, yaitu sebagai kepala dusun, penambak dan orang Bugis. Dengan posisi seperti itu, Ambo bisa menjadi tokoh kunci untuk agenda pemulihan ekosistem di Tanjung Panjang.

Kalau ada alat berat yang mencoba masuk, Ambo menjadi orang pertama yang mencegat. Alasannya sederhana, “nanti bikin susah, jadi masalah. Secara pribadi saya sebenarnya tidak pusing karena tambak saya yang masuk ke kawasan CA itu hanya sedikit dibanding mereka (penambak lain), saya ikhlas jika pemerintah mau mengambilnya. Tapi kan tidak begitu, nanti saya tinggal sendiri di sini,” kata Ambo setengah bercanda.

Pelarangan alat berat memang sudah menjadi komitmen bersama antara komunitas penambak dan pemerintah, menjadi semacam hasil negosiasi. Selain pelarangan alat berat, poin lainnya dari negosiasi ini adalah tidak membuka

tambak baru dan ikut menanam mangrove di pintu-pintu masuk air. Sebagai gantinya, tambak yang sudah terlanjur ada dan produktif tidak akan dibongkar paksa.

Langkah seperti ini diharapkan dapat mengembalikan ulang kondisi Tanjung Panjang secara perlahan. Karena seperti tambak yang digarap Abdul Gani, tanggul-tanggul mulai menipis, menggunakan tenaga manusia saja dengan alat sederhana akan menyusahkan, sementara alat berat sudah dilarang. Dengan begitu prediksinya perlahan tidak ada lagi yang mau mengurus tambak yang mulai tidak produktif itu, lalu setelah ditinggalkan bisa menjadi lahan baru untuk ditanami mangrove.

Saat ini BKSDA selaku pemangku kawasan yang didorong oleh JAPESDA sudah menerbitkan rencana pemulihan ekosistem pada lahan 10 hektar bekas tambak yang sudah ditinggalkan.

Semrawutnya kondisi CATP adalah contoh fatal tentang bagaimana orang-orang dibutakan dengan “peluang bisnis” yang pada ujungnya entah disadari ataupun tidak, malah harus membayar ongkos ekologis yang besar. Pemanfaatan dan perlindungan seolah menjadi kontradiksi dalam upaya konservasi, yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi manusia *versus* alam. Kontradiksi ini seharusnya tidak masuk akal, tapi itulah yang terjadi di Cagar Alam Tanjung Panjang. #



# Menjaga Hutan Berarti Melibatkan Masyarakat

*Sukur Yadi petani sekaligus penyuplai komoditas ekspor di Desa Nipah Panjang*

Oleh: Defri Sofyan



“DULU, BANG, BAYANGKAN nelayan kita, di wilayah sendiri justru diusir oleh mereka, itu yang membuat saya geram!” tutur Ade Bagus Arjunawan, Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Kubu.

Sore itu Ade bercerita kepada Ebensius Langga, fasilitator Sahabat Masyarakat Pantai Kalimantan (SAMPAN), tentang masalah yang kerap mereka alami ketika hutan yang masuk ke wilayah mereka justru dicaplok oleh warga desa lain.

Pasalnya, warga desa tersebut kerjanya adalah menebang mangrove untuk dijadikan arang, sementara warga Desa Kubu yang berprofesi sebagai nelayan tidak terima, karena akan mengancam produktivitas di wilayah tangkapan mereka.



### Mereka yang Terdampak

Warga Kubu selain mempunyai masalah dengan warga desa lain, juga memiliki masalah laten dengan perusahaan, sebab terdapat area konsesi sebuah perusahaan kehutanan yang memakai sekitar 17 ribu hektar kawasan hutan di Kubu.

“Padahal sepengetahuan saya, perusahaan ini sudah puluhan tahun tidak ada aktivitas, tidak ada kontribusi untuk desa, makanya kalau kita bisa urus menjadi hutan desa itu luar biasa,” kata Ade melanjutkan obrolan.

Eben hanya mengangguk mengiyakan, tidak menambahkan sepele kata pun untuk menanggapi keluhan Ade. Sebab bagi Eben, keluhan Ade adalah pokok masalah yang selama ini diusahakan untuk diatasi oleh organisasinya, SAMPAN. Tidak ada jawaban instan untuk Ade dan seluruh warga dampingan SAMPAN.

Apa yang dialami Ade dan warga Kubu selama ini menjadi pekerjaan rumah bagi SAMPAN. Konflik warga vs warga dan warga vs perusahaan selalu menghantui ketika diperhadapkan pada properti bersama, apa yang *Garrett Hardin*<sup>43</sup>, seorang ekologis, sebutkan sebagai *tragedy of the common* ‘tragedi kepemilikan bersama’. Menurutnya, karena tidak semua orang memiliki moralitas yang sama, maka kebebasan untuk kepemilikan bersama adalah kehancuran bagi semua.

Pada kasus sumber daya pesisir, disebabkan fungsinya yang krusial bagi semua orang, dan semua orang merasa memilikinya, maka akan selalu ada konflik yang terjadi. Persoalannya, antara pihak yang berkepentingan tidak mempunyai kesepahaman tentang

bagaimana cara memanfaatkan sumber daya pesisir, belum lagi bicara kesenjangan kuasa antara warga dengan perusahaan.

Sebagai organisasi non-pemerintah, SAMPAN—dibentuk pada 5 Juni 2009—memang diperuntukkan untuk mengawal masalah yang selama ini kerap abai diperhatikan oleh organisasi masyarakat sipil lainnya, yakni persoalan pesisir di Kalimantan Barat (Kalbar).

“Konteks masalah di Kalbar yang melatarbelakangi pendirian SAMPAN adalah masyarakat pesisirnya secara sosial-ekonomi masih sangat rentan. Padahal pesisir kaya akan sumber daya alam, tapi masyarakatnya sendiri belum memiliki kepastian—dalam hal hak pengelolaan hutan,” kata Fajri Nailus Subchi, salah satu pendiri SAMPAN.

Fajri juga menjelaskan yang dimaksud pesisir bukan semata pesisir laut saja, sehingga bisa mengabaikan Kalimantan sebagai salah satu daratan terbesar di dunia. Tapi pesisir juga berarti pesisir sungai. Dengan menjadikan sungai sebagai sudut pandang, SAMPAN dianggap mempunyai perspektif kunci untuk menanggapi masalah Kalimantan secara menyeluruh.

Sebagai pulau yang dijuluki *Pulau Seribu Sungai*, Kalimantan khususnya Provinsi Kalbar, daratan dan pesisirnya terhubung oleh banyak sungai-sungai yang ada. Sungai ini selain

menjadi sumber kehidupan bagi keanekaragaman hayatinya, juga menjadi penghubung alami bagi manusianya. Di sungailah masyarakat melakukan transaksi sosial, ekomoni, dan budayanya. Sedangkan “SAMPAN” sendiri berarti ‘perahu’, alat utama yang digunakan masyarakat sejak dulu untuk menjaga seluruh koneksi tadi.

Mengingat konteks dan tren dari permasalahan lingkungan dan sosial yang ada di provinsi ini, maka tidak sedikit juga organisasi masyarakat sipil yang mengambil peran di dalamnya. Namun selama ini dari sekian banyak organisasi masyarakat sipil yang ada,

### PERSAHABATAN UTARA DAN SELATAN

kebanyakan masih berfokus pada permasalahan yang berada di area hulu. SAMPAN dengan perspektif mereka lantas memulai kerjanya di area pesisir Kalbar, seperti di Bentang Alam Muara Kubu.

Menurut SAMPAN yang harus dilakukan adalah melibatkan para pihak yang berkepentingan, terutama warga sekitar, dengan menggunakan skema yang berkelanjutan. Maka SAMPAN mendorong dibentuknya hutan desa, salah satu dari bentuk perhutanan sosial. Sebuah skema yang melibatkan masyarakat sekitar secara langsung untuk memanfaatkan hutan secara berkelanjutan.

Sukur menjemur pinang di ruangan penjemuran miliknya - JAPESDA



### Mereka yang Terdampak

Dengan adanya hutan desa, diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, sekaligus akan memberikan masyarakat posisi yang kuat secara hukum saat menghadapi invasi wilayah hutan mereka dari pihak-pihak dengan kekuatan yang besar, seperti perusahaan.

Sejauh ini SAMPAN, yang didukung oleh Simenpuu Foundation sejak 2015 hingga 2020, sudah berhasil mendorong 6.567 ha (2015-2017) dan 26.244 ha (2017-2020) hutan desa di 12 desa di Bentang Alam Muara Kubu yang secara administratif masuk dalam tiga kecamatan, yakni Kubu, Terentang dan Batu Ampar. Ketiga kecamatan ini secara geografis merupakan delineasi dari hilir Sungai Kapuas, sebuah sungai gigantik yang dikenal sebagai sungai terpanjang di Indonesia.

Bentang Alam Muara Kubu mempunyai luas total 362.344 ha secara garis besar terbagi dalam dua kawasan, yakni 235.429,52 ha kawasan hutan dan 122.114,54 ha kawasan tujuan lain yang sebagian besar ditutupi oleh hutan mangrove sekunder dan hutan rawa gambut.

Potensi alam yang ada di kedua jenis hutan tersebut melimpah, terutama dari kaca mata ekonomi. Dengan adanya hutan desa, perusahaan yang akan membatat hutan dan mencemari perairan tergantikan dengan lembaga pengelolaan hutan desa yang akan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dan menangkap ikan dengan memperhatikan kelestariannya. Konsepnya: *Hutan terjaga, masyarakat sejahtera*.

Sabarani, seorang nelayan tangkap di Desa Kubu menceritakan



Seorang warga yang bekerja di tempat penampungan pinang milik pak Sukur - JAPESDA

bagaimana potensi alam di sungai dekat rumahnya itu sangat luar biasa untuk ukuran dirinya sendiri dan nelayan-nelayan kecil di desanya. “Jenis ikan yang saya tangkap itu banyak, ada tirus, kakap, kerapu, dan lainnya,” kata Sabarani dengan bangga.

Ikan-ikan yang disebutkan Sabarani adalah komoditas yang sering masuk ke pasar ekspor, sehingga nilai jualnya lebih tinggi dibanding ikan lain yang hanya beredar di pasar domestik. Seperti gelembung renang dari ikan tirus (*Pennahia argentata*) yang menjadi langganan ekspor ke Cina. Bagi yang belum tahu komoditas satu



ini, menurut pengumpul lokal di Desa Kubu, harganya dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah per kilogram tergantung dari *grade* yang ditentukan, sedangkan informasi di internet harganya bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta per kilogramnya.

Namun menurut Sabarani, masih ada kendala yang cukup menjengkelkan baginya, yakni lalu lintas kapal muatan milik perusahaan sangat mempengaruhi hasil tangkapannya. Memang sungai-sungai di Kalbar juga digunakan sebagai wilayah transportasi tongkang-tongkang milik perusahaan.

### PERSAHABATAN UTARA DAN SELATAN

“Kami—nelayan—kan menunggu di muara sungai untuk menangkap ikan yang akan masuk ke sungai, tapi karena kapal pengangkut kayu sering melintas, ikan-ikan jadi terdorong lagi keluar [ke arah laut],” kata Sabarani.

Hal itu sangat berpengaruh pada hasil tangkapannya bukan tanpa alasan. Nelayan penangkap ikan tirus tidak setiap hari turun, idealnya dalam satu bulan dua kali mereka turun, menunggu ikan tirus berkembang biak.

Namun dalam kasus tertentu, mungkin karena faktor lalu lintas kapal, juga kondisi kualitas air sungai, ikan tirus yang menjadi primadona enggan tumbuh dan berkembang biak. Menurut pengalaman Sabarani, dia pernah sampai setahun tak mendapatkan hasil tangkapan. “Menunggu habis uangnya dulu, baru dapat lagi,” katanya sambil tertawa.

Cerita Sabarani juga sedikit bisa menggambarkan bagaimana nelayan yang menangkap komoditas berharga jutaan rupiah itu tak kunjung menjadi sejahtera.

Dari Desa Kubu, sekira 29 km garis lurus ke arah Barat ke Desa Nipah Panjang, Kecamatan Batu Ampar, ada cerita yang bisa diumpamakan sebagai *success story* tentang bagaimana dampak diperolehnya hak izin pengelolaan hutan desa bagi masyarakat.

Di desa yang mempunyai kondisi hutan mangrove dan gambut yang masih terjaga, masyarakat dianugerahi berlimpahnya komoditas seperti kelapa, pinang, pisang, kepiting dan paling baru adalah madu lebah kelulut. Secara umum, petani di Desa Nipah Panjang sudah cukup diuntungkan

**Mereka yang Terdampak**

dengan menanam pinang, kelapa dan pisang saja. Sebab ketiga komoditas itu bukan hanya masuk ke pasar lokal, tapi juga sudah masuk ke pasar ekspor yang berharga jual berkali lipat.

Saparudin, warga Desa Nipah Panjang—seperti kebanyakan warga desa ini—adalah petani sekaligus peternak. Tapi berbeda dengan warga lainnya, dia adalah inisiator yang berani mengambil langkah baru yang umumnya dihindari oleh warga desa lain karena takut risiko atau sekadar buang-buang waktu pada hal yang belum pasti. Saparudinlah yang memulai membudidayakan lebah kelulut (*Trigona sp.*)

Apa yang sering diungkapkan oleh pemerhati lingkungan, “memanfaatkan hutan tidak selalu dengan mengambil kayunya” dirasakan langsung oleh Saparudin. Selain dengan menanam pinang, kelapa, dan beternak kambing, dia juga membudidayakan lebah kelulut. Salah satu hewan penyerbuk yang secara ekologis menempati posisi sangat penting demi suksesti hutan.

Selain sangat bernilai secara ekologis, hewan ini juga penghasil madu yang lebih mahal harganya dibanding madu lebah biasa. Saat ini harga di pasaran per kilogram madu lebah kelulut bisa mencapai Rp 400 ribu sedangkan madu biasa berkisar dari Rp70 ribu hingga Rp100 ribu.

“Saya mempunyai 148 *stub*—tempat koloni lebah berbentuk balok— yang setiap bulannya bisa panen sekitar 30 kg lebih, tergantung dari mekarnya bunga,” kata Saparudin.

Jumlah madu yang dihasilkan dari ternakan Saparudin memang tidaklah luar biasa banyak, apalagi jika permintaan pasar yang ditawarkan kepadanya mencapai 400 kg per bulan. Namun nilai keuntungan yang dirasakan Saparudin juga tidak bisa dibilang sedikit. Jika harga madu Rp300 ribu per kilogram dalam sebulan, berarti Saparudin mendapat untung Rp 9 juta. Harga yang lumayan jika dibandingkan dengan upah buruh perusahaan per bulan. Belum lagi pendapatannya dari hasil panen pinang, kelapa, pisang dan lainnya.

Menurut Saparudin usaha beternak lebah kelulut tidaklah rumit dan berongkos mahal seperti yang dipikirkan warga lain. Hanya perlu menyediakan papan sebagai rumah untuk koloni lebah. Sementara untuk pakannya sudah tersedia di kebun dan hutan di Nipah Panjang, yakni segala tanaman yang bernektar, seperti kelapa, pinang, pisang, mangrove, nipah dan bunga-bunga hias di halaman rumah.

Apa yang dirasakan Saparudin memang menjadi salah satu dampak yang diharapkan oleh SAMPAN dari adanya hak pengelolaan hutan desa. Karena jenis usaha yang dilakukan Saparudin menjadi semacam contoh dari sebuah model pemanfaatan yang menguntungkan masyarakat sekaligus melestarikan hutan. #



# EPILOG

## Cara-cara Berpikir Global, Beraksi Lokal

Refleksi kritis atas narasi-narasi dan undangan untuk pendekatan sejarah geografi

Oleh Noer Fauzi Rachman

### Pengantar

Orang-orang yang bergerak sebagai aktivis organisasi-organisasi non-pemerintah, pertama-tama, mempunyai suatu kekayaan pengamatan dan empati mengenai semakin sulitnya posisi, kondisi dan pengalaman hidup dari kelompok-kelompok komunitas yang lemah, miskin, marjinal, rentan, atau tertindas.

Ada banyak contoh dikemukakan dalam buku ini, termasuk dalam golongan merosotnya layanan alam akibat kerusakan ekologis, ancaman-ancaman keselamatan dan kesejahteraan rakyat, hingga menurunnya produktivitas rakyat dan sebagainya. Peristiwa demi peristiwa yang asalnya berada dalam ruang dan waktu tertentu kemudian terlepas dari asal-usul keberadaannya yang konkrit dan spesifik.

Para aktivis memiliki cara-cara mengumpulkan, mendokumentasikan dan bercakap-cakap mengenai sebab-sebab musababnya, hingga apa-

apa yang membuat kondisi ini bertahan. Para aktivis belajar dan mengembangkan metodologi yang manjur, baik untuk memeriksa apa yang sesungguhnya terjadi, hingga merumuskan cara-cara bekerja bersama komunitas.

Lebih dari sekedar kerja memahami dan menafsirkan apa yang sedang terjadi, para aktivis ini mengembangkan cara bekerja bersama pemimpin dan kelompok-kelompok komunitas itu, maupun bersama para pihak yang punya andil untuk mengubah kebijakan publik yang relevan. Berada dan berinteraksi antara komunitas, dan elite pembuat kebijakan publik merupakan suatu posisi istimewa dan sekaligus tantangan dari para aktivis.

Suatu upaya menunjukkan bahwa suatu organisasi berhasil mencapai perubahan yang diinginkan adalah membuat buku mengenai keberhasilan-keberhasilannya. Dengan semangat untuk merayakan keberhasilan

itulah, para penulis buku ini mendokumentasikan secara positif sebagian dari dari kerja-kerja organisasi-organisasi non pemerintah yang bekerjasama dengan Siemenpuu, dipandang dari posisi istimewa para aktivis organisasi non-pemerintah.

Epilog ini bermaksud untuk mengajak pembaca merefleksikan cara-cara menarasikan kerja-kerja lapangan dari aktivis-aktivis organisasi non-pemerintah, berdasar pada pendokumentasian yang dilakukan oleh para penulis di buku ini.

Bagian akhir, dan yang utama mau dianjurkan adalah suatu pendekatan mengutamakan sejarah geografi bahwa apa-apa yang berkembang sesungguhnya “bergantung pada *dimana* hal-hal itu berkembang, di atas apa yang secara historis telah mengendap disana, pada struktur-struktur sosial dan spasial yang telah menetap di tempat itu” (Watts dalam Pred and Watts 1992:11).

### Hubungan Utara-Selatan: Pendanaan yang Tidak Langgeng

Apa yang perlu ditampakkan secara eksplisit, dan tidak selalu jelas di dalam naskah-naskah yang dibahas disini, walau ada penandanya, adalah hubungan Utara-Selatan yang dijalin oleh The Siemenpuu Foundation sebagai organisasi nirlaba di Finlandia, di Bumi Belahan Utara. Jadi, apa yang dikerjakan oleh mitra-mitra Siemenpuu yang sebagian disajikan dalam buku ini dapat dimengerti sebagai suatu jenis hubungan antar bumi belahan Utara dengan Bumi Belahan Selatan, dalam sektor hubungan antar organisasi non-pemerintah

(*relations between non-governmental organizations*). Salah satu hubungannya adalah hubungan aliran keuangan, yang pertama kali dibentuk oleh keputusan alokasi sumber dana, politik hubungan internasional dan pembangunan internasional (bilateral, multilateral atau lainnya), dan *last but not least* pengetahuan berupa rencana strategis.

Siemenpuu ini selain menjadi salah satu organisasi nirlaba yang berfokus pada tema pembangunan Internasional di Finlandia, mendukung komunitas lokal, pembela lingkungan dan lingkungan yang terancam di negara-negara di Bumi Belahan Selatan, *Global South*, termasuk melalui dukungan penyediaan dana terhadap organisasi-organisasi non-pemerintah. Moto utama Siemempuu adalah *Supporting the Environment and Environmental Defender in the South*.

Siemenpuu ini berorientasi mengenali akar penyebab masalah lingkungan dan sosial dan mencari alternatif pembangunan masyarakat. Penetapan Indonesia menjadi wilayah tujuan pembiayaan memang pada mulanya dimulai di aplikasi proposal Siemenpuu, tapi selanjutnya menjadi pengambilan keputusan dari kementerian pembangunan internasional.

Sebagai organisasi di *Global North*, Siemempuu mengikuti arahan strategis dari Kementerian Kerjasama Pembangunan bahwa proyek-proyek yang didukung adalah yang akan mengurangi emisi yang mengakibatkan perubahan iklim dan menipisnya keanekaragaman hayati.

Dana Siemenpuu terutama berasal dari dana Kementerian Kerjasama Pembangunan Finlandia, dan telah dipakai untuk ratusan proyek di lebih dari 50 negara.

Pendanaan Siemenpuu bukan merupakan pendanaan dalam jumlah besar, namun Siemenpuu bersedia mendukung inisiatif kerja-kerja mitra yang kerap menjadi pionier dalam isu penyelamatan lingkungan di Indonesia, seperti isu gambut dalam penyelamatan Semenanjung Kampar, saat belum banyak yang membicarakan soal persoalan gambut.

Begitupula dengan isu restorasi mangrove, dengan dukungan Siemenpuu pada 2016, mitra Siemenpuu telah menginisiasi Gerakan pemulihan mangrove melalui Jangkar Mangrove. Sedangkan pemerintah pada 2020 baru memasukkan isu restorasi mangrove dalam BRGM. Termasuk riset soal potensi kerusakan dan peluang ekonomi pada ekosistem padang lamun.

Proyek-proyek yang didukung pendanaannya oleh Siemenpuu adalah dilaksanakan oleh suatu organisasi tertentu berdasar kontrak tertentu yang diatur kordinasinya oleh satu mitra utamanya.

Pada tingkat akar rumput, peran dan kapasitas komunitas lokal dikembangkan sebagai penjaga lingkungan mereka sendiri. Mitra utama proyek akan bekerja dalam jaringan mitra-mitra yang menjamin pengembangan kapasitas dari penyelenggara, dalam hal ini untuk di Indonesia adalah Jikalahari - Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau.

Finlandia adalah suatu negara di Eropa yang berhasil keluar dari posisi dan pengalaman sebagai negara yang dijajah, kemudian berhasil menjadi negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam sekitar 50 tahun,<sup>1</sup> dan inilah yang membedakan dengan banyak negara Eropa yang memiliki pengalaman menjajah negara-negara lain, terutama di wilayah tropis, atau sub tropis.

Di Finlandia sendiri, Siemenpuu bekerja untuk menambah pengetahuan dan pemahaman orang-orang dan lembaga-lembaga di Finlandia tentang lingkungan hidup dan tantangan pembangunan berkelanjutan di *Global South*.

Dalam bermitra, Siemenpuu menjalin kerjasama jangka panjang dengan mitra utamanya di satu negara tertentu di *Global South*, dengan kerangka umumnya adalah dukungan finansialnya untuk aksi-aksi lingkungan hidup, dan dukungan untuk para pejuang lingkungan.

Hubungan Utara-Selatan demikian ini tidak langgeng abadi. Pendanaan Siemenpuu di Indonesia berhenti di tahun 2021. Untuk program 2022, Siemenpuu mengalokasikan dananya untuk 2022-2025 untuk lima negara target program, yakni Kenya, Liberia, Mali, Mozambik, dan Myanmar.

Ada catatan, bila Siemenpuu tidak dapat melanjutkan kegiatan pembiayaan di salah satu negara target itu, proyek akan didanai bisa berada di Nepal. Jaringan

<sup>1</sup> Untuk cara bagaimana Finlandia menjadi kesejahteraan (*welfare state*), baca Hielka Pietela (2002).

Siemenpuu di Amazon Brazil, Indonesia dan India akan tetap penting untuk kegiatan jaringan dan komunikasi.

Demikian dinyatakan dalam *Siemenpuu's Development Cooperation Programme 2022-2025*. <https://www.siemenpuu.org/en/funding/programme-2022-2025> (akses terakhir pada 21 Juli 2022). Apa yang dialami oleh mitra-mitra Siemenpuu saat ini, yakni terhentinya aliran pendanaan ke mitra-mitranya di Indonesia, adalah suatu penanda penting mengenai tidak langgengnya hubungan Utara-Selatan dalam pendanaan prorek-proyek lingkungan.

Pertanyaannya: bagaimana organisasi-organisasi non-pemerintah disini melanjutkan pekerjaannya, sementara tidak ada lagi dana yang berasal dari organisasi-organisasi nir-laba di negara-negara belahan Utara, seperti The Siemenpuu Foundation?

Apakah kita telah mengantisipasi bahwa hal ini akan terjadi? Organisasi-organisasi non-pemerintah disini perlu memikirkan cara baru dalam membiayai kegiatannya sendiri.

Apakah cara mengandalkan aliran dan alokasi pendanaan dari organisasi nir-laba di negara belahan Utara masih akan diteruskan untuk kegiatan-kegiatan lokal yang masing-masing lakukan? Apakah ada yang sudah menempuh cara-cara lain dalam memobilisasi sumberdaya untuk keperluan keberlanjutan gerakan-gerakan sosial?

## Berpikir Global, Bertindak Lokal

*Think Globally, Act Locally* adalah terjemahannya adalah Berpikir Global, Bertindak Lokal. Istilah ini populer sekali di kalangan aktivis lingkungan di negara-negara belahan dunia Utara, dan kemudian pemikiran ini sampai pula pada aktivis di negara-negara belahan dunia Selatan.

Kebangkitan perhatian mengenai sebab-sebab global mulanya berkembang di tahun 1990an dengan kegemaran orang pada istilah globalisasi. Dalam melakukan studi-studi kasus, banyak sekali dipergunakan pendekatan *impact model*.<sup>2</sup>

Kasus-kasus dipilih untuk distudi, dianalisis, diurus, dan dihadirkan sebagai *local cost, impact* atau dampak dari bekerjanya *global cause, driving force*, atau kekuatan-kekuatan yang beredar dalam orbit nasional/transnasional/internasional.

Narasi yang dibuat atas dasar peristiwa-peristiwa yang dialami alam dan komunitas lokal tertentu dikemas sebagai kritik atas kekuatan-kekuatan national hingga global yang bekerja, dan mengkampanyekan kritik atas kekuatan-kekuatan global.

Biasanya kekuatan-kekuatan itu diidentifikasi sebagai kekuatan korporasi raksasa, blok kekuatan dari negara-negara maju, paham ideologi neoliberal, mobilitas jaringan para ahli, teknologi komunikasi, standar-standar dan pedoman internasional yang diberlakukan, hukum

<sup>2</sup> Untuk kritik atas cara berpikir *impact model* ini lihat Gillian Hart (2002, 2004, 2016).



internasional, perjanjian-perjanjian antar negara hingga sistem perdagangan antar negara.

Asumsinya, ada dualisme biner antara yang lokal dengan yang global, dan hubungan kausal searah dari yang global ke yang lokal itu. Menarik untuk dicermati atribut yang diberikan pada dualisme biner itu: yang global dan yang lokal itu.

Kekuatan global diberi suatu atribut dengan karakterisasi maskulin yang aktif dan dinamis melakukan penetrasi pada yang lokal dengan atribusi feminin yang pasif dan statik, namun sangat sering pula dimaknai sebagai memiliki daya pikat pada yang global untuk bekerja.

Variasi cara berpikir ini di kalangan aktivis ornop berwujud memperlakukan yang lokal sebagai situs tempat segala yang baik berada, dan menjadi bermasalah karena bekerjanya kekuatan global bekerja yang berasal dari tingkat nasional dan internasional.

Dengan mengacu pada moto “*think globally, act locally*”, mereka bekerja di lokalitas tertentu dan mampu menjadikannya bagian dari studi kasus yang menghadirkan narasi bahwa komunitas sedang berada dalam kemelut sebagai akibat penetrasi kekuatan-kekuatan global yang datang berasal dari orbit nasional, hingga transnasional/internasional.

Para pembuat narator terlibat langsung dalam upaya aksi-aksi perubahan pada tingkat lokal. Namun, karena sebagian mereka yang terlibat itu memahaminya sebagai akibat dari sebab-sebab global, maka hasil mereka pun terbatas mencegah menjadi

korban, hingga membentuk barikade perlindungan. Sebagian dari mereka adalah organisasi non-pemerintah yang bekerja terus dengan berbagai jaringan advokasi transnasional, dan memanfaatkan berbagai forum nasional dan internasional untuk mengartikulasikan kritik berbasis apa-apa yang dinarasikan itu.<sup>3</sup>

Pendekatan semacam ini hadir di banyak tulisan, baik secara eksplisit atau implisit. Yang tampak eksplisit dan menonjol adalah upaya menunjukkan alasan terpenting, justifikasi utama, atau dasar keberadaan, *reason for being*, mengapa suatu organisasi atau usaha tertentu perlu hadir. Inilah yang biasa disebut dalam Bahasa Perancis diistilahkan sebagai *raison d’etre*.

Hampir kesemuanya tulisan menunjukkan adanya praktek-praktek korporasi yang menyebabkan besarnya ancaman kerusakan lingkungan hidup, dan risiko penderitaan segolongan masyarakat, dan karenanya dijadikan sebagai sebab dari kehadiran aktivisme ornop.

<sup>3</sup> Pendekatan ini bermotokan “*think locally, act globally*” dengan menguatkan jaringan advokasi transnasional, yakni suatu siklus yang dimulai dengan mengangkat kasus lokal melintasi batas nasional ke internasional fora, dengan harapan ada berbagai tekanan khusus yang dapat diperankan oleh suatu badan internasional tertentu terhadap suatu kekuatan di negara nasional, khususnya pemerintah, untuk mengambil langkah-langkah mengubah situasi lokal yang diharapkan. Mekanisme boomerang (bomerang mechanism) ini diharapkan akan bisa memperbaiki situasi lokal, sebagai hasil dari berubahnya cara pemerintah mengurus kasus-kasus yang diadvokasi secara internasional/transnasional itu (Keck and Sicking 1998, 1999).

Cara berikir demikian nampak sangat terang misalnya, dalam tulisan Nurain Lapolo dan Renal Husa bahwa sejumlah aktivis mencurigai keberadaan pengusaha-pengusaha pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di wilayah hutan negara di provinsi Gorontalo tidak melakukan pengelolaan hutan secara lestari, dan perambahan kawasan hutan dan *illegal logging*, menyebabkan bahaya bencana alam akibat berubahnya fungsi hutan. Para aktivis itu pada gilirannya membuat organisasi bernama Jaring Advokasi Pengelolaan Sumberdaya Alam (JAPESDA).

Demikian pula, dikemukakan oleh tulisan Renal Husa, bahwa Sahabat Masyarakat Pantai (SAMPAN) Kalimantan hadir untuk menghadapi ekspansi pertambangan dan perkebunan industri sawit di Kalimantan Barat.

Ekspansi ini dinilai SAMPAN menjadi penyebab dari menyempitnya ruang hidup masyarakat kecil, dan rusaknya layanan alam yang berada di dalam dan sekitar wilayah konsesi perusahaan; atau dalam tulisan Okto Yugo Setiyo dan Nurul Fitria, bahwa Jikalauhari hadir untuk menyelamatkan hutan dan lingkungan hidup di Riau yang rusak akibat praktek-praktek deforestasi, *illegal logging*, hingga kejahatan kehutanan oleh korporasi.

Aksi-aksi lokal dari cara berpikir global, nampak jelas dalam satu laporan Siemenpuu “*Indonesia: protection and Sustainable Use of Forest*”.

“Sangat penting untuk melindungi hutan hujan baik untuk mengamankan mata

pencaharian dan budaya masyarakat dan untuk melawan perubahan iklim. Yayasan Siemenpuu dan organisasi mitranya menyatakan bahwa kawasan hutan harus dilindungi oleh penduduk setempat dengan cara mereka sendiri. Hutan tanaman bukanlah solusi berkelanjutan untuk perubahan iklim atau perusakan lingkungan. Siemenpuu menganjurkan perlindungan hutan yang komprehensif dan partisipasi yang tulus dari kelompok-kelompok lokal.

Organisasi-organisasi yang didukung oleh Yayasan Siemenpuu mempromosikan cara penggunaan lahan yang adil secara sosial dan ekologis dan membantu masyarakat lokal untuk melindungi lingkungan mereka. Area tematik utama adalah konservasi berbasis masyarakat dan pemanfaatan berkelanjutan lahan gambut dan hutan bakau, jejaring dan pengembangan kapasitas.

Siemenpuu mengarahkan dukungannya terutama kepada LSM kecil Indonesia yang terkait erat dengan masyarakat lokal yang bergantung pada hutan. Organisasi-organisasi ini beroperasi di pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Sulawesi. Fokus utama adalah di Riau di mana Siemenpuu telah mendanai jaringan Jikalauhari dalam mempromosikan administrasi hutan berbasis masyarakat dan penegakan hukum.

Perlindungan mangrove didukung di Sumatera Selatan (Hutan Kita Institute), Sulawesi

*Utara (Japesda), Kalimantan Barat (Sampan) dan melalui jaringan nasional yang dikoordinasikan oleh Forest Watch Indonesia*".<sup>4</sup>

Kapasitas untuk membangun jaringan, dan memperoleh dukungan akses pada kebijakan-kebijakan baru telah menjadikan para aktivis ini dapat memanfaatkan skema-skema program pemerintah seperti perhutanan sosial untuk pembentukan aksi-aksi lokal. Keberhasilan lokal telah ditunjukkan oleh SAMPAN yang bekerja di Kabupaten Kubu Raya dengan skema Hutan Desa, di 12 desa di Bentang Alam Muara Kubu, seperti dituliskan oleh Defri Sofyan.

Perkumpulan Elang, seperti yang ditunjukkan oleh Rina Syahputri dan Nurul Fitria, juga berhasil membantu warga memperoleh legalitas Hutan Desa, dan mampu bekerja bersama penduduk untuk mengganti cara berladang tanpa teknik membakar. Atau, tulisan Herbet dan Nurul Fitria mengenai apa-apa yang dilakukan oleh aktivis Yayasan Mitra Insani (YMI) dalam memfasilitasi perolehan SK HPHD Teluk Lanus pada Desember dengan luasan 3.580 hektar.

Kapasitas yang unik juga dalam menempatkan diri menjadi penyuar perubahan. Contohnya melalui teknik membuat siaran langsung dari ruang-ruang sidang kasus korupsi izin dan

kejahatan lingkungan merupakan cara yang ditempuh Senarai (d/h Riau Corruption Trial) untuk menunjukkan kapasitas melakukan kontrol sosial serta kepentingan umum mengetahui penegakan hukum, seperti yang dituliskan oleh Nurul Fitria.

Secara praktis, para aktivis pun harus bisa menunjukkan contoh-contoh yang berhasil. Seperti ditunjukkan dalam tulisan Okto Yugo Setiyo mengenai bagaimana restorasi ekosistem Mangrove dilakukan dilakukan oleh masyarakat dengan fasilitasi dari jaringan Jangkar Mangrove di berbagai lokasi di Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Juga contoh kerja Hutan Kita Institut (HaKI) dalam membangun usaha tambak udang dan bandeng dalam skema Hutan Kemasyarakatan di Simpang Tiga Abadi, Sumatera Selatan, seperti dituliskan oleh Suryadi. Lalu, juga contoh yang dikerjakan Jaring Advokasi Pengelolaan Sumberdaya Alam (JAPESDA) membantu kelompok perempuan Torosiaje dengan mengusahakan penjualan hasil pengolahan ikan asin, dan bahan olahan makanan dari mangrove, seperti ditulis Defri Sofyan dan Nurain Lapolo.

Sebagai penyelenggara kegiatan, biasanya ornop dapat menunjukkan keberhasilannya. Namun, tidak senantiasa berhasil ketika masuk ke suatu skala yang luas seperti suatu kawasan cagar alam, walau sudah dilakukan secara berjaringan.

Kompleksitas masalah dan durasi waktu serta luasan areal dari Kawasan yang diurus, merupakan tantangan yang bisa jadi berada di luar jangkauannya.

Demikian yang terjadi di Cagar Alam Tanjung Panjang (CATP) Pohuwato, Gorontalo. Nasib bukaan lahan menjadi tambak rakyat belum berhasil dipulihkan fungsi konservasinya. Nasib petambak yang menguasai kawasan konservasi itu juga belum ada kepastian, seperti jelas dalam tulisan Renal Husa dan Nurain Lapolo.

### Penutup: Undangan untuk Pendekatan Geografi Sejarah

Saya menganjurkan menyadari keterbatasan dan konsekuensi cara pikir dualisme biner antara yang lokal dengan yang global itu. Saya menganjurkan suatu cara pandang yang lebih terbuka dan progressif untuk memahami bahwa tiap-tiap masalah agraria bersarang pada geografi sejarah dari suatu wilayah tertentu.

Geografi itu mengurus ruang (*space*), dan sejarah itu mengurus waktu (*time*). Alih-alih menganggap lokal sebagai tempat berlangsungnya akibat dari sebab-sebab global, pemahaman geografi sejarah ini sangat menentukan dalam memberi pemahamanan spasialitas dan temporalitas dari berbagai masalah agraria di suatu wilayah tertentu. Bila mau berhasil, tiap-tiap studi atas masalah-masalah lokal, mensyaratkan pemahaman geografi sejarah wilayah itu.

Stuart Hall (2017:280) memberi saran mengenai perlunya meneliti konjungtur yang sedang dihadapi melalui usaha mengidentifikasi para aktor yang berpengaruh, menelusuri cara bagaimana aktor-aktor itu tampil berperan, pada panggung apa, lintasan yang

mereka lalui, dan kondisi yang membuat kehadiran dan peran mereka berlanjut atau berhenti.

Pertunjukan, panggung, lintasan, dan kondisi para aktor tersebut tidak dapat ditelusuri secara linier. Interaksi para aktor yang berlangsung sekarang ini sesungguhnya berada dalam arus utama suatu babak/periode tertentu. Karena itu, perlu dirumuskan ciri babak tertentu yang berbeda dengan babak-babak sebelumnya.

Pengalaman saya, memakai pendekatan geografi sejarah menemukan pembabakan, dengan mengkombinasinya dengan etnografi dan dramaturgi peristiwa-peristiwa, merupakan kerja intelektual tersendiri yang mengasyikkan (Rachman, 2011, 2018, dan 2019).<sup>5</sup>

Demikianlah, pemahaman geografi sejarah demikian itu akan membantu keluar dari keterbatasan dalam memaknai

<sup>4</sup> Siemenpuu (2017) "Indonesia: protection and Sustainable Use of Forest". <https://www.siemenpuu.org/en/funding/old-programme/indonesia> (diakses pada 1 Agustus 2022)

<sup>5</sup> Selanjutnya, silakan pembaca mencermati uraian pendahuluan Hilmar Farid (2017) di buku *Sejarah/Geografi Agraria Indonesia* (Farid dan Luthfi 2017). Dalam buku *Sejarah/Geografi Agraria Indonesia* itu dimuat karya-karya dari Razif (2017) "Ekspansi Kapital dan Pengerahan Tenaga Kerja di Sumatera 1865-1965", M. Fauzi (2017) "Agraria dan Ekspansi Modal di Kalimantan", Razif (2017) "Sejarah Geografi Kapitalisme di Sulawesi", M. Fauzi (2017) "Agraria dan Ekspansi Modal di Nusa Tenggara", dan Noer Fauzi Rachman (2017) "Politik Agraria Priangan dari Masa ke Masa", yang kesemuanya menyajikan contoh studi geografi sejarah agraria itu. Contoh-contoh studi masalah-masalah agraria dengan pendekatan geografi sejarah bisa ditemukan dalam buku yang disunting oleh Noer Fauzi Rachman dan Dian Januardi (2014).

hubungan-hubungan yang berlangsung. Kita sama sekali tidak mengabaikan kehadiran kekuatan-kekuatan global yang bekerja pada tingkat lokal. Tiap-tiap tempat tertentu memiliki karakternya masing-masing, sejarah dan posisi geografisnya sendiri-sendiri. Kekuatan-kekuatan yang bekerja di satu tempat itu hanya dapat dimengerti dengan menghubungkannya dengan kekuatan-kekuatan lain dan tempat-tempat lainnya, tanpa perlu merasa terancam oleh kesemua itu.

Kita dapat menggunakan cara berpikir yang diusulkan oleh Doreen Massey (1994) sebagai “*power-geometry and a progressive sense of place*”, yang memberi kemungkinan memahami tempat itu melalui bukan hanya sebagai penerima pasif sebagai akibat, melainkan sebagai pelaku aktif yang memiliki peran ikut pula membentuk perubahan.

Kejadian-kejadian di tempat itu berada dalam dan membentuk satuan waktu yang biasa disebut periode/babak, yang di dalamnya terdapat simpul-simpul dari berbagai kekuatan yang bertemu dengan cara-cara yang tidak terduga. Jadi kebutuhan kita, “*is a global sense of the local, a global sense of place*” (Massey 1994:156).

## Referensi

- Farid, Hilmar. 2017. “Prolog: Menuju Sejarah/Geografi Agraria” dalam Hilmar Farid dan Ahmad Nashih Luthfi (Peny). 2017. *Sejarah/Geografi Indonesia*. Yogyakarta, STPN Press. Halaman 1-20.
- Farid, Hilmar dan Ahmad Nashih Luthfi (Peny). 2017. *Sejarah/*

- Geografi Indonesia*. Yogyakarta, STPN Press.
- Hall, Stuart. 2007. “Epilogue: Through the Prism of an Intellectual Life”, dalam *Culture, Politics, Race and Diaspora, The Thought of Stuart Hall*. B. Meeks (Ed) (Kingston, jamaika: Randle, 2007)
- Hart, Gillian. 2002. *Disabling Globalization: Places of Power in Post-Apartheid South Africa*. Berkeley, CA: University of California Press.
- \_\_\_\_\_. 2004. “Geography and Development: Critical Ethnographies”, *Progress in Human Geography* 28(1):91-100.
- \_\_\_\_\_. 2016. “Relational Comparison Revisited: Marxist Postcolonial Geographies in Practice” *Progress in Human Geography* 1-24.
- Keck, Margaret E. and Kathryn Sikkink. 1998. *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Ithaca, N.Y.; London: Cornell University Press.
- \_\_\_\_\_. 1999. “Transnational advocacy networks in international and regional politics” *International Social Science Journal* 51(159): 89-101
- Massey, Doreen. 1993. “Power-Geometry and a Progressive Sense of Place”, dalam J. Bird, B. Curtis, T. Putnam, G. Robertson and L. Tickner (eds), *Mapping the Futures*. London, Routledge, pp. 59-69.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Space, Place and Gender*. Cambridge: Polity Press.
- Pietela, Hielka (2002) “Masyarakat Kesejahteraan Nordik: Sebuah Strategi untuk Memberantas

Kemiskinan dan Membangun Kesetaraan – Studi Kasus Finlandia” *Jurnal WACANA* 10:57-80.

- Pred, Alan and Watts, Michael. 1992. *Reworking Modernity: Capitalisms and Symbolic Discontent*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
- Rachman Noer Fauzi. 2011. *Resurgence of Land Reform Policy and Agrarian Movements in Indonesia*. PhD Thesis. California (US): University of California, Berkeley.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Land Reform dan Gerakan Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press.

- \_\_\_\_\_. 2019. “Meneliti Proses Kebijakan Land Reform Indonesia”. *Prisma* 36:17-37.
- Rachman, Noer Fauzi dan Dian Januardi (Peny.). 2014. *MP3EI, Master Plan Krisis Sosial Ekologi Indonesia*, Bogor: Sajogyo Institute bekerjasama dengan Penerbit Tanah Air Beta.
- Rankin, Katharine N. 2003. “Anthropologies and Geographies of Globalization”, *Progress in Human Geography* 27(6):708-734.



# PARA PENULIS



## Nurain Lapolo

Pemerhati lingkungan, yang senang melakukan riset terkait ekologi dan sosial ekonomi masyarakat pesisir dan hutan daratan. Sejak 2014 sudah terlibat dalam kerja-kerja pendampingan masyarakat khususnya di wilayah pesisir laut. Juga beberapa kali menjadi tenaga ahli dalam survei biodiversitas mangrove dan melatih perempuan dalam mengolah berbagai produk turunan dari buah mangrove. Selain itu, memiliki pengalaman sebagai konsultan perencanaan, pemantauan dan evaluasi program yang berkaitan dengan lingkungan di pemerintahan.

Pada 2016–2018 menempuh pendidikan pascasarjana program studi kependudukan dan lingkungan hidup di Universitas Negeri Gorontalo. Sejak 2019 hingga saat ini sebagai direktur JAPESDA, menjabat untuk periode kedua sampai 2026 nanti. Selalu memotivasi diri sendiri dan orang-orang di sekeliling untuk tetap konsisten dan terus semangat belajar terutama para perempuan, karena saya percaya perempuan memiliki kekuatan tersendiri dalam kepemimpinannya.



## Defri Sofyan

Penulis saat ini berstatus jurnalis/penulis lepas yang bertempat tinggal di Gorontalo. Secara pribadi tertarik untuk meliput isu yang bertemakan lingkungan, HAM, gender dan kebudayaan. Saat ini juga menjadi anggota di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Gorontalo.



## Renal Husa

Lahir di Gorontalo 9 Juni 1996, pernah menjadi jurnalis aktif di salah satu media online Gorontalo. Saat ini memilih menjadi jurnalis lepas karena sedang menyelesaikan studi S-1 di Universitas Muhammadiyah Gorontalo.

Sebelum menjadi jurnalis, aktif di pers mahasiswa di LPM Merah Maron, Universitas Negeri Gorontalo. Saat ini sedang mendalami isu lingkungan dengan bergabung menjadi anggota di Perkumpulan Japesda Gorontalo dan mendalami gerakan literasi media dengan menjadi anggota di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Gorontalo.



## Okto Yugo Setiyo

Aktif menyuarakan persoalan lingkungan hidup dan kehutanan sejak di bangku kuliah. Saat itu sebagai anggota Mapala Humendala FE UNRI dan menjadi pendukung gerakan aktivis lingkungan hidup. Selepas menamatkan studi di FE UNRI, bergabung di Jikalahari sejak 2015 sebagai staf kampanye dan advokasi dan sejak 2018 sampai sekarang sebagai Wakil Koordinator Jikalahari.

Pernah mengikuti pelatihan menulis strigh news dan feature oleh Sapariah Saturi, Editor Senior Mongabay Indonesia. Juga mengikuti pelatihan menulis oleh Harry Surjadi, Direktur Eksekutif Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SEIJ) saat difasilitasi oleh kerja sama KPK dan Komisi Yudisial (KY). Penulis juga mengelola blog pribadi, oktoyugo.blogspot.com



### Nurul Fitria

Mendalami ilmu jurnalistik saat bergabung dengan LPM Bahana Mahasiswa di Universitas Riau sejak 2011 dan berproses saat menjadi pengurus RCT/ Senarai pada 2013 serta kontributor Mongabay Indonesia wilayah Riau sejak 2015. Yaya-sapaan akrabnya- sangat suka menulis dan mengabadikannya di kanal pribadi yayanurulfitria.wordpress.com.

Bergabung di Jikalahari sejak 2016 dan kini sudah menjadi Manajer riset dan informasi, isu-isu menyoal lingkungan sudah menjadi makanan sehari-hari. Aktif memproduksi konten kreatif untuk kampanye Jikalahari dengan harapan informasi yang disampaikan dapat menggerakkan banyak orang untuk bersama melindungi hutan dan lingkungan Riau.



### Rina Syahputri

Anak perempuan Abah dan Mak dari 6 bersaudara yang sejak pikiran senang ingin pergi jalan jauh (*traveling*) yg tercapai saat masa kuliah. Suka menulis catatan harian, puisi dari SD dan mengelola blog semasa kuliah, hingga bertemu dengan perempuan-perempuan kaya pengalaman dan tutur cerita melalui RWWG.

Sekarang masih senang berkelana dan menyalurkan hobi bersama suami. Rina, dengan senang hati berteman dan berbagi cerita, *follow* *ig* : @rina\_putri. Salam sehat dan gembira selalu.



### Suryadi M Nur

Lahir hampir 30 tahun silam. Di kepenghuluan pesisir utara Pulau Sumatera, Provinsi Riau. Sejak kecil terbiasa makan ikan, udang dan biota laut lainnya. Tentunya bukan yang dilindungi. Suka berenang di laut tapi mabuk laut. Tak cocok jadi nelayan apalagi pelaut. Di darat, ternyata juga mabuk. Mau bagaimana lagi? Harus dikuat-kuatkan.

Menulis sejak awal bangku kuliah. Jadi pers mahasiswa dan memimpin lembaga itu. Bahana Mahasiswa Universitas Riau, namanya. Tujuh tahun studi lebih banyak habiskan waktu di meja rapat: diskusi redaksi, edit tulisan, evaluasi dan bergurau sesama kru. Lepas kuliah ternyata konsisten jadi jurnalis. Kini menulis buat Mongabay Indonesia. Dan tak kalah penting, mengawasi persidangan perkara lingkungan hidup buat Senarai.



### Herbet Linto Retto Panggabean

Pria berdarah Batak kelahiran Pekanbaru 41 tahun lalu. Melewati Pendidikan Dasar hingga Perguruan Tinggi serta memilih berdomisili di Pekanbaru, Provinsi Riau. Jenjang Perguruan Tinggi diselesaikan menjadi sarjana dari Universitas Riau, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Jurusan Ilmu Kelautan.

Aktif di organisasi Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) Phylomina. Hal tersebut selaras dengan hobi yang diminati untuk bertualang di alam, mengamati isu-isu sosial, pemetaan, investigasi dan inventarisasi keaneka ragaman hayati. Aktif dan peduli pada lingkungan serta sosial masyarakat sejak mahasiswa membawa Herbet menjadi Presidium Jikalahari periode 2005-2007. Setelah menamatkan studinya kemudian meningkatkan dan mengembangkan kecakapannya dalam hal advokasi lingkungan dan isu-isu sosial di Yayasan Mitra Insani (YMI) sejak 2008. Pengalaman bersama YMI hingga saat ini (2022) membawa Herbet didapuk menjadi Direktur YMI.



### Veri Syardianta

Kelahiran Kuantan Singingi 28 tahun lalu, anak kedua dari tiga bersaudara ini menempuh pendidikan tinggi di Universitas Riau pada 2012. Aktif di organisasi pecinta alam Mapala Humendala Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Lulus 2019 lalu.

Suka bertualang dan menemukan hal-hal baru menjadikannya cocok berada di organisasi pecinta alam. Bertualang dan menulis menjadi satu kesatuan yang harus ada baginya. Mulai lebih menyukai membaca, menulis dan mendalami isu-isu lingkungan dan kehutanan sejak bergabung di Jikalari pada 2019 lalu. Pengalaman berharga ini mengantarkan pemikirannya untuk mengajak para pemuda-pemudi agar lebih memperhatikan dan menjaga lingkungan.



### Arpiyan Sargita

Biasa disapa Aldo, lahir di Desa Seko Lubuk Tigo, 24 Juni 1991. Sejak kuliah aktif di organisasi Mapala Suluh FKIP Universitas Riau, salah satu lembaga anggota Jikalahari. Sejak 2012 aktif mengikuti kegiatan Jikalahari, mulai dari acara di hotel seperti seminar lingkungan agar dapar makan siang gratis, investigasi lapangan (jalan-jalan gratis), pemetaan serta kampanye penyelamatan hutan tersisa di Riau.

Akhirnya pada Juli 2018, dipercaya sebagai Manajer Advokasi dan Kampanye Jikalahari. Sejak itu pula memulai hal baru yang namanya menulis.

# CATATAN KAKI

- 1 <https://nasional.tempo.co/read/34372/aktivis-lingkungan-divonis-enam-bulan-penjara>
- 2 <https://pontianak.tribunnews.com/2016/05/05/pk-pt-sintang-raja-ditolak-ma-warga-harap-tak-ada-lagi-kriminilisasi-yang-dilakukan-perusahaan>
- 3 <https://www.mongabay.co.id/2020/12/08/potret-buruh-perempuan-perkebunan-sawit-di-kubu-raja-1/>
- 4 <https://katadata.co.id/timpublikasikatadata/berita/5e9a4c4b6131a/kalimantan-barat-lumbang-sawit-yang-masih-miskin>
- 5 Publikasi statistik, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK (2015)
- 6 Dikutip dari BPS dalam Buku Deforestasi Indonesia Tahun 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2018-2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Buku Statistik KLHK 2018.
- 7 <https://nasional.tempo.co/read/313742/alih-fungsi-hutan-kalimantan-barat-bermasalah-pemerintah-diminta-tegas>
- 8 <https://tanahkita.id/data/konflik/detil/NTFUZmllDg5HeHc>
- 9 <https://katadata.co.id/ariemega/infografik/5fc854c3ee68b/kalbar-perhutanan-sosial-andalan-membangun-desa#:~:text=Hingga%20Oktober%202020%2C%20terdapat%20116%20izin%20Hutan%20Desa,senilai%2081%2C9.%20Adapun%20angka%20median%20nasional%20senilai%2036.>
- 10 Sumber perhitungan dengan metode Calculate Geometry di ArcGIS
- 11 Masyarakat menyepakati untuk menggunakan istilah sekat parit daripada sekat kanal disebabkan karena kanal bagi masyarakat identik dengan kegiatan illegal logging.
- 12 Pemilik kanal biasanya dilekatkan masyarakat kepada nama 'toke kayu' yang membuat kanal sebagai sarana mengeluarkan kayu.
- 13 [https://www.researchgate.net/publication/336210612\\_A\\_new\\_species\\_of\\_Pectenocypris\\_Teleostei\\_Cyprinidae\\_from\\_peat\\_swamps\\_in\\_Sumatra](https://www.researchgate.net/publication/336210612_A_new_species_of_Pectenocypris_Teleostei_Cyprinidae_from_peat_swamps_in_Sumatra)
- 14 <https://kkp.go.id/bdasukamandi/artikel/4239-mangrove-dan-manfaatnya>
- 15 Perda Kaltim No.2 Tahun 2021 Tentang RZWP3K Kaltim, yang menetapkan Teluk Balikpapan sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah.
- 16 Surat Keputusan Gubernur Kaltim No.522.5/K.672/2020 Tentang Penetapan Peta Indikatif KEE Prov.Kaltim, yang memutuskan Teluk Balikpapan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial seluas 65 ribu Ha.

- 17 [https://id.wikipedia.org/wiki/Padang\\_lamun](https://id.wikipedia.org/wiki/Padang_lamun)
- 18 Waycott, M., K. McMahon, J. Mellors, A. Calladine, D. Kleine. 2004. A Guide Tropical Seagrasses of The Indo-West Pacific. Townsville: James Cook University.
- 19 <https://www.mongabay.co.id/2013/09/27/jaringan-masyarakat-gambut-riau-investasi-bisnis-di-lahan-gambut-dorong-munculnya-konflik/>
- 20 Direktorat Bina Pengelolaan Ekonomi Esensial, Laporan Paket Data dan Informasi Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove Torosiaje Serumpun, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo (2018).
- 21 Basri Amin, Rahman Dako, Christopel Paino dkk, Konflik Ruang di Cagar Alam Tanjung Panjang: Dinamika Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Provinsi Gorontalo (Gorontalo: Ideas Publishing, 2018).
- 22 Laporan Akhir Penyusunan Data Base Lahan Tambak Rakyat (Zona II) Kecamatan Lemito, Popayato Barat, Popayato dan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato (Dinas Kelautan dan Perikanan Pohuwato, 2019)
- 23 Direktorat Bina Pengelolaan Ekonomi Esensial, Laporan Paket Data dan Informasi Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove Torosiaje Serumpun, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo (2018).
- 24 Salah satu jenis mangrove dalam bahasa Bajo yang digunakan oleh masyarakat lokal untuk mengistilahkan tempat pembibitan mangrove.
- 25 Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020
- 26 Dyah Ilminingtyas, “Potensi Buah Mangrove sebagai Alternatif Sumber Pangan”. <https://mangrovemagz.com/2017/04/11/potensi-buah-mangrove-sebagai-alternatif-sumber-pangan/>
- 27 Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. “Paket data dan Informasi Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Mangrove Torosiaje Serumpun, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo”.
- 28 Stacey, N., et. al. 2019. Maritime Studies 18:359—371. “Enchancing Coastal Livelihoods in Indonesia: an Evaluation of Recent Initiative on Gender, Women and Sustainable Livelihoods in Small-Scale Fisheries”.
- 29 <https://kumparan.com/banthayoid/dilema-pengelolaan-kawasan-cagar-alam-tanjung-panjang-1551203377528262040/full>
- 30 Instruksi Bupati Pohuwato Nomor 522/PEM/1057/X/2010 Tanggal 8 Oktober 2010 Tentang Larangan Pembukaan Lahan Tambak Baru, Instruksi Bupati Pohuwato Nomor 522/PEM/01/2012 Tanggal 10 Mei 2012 Tentang Larangan Pembukaan Lahan Tambak di Kawasan Hutan Mangrove dan Instruksi Bupati Nomor 522/PEM/742/X/2014 Tanggal 1 Oktober 2014 Tentang Penegasan Pelarangan Pembukaan/ Renovasi Tambak di Hutan Mangrove
- 31 <https://japesda.org/siaran-pers-hentikan-perluasan-tambak-di-catp/>
- 32 Materi presentasi dalam bimtek penanganan konflik tenurial angkatan II 10-15 Desember, Bogor.
- 33 Hasil penginderaan jauh, yang dilakukan oleh BKSDA pada Tahun 1990 dan 1996 mulai terdapat bukaan lahan di Cagar Alam Tanjung Panjang. (Allo Noel Layuk, 2019)
- 34 Basri Amin dkk, Konflik Ruang di Cagar Alam Tanjung Panjang: Dinamika Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Provinsi Gorontalo (Gorontalo: Ideas Publishing, 2018) hal-36.
- 35 Catatan Pribadi Penulis, karena penulis pernah menjadi pendamping lapangan dalam Program Siemenpuu selama satu tahun di Cagar Alam Tanjung Panjang.
- 36 KPA adalah organisasi sipil yang berfokus pada isu-isu agraria, (Lebih lanjut: <http://kpa.or.id/organisasi/profil/>)
- 37 Bappeda Provinsi Gorontalo, 2019. LKPJ Gubernur tahun 2019 [https://bappeda.gorontaloprov.go.id/institution/file\\_share/BAB-I\\_224\\_252.pdf](https://bappeda.gorontaloprov.go.id/institution/file_share/BAB-I_224_252.pdf) diakses pukul 17.19, Tanggal 7 Juli 2021.
- 38 Mongabay Indonesia, 2020. lahan basah di cagar alam tanjung panjang harus dipertahankan. <https://www.mongabay.co.id/2020/02/15/lahan-basah-di-cagar-alam-tanjung-panjang-harus-dipertahankan/> diakses pukul 18.09 tanggal 05 Juni 2021
- 39 “Konflik Ruang di Tanjung Panjang: Dinamika Pengelolaan Ekosistem MAngrove di Provinsi Gorontalo”
- 40 BKSDA Sulawesi Utara. 2014. “Cagar Alam Tanjung Panjang: Menenun Harapan Baru”.
- 41 <https://kronologi.id/2021/01/08/ada-aktivitas-alat-berat-milik-dinas-perikanan-di-cagar-alam-tanjung-panjang-pohuwato/>
- 42 Konflik Ruang di Tanjung Panjang: Dinamika Pengelolaan Ekosistem MAngrove di Provinsi Gorontalo”
- 43 Hardin, G. 1968. The Tragedy of the Commons. Science Vol. 162.





***Solusi atas masalah keadilan yang terkait dengan persoalan sosial, lingkungan maupun ekonomi, seringkali perlu ditinjau kenyataannya di lapangan dari berbagai perspektif. Hal itu diperlukan karena kebenaran di dalam pikiran tidak selalu sejalan dengan kenyataan di lapangan. Buku ini sangat penting dibaca, untuk bersama-sama menata cara menumbuhkan keadilan itu, dari perspektif lapangan yang beragam.***

***Prof Hariadi Kartodihardjo  
Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB***

---

Siemenpuu bermitra dengan lembaga-lembaga lingkungan di Indonesia dan dengan bernas menggagas gerakan akar rumput yang fokus pada penyelamatan lingkungan, hutan, gambut, magrove serta peningkatan ekonomi masyarakat.

Gerakan ini menjadi cikal bakal dan bahkan menginspirasi ataupun mendorong pemerintah untuk 'ikut memperhatikan' kegiatan yang dikerjakan oleh para mitra Siemenpuu.

Dalam kerja-kerja mitra yang didukung Siemenpuu ini, tak hanya memperhatikan perlindungan lingkungan, mendorong keikutsertaan pemerintah didalam kegiatannya juga menjadi hal penting. Karena tanpa adanya campur tangan pemerintah, gerakan yang 'berdampak besar' akan sulit untuk dicapai.

Cerita perjuangan dari para mitra ini coba disajikan dihadapan para pembaca. Harapannya, kisah yang dituturkan ini dapat menginspirasi dan 'membakar' semangat gerakan akar rumput untuk terus berusaha melindungi sumberdaya alam dan lingkungan Indonesia.

Cerita-cerita ini hanya sepenggal dari sekian banyak cerita perjuangan penyelamatan lingkungan di Indonesia. Walau hanya sepenggal, semoga ia bisa memantik semangat perjuangan kita bersama.